



# Chega!

Bagian

4.

Rezim pendudukan



## Bagian 4. Rezim pendudukan

### 375 | Pendahuluan

### 376 | Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan perannya di Timor-Leste

#### 376 | Pendahuluan

#### 377 | Latar belakang ABRI

377 | Latar belakang sejarah ABRI dan TNI

378 | ABRI sebagai penyelamat bangsa

380 | Doktrin ABRI

380 | Struktur teritorial Angkatan Bersenjata Indonesia

382 | ABRI dan Polisi

382 | Pendanaan ABRI dan perannya dalam perekonomian Indonesia

384 | Reorganisasi ABRI pada masa Orde Baru

#### 385 | Struktur organisasi ABRI di Timor-Leste

387 | Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja, Agustus 1975 - Agustus 1976

388 | Komando Daerah Militer Timor Timur, Agustus 1976 - Oktober 1978

390 | Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) Operasi Seroja, Oktober 1978 - Maret 1979

391 | Korem 164/Wira Dharma, 1979 - 1999

391 | Komando Operasi Keamanan Timor Timur, 1984 - 1990

392 | Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Timor Timur, 1990 - 1993

393 | Komando Regional Militer 164/Wira Dharma (Korem 164), 1993 - 1999

394 | Terus hadirnya pasukan tempur

395 | Komando Darurat Militer Timor Timur, September 1999

395 | Komando Darurat Militer dibubarkan: Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur

### 396 | Militerisasi masyarakat Timor-Leste

#### 396 | Pendahuluan

#### 398 | Militerisasi Timor-Leste pra-Indonesia

#### 399 | Militerisasi partai politik Timor-Leste oleh Indonesia sebelum pendudukan

#### 401 | Pembentukan batalion tempur ABRI beranggotakan orang Timor-Leste

#### 402 | Berbagai kelompok paramiliter awal, 1976 - 1981

#### 403 | Paramiliter dekade 1980-an

#### 404 | Pasukan pertahanan sipil

#### 406 | 'Anggota militer triwulan', Milsas, 1989 - 1992

- 407 | Tenaga Bantuan Operasi (TBO)
- 408 | 'Intel'—mata-mata orang Timor-Leste
- 410 | Dekade 1990-an dan perhatian pada pemuda
- 411 | Pasukan pembunuh
- 412 | Milisi (1988 – 1999)
  - 415 | Pembentukan milisi
  - 416 | Keterlibatan TNI dalam pembentukan milisi-milisi
  - 419 | Dukungan TNI bagi milisi
  - 419 | Partisipasi TNI dalam kegiatan milisi
  - 420 | Pemberian pelatihan, persenjataan, dan dukungan operasional
  - 421 | Operasi gabungan TNI-milisi
  - 421 | Pemberian dukungan keuangan dan materi oleh TNI dan badan-badan lainnya
  - 422 | Konsekuensi kerjasama milisi-TNI

#### 424 | Pemerintahan sipil

- 424 | Pemerintahan sementara di Timor-Leste
  - 425 | Kedudukan Gubernur
  - 427 | Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda)
  - 428 | Dewan Perwakilan Rakyat
  - 430 | Lembaga Administrasi Pemerintah: program nasional di tingkat provinsi
  - 433 | Pemerintah kabupaten dan kecamatan
  - 437 | Pemerintah tingkat desa
  - 438 | Layanan sipil

#### Daftar tabel:

- 386 | **Tabel 1** : Struktur komando militer di Timor-Leste
- 412 | **Tabel 2** : Milisi-milisi di Timor-Leste, 1975 - 1999
- 425 | **Tabel 3** : Struktur pemerintahan Indonesia, dengan satuan yang setara dalam sistem Portugis serta militer Indonesia
- 430 | **Tabel 4** : Komposisi anggota DPR Provinsi Timor Timur berdasarkan fraksi, 1980 - 1997
- 434 | **Tabel 5** : Bupati berdasarkan asal-usul dan afiliasi, 1976 - 1999

# Rezim pendudukan

# 4.

## Pendahuluan

1. Dari awal proses dekolonisasi oleh Portugal, menyusul Revolusi Anyelir pada April 1974, militer Indonesia mulai terlibat dalam masa depan Timor-Leste.\* ABRI memaksakan penyelesaian militer atas masalah politik yang sedang berkembang, yang berakibat bencana bagi rakyat Timor-Leste. Kekhawatiran Indonesia atas Timor-Leste pascakolonial yang baru muncul tidak perlu berakibat pada intervensi militer jika pemimpin militer garis keras tidak memiliki posisi yang demikian dominan dalam rezim Orde Baru Presiden Soeharto. Begitu terjun dengan intervensi militer, ABRI mengambil peran utama dalam masa-masa awal pendudukan. Mereka meningkatkan kekerasan militer untuk mencapai tujuan politik penaklukan dan integrasi. Untuk melakukan hal ini, mereka membawa konflik ke setiap tingkat masyarakat Timor-Leste, melibatkan pria, wanita, dan anak-anak Timor-Leste dalam peran-peran tempur, intelijen, penyiksaan, dan pembunuhan untuk menguasai penduduk. Pada 1980-an, ketika konflik militer besar-besaran bergeser menjadi resistansi bawahan oleh generasi baru pemuda Timor-Leste, militer Indonesia sekali lagi mengupayakan solusi kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Pasukan pembunuh dan paramiliter pada pertengahan 1990-an menjadi pendahulu milisi-milisi yang merajalela setelah dibentuk pada 1998 – 1999. Sejak 1974 sampai 1999, ada suatu pola yang konsisten untuk membangun pasukan paramiliter Timor-Leste bersenjata yang beroperasi dengan dukungan ABRI dan dengan impunitas total.

2. Strategi militer ini memiliki dampak yang luas dan bersifat jangka panjang bagi rakyat Timor-Leste. Skala kekerasan berlipat ganda, dan bahkan masuk sampai ke desa-desa terkecil di seluruh wilayah. Ketakutan dan kecurigaan menyebar di masyarakat ketika sesama orang Timor-Leste diadu, khususnya dalam operasi-

---

\* Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dikenal dengan ABRI hingga April 1999, ketika polisi dipisahkan dari angkatan lainnya, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, yang kemudian dikenal bersama sebagai Tentara Nasional Indonesia, TNI.

operasi intelijen dan pemantauan. Masalah impunitas dan ketiadaan sistem yang efektif untuk menegakkan supremasi hukum berarti bahwa rakyat Timor-Leste tidak dapat memercayai polisi serta mekanisme pemerintahan sipil untuk melindungi mereka. Pemerintahan sipil benar-benar tunduk pada militer sebagai institusi, dan pada masing-masing komandan yang sangat berkuasa sepanjang masa pendudukan. Banyak pos sipil penting diisi oleh tokoh-tokoh militer atau mantan militer, dari tingkat nasional sampai kabupaten. Hal ini mengebiri kemampuan pemerintahan sipil untuk berjalan dan menerapkan tujuan-tujuan pembangunan nasional.

3. Bab ini memberi latar belakang mengenai sistem militer dan pemerintahan Indonesia sebagaimana yang berlaku di Timor-Leste selama masa pendudukan. Ini menjadi referensi untuk membantu memahami konteks pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan dalam bab-bab lain.

## Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan perannya di Timor-Leste\*

### Pendahuluan

4. ABRI memainkan peran penting dalam campurtangan dan pendudukan Indonesia di Timor-Leste selama 24 tahun. Pada 1974 – 1975, setelah Revolusi Anyelir di Portugal membuka jalan bagi dekolonisasi di Timor Portugis, BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Nasional) dan pemikir-pemikir sipil dalam Center for Strategic and International Studies atau CSIS, yang berhubungan dekat dengan lembaga tersebut, mendalangi operasi rahasia dan kampanye untuk menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Sejak akhir 1974, kelompok-kelompok ini mulai mempersenjatai dan melatih rakyat Timor-Leste di Timor Barat, dan dengan demikian menyebarkan konflik ke dalam masyarakat Timor-Leste, yang berlanjut hingga 1999.

5. Komisi mendengarkan kesaksian anggota staf senior CSIS, Jusuf Wanandi, yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh militer garis keras mendominasi perdebatan saat Indonesia memutuskan melakukan intervensi militer penuh dan invasi pada 1975. Sejak awal mereka telah menggambarkan intervensi ke Timor-Leste sebagai perang suci antikomunis yang heroik; mengawinkan ide itu dengan ideologi dan sejarah masa lalu rezim Orde Baru untuk mendapatkan dukungan dunia Barat dalam suasana Perang Dingin yang berkelanjutan. Invasi ke Timor-Leste itu merupakan gerakan militer besar-besaran. Tokoh militer garis keras telah meyakinkan pemerintah Indonesia dan para pendukung internasional mereka bahwa pencaplokan Timor-Leste akan menjadi langkah yang cepat dan sederhana. Kredibilitas ABRI dipertaruhkan dalam usaha tersebut. Ketika kemenangan militer ternyata tak secepat dan semudah yang diharapkan, ABRI mencari dan mendapat bantuan militer internasional yang memungkinkannya memperkuat operasinya.<sup>1</sup>

---

\* Bagian ini menekankan pada peran militer ABRI yang lazim atau normal. Pembahasan tentang peran sosial politik ABRI dapat dilihat di segmen 4.4 yang membahas tentang pemerintahan sipil.

6. Walaupun ABRI boleh mengaku telah berhasil menanamkan kontrol militer di Timor-Leste sejak akhir 1970-an, ia tak pernah berhasil memadamkan perlawanan bersenjata. Ketika resistansi kemudian mengubah strategi hingga sebagian besar bergantung pada jaringan bawahan, protes masyarakat perkotaan, serta kampanye diplomasi internasional, ABRI melakukan sejumlah tindakan opresif untuk menghentikan perlawanan tersebut. ABRI membuat kehadirannya di bumi Timor-Leste dapat benar-benar dirasakan baik secara sosial maupun ekonomi. Struktur teritorialnya merambah masuk hingga ke tingkat desa, menyejajari dan mendominasi struktur pemerintahan sipil. ABRI mempertahankan jaringan intelijen di seluruh negeri dan memobilisasi masyarakat sipil Timor-Leste untuk bergabung dalam berbagai macam kekuatan paramiliter selama 24 tahun masa pendudukan, yang berpuncak pada terbentuknya milisi pada 1999. ABRI mempertahankan kendalinya terhadap polisi hingga April 1999. Selain itu, ABRI juga membangun kepentingan dan monopoli bisnis yang sangat kuat di wilayah tersebut, yang, seperti kegiatannya yang lain, telah membawa dampak yang merusak sendi kehidupan sehari-hari masyarakat Timor-Leste (lihat Bab 7.9: Pelanggaran hak ekonomi dan sosial). Invasi ke Timor-Leste dan ketidakmampuan ABRI setelah itu untuk menghancurkan resistansi di wilayah yang didudukinya, membuat wilayah tersebut menjadi ajang bagi para prajurit Indonesia untuk memperoleh pengalaman bertempur dan menumpas pemberontakan selama 24 tahun masa pendudukan. Angkatan demi angkatan perwira menggunakan pengalaman tempur yang diperolehnya di Timor-Leste untuk membangun karier mereka. Beroperasi di provinsi yang teramat jauh, di batas wilayah kepulauan Indonesia, ABRI melaksanakan tugasnya tanpa pengawasan dari pihak luar, dan dalam suatu sistem dengan pemerintahan sipil yang tidak memiliki kekuatan untuk mengimbangi atau mengendalikan tindakan-tindakan militer. ABRI menikmati impunitas penuh atas semua tindakannya.

7. Bab-bab pada Bagian 7 dalam laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia ini akan memerinci segala dampak yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan ABRI terhadap masyarakat Timor-Leste, serta pengalaman masyarakat Timor-Leste hidup di bawah sistem yang didominasi oleh militer Indonesia. Bagian 4 ini berisi informasi tentang ABRI secara umum dan operasi ABRI di Timor-Leste secara khusus, agar seluruh bab yang membahas masalah pelanggaran dapat dipahami sebagaimana mestinya.

## Latar belakang ABRI

### Latar belakang sejarah ABRI dan TNI<sup>2</sup>

8. Baik pihak Belanda maupun kemudian pihak Jepang pernah merekrut orang Indonesia dalam angkatan bersenjata mereka. Perwira dalam Tentara Kerajaan Hindia Belanda (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, KNIL) kebanyakan berkebangsaan Belanda, tetapi prajurit biasa adalah orang Indonesia yang dilatih oleh Belanda. Jepang menginvasi pada Maret 1942, dan menjelang akhir tahun itu mereka telah membentuk Heiho sebagai satuan pembantu dengan tugas penjagaan. Pada 3 Oktober 1943, Jepang membentuk pasukan tempur yang lebih formal

bernama PETA (pasukan sukarela Pembela Tanah Air), dengan tugas mendukung Jepang jika pasukan Sekutu mendarat. Pada masa transisi dari kekuasaan Jepang menuju pengakuan Indonesia sebagai negara berdaulat penuh, sejumlah organisasi bersenjata bermunculan. Kelompok-kelompok ini mencerminkan keragaman ideologi di Indonesia, mulai dari Muslim yang memperjuangkan negara Islam, sampai nasionalis radikal serta Komunis yang menginginkan negara sekuler. Pada 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sebagian besar terdiri atas mantan anggota serta perwira PETA. Setelah kedatangan pasukan sekutu pada akhir September 1945, pada 5 Oktober 1945 BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah satu komando pusat. Melalui dekrit Presiden Sukarno tertanggal 26 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat dijadikan Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI berhasil dikonsolidasi pada pertengahan Mei 1946, dan pada 26 Juni 1946 baik angkatan udara maupun angkatan laut ditempatkan di bawah komando Panglima TRI Sudirman, alih-alih di bawah Menteri Pertahanan. Pada 5 Mei 1947, Sukarno menggabungkan TRI dengan laskar-laskar bersenjata yang lain untuk membentuk Tentara Nasional Indonesia, TNI. Selama 1950-an panglima-panglima angkatan darat, angkatan udara, maupun angkatan laut berada di bawah komando presiden; tetapi menyusul gejolak politik dan pembunuhan secara luas pada 1965, pada Desember 1965 ketiga angkatan tersebut dikonsolidasi bersama dengan kepolisian hingga menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), di bawah komando Panglima ABRI. Pada April 1999, setelah polisi berpisah dari angkatan bersenjata, ABRI kembali diberi nama TNI.

### **ABRI sebagai penyelamat bangsa**

9. Indonesia telah melalui perjuangan yang panjang dan rumit untuk merebut kemerdekaan dari cengkeraman pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa-masa mengangkat senjata, setelah Perang Dunia Kedua, seluruh masyarakat Indonesia bergerak secara meluas untuk mengusir penjajah Belanda, yang mencoba menanamkan kembali kekuasaannya setelah Jepang menyerah. Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk untuk memimpin perjuangan ini, dan memainkan peran penting dalam memaksa Belanda hengkang dari Indonesia setelah revolusi 1945 – 1949. Selama masa ini, hubungan tentara dengan para politikus dan berbagai laskar rakyat yang bermunculan untuk memperjuangkan apa yang disebut dengan Revolusi tidaklah selalu mulus. Sementara pemimpin sipil Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar 1950 yang demokratis, pihak militer telah sejak awal merasa memiliki andil besar dalam masa depan perpolitikan Indonesia.



10. Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi sejumlah peristiwa penting yang memperkuat kekuasaan militer dan membuatnya dapat mengangkat diri sebagai penyelamat bangsa. Selama 1950-an, TNI telah memerangi berbagai gerakan separatis maupun gerakan-gerakan Islam. Pada 1957 – 1958 Indonesia menghadapi dua pemberontakan kelompok federal; satu di Sumatra (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI), dan satu lagi di Sulawesi (Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta). Kedua pemberontakan ini mendapat dukungan kuat, termasuk dari beberapa elemen militer. Presiden Sukarno menyatakan pemberlakuan darurat militer pada 1957, dan militer, yang ketika itu dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, menghancurkan pemberontakan tersebut. Merasa mendapat angin dari kedua kemenangan tersebut, berikut keberhasilannya mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi pada kurun waktu yang hampir sama, menjelang akhir 1950-an TNI mulai menunjukkan sikap politik yang semakin agresif. Pertama mereka melawan partai-partai politik dan kemudian melawan sistem demokrasi itu sendiri. Pada 1959, dengan dukungan militer, Sukarno membuang demokrasi parlementer. Ia kembali pada UUD 1945 dan memulai apa yang disebut dengan Demokrasi Terpimpin, yang memberi presiden kekuasaan lebih besar. Demokrasi Terpimpin juga memberikan hak kepada militer untuk ikut berpolitik, sebagai salah satu dari yang disebut dengan ‘kelompok fungsional’.<sup>3</sup>

11. Setelah masa kekacauan pada awal 1960, saat Sukarno memimpin Indonesia yang semakin terpecah-belah, Angkatan Darat, di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto, pada hakikatnya mendongkel presiden dan meluncurkan gerakan pembersihan yang penuh kekerasan untuk melawan saingan politiknya yang utama, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan dukungan aktif dari militer, pada 1965 – 1966, antara 250.000 hingga 1 juta orang yang dicurigai sebagai komunis dibunuh dan lebih banyak lagi orang berhaluan kiri dan para pendukung Sukarno ditahan di penjara dan kamp tahanan.<sup>4</sup> Pada masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto, militer kembali ditampilkan sebagai penyelamat bangsa, kali ini dari ancaman komunisme.

12. Pada 1974, tentara Indonesia mempergunakan ancaman komunisme untuk membenarkan keterlibatannya di dalam operasi rahasia di Timor-Leste (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Pada puncak Perang Dingin, komunisme merupakan simbol yang ampuh untuk menggalang persekutuan dengan negara-negara lain, khususnya karena Amerika Serikat berupaya mengendalikan penyebaran paham komunis di Asia Tenggara. Meskipun tak ada bukti yang menunjukkan bahwa komunisme merupakan kekuatan utama dalam peta perpolitikan di Timor-Leste, atau bahwa negara-negara komunis sedang secara aktif merayu para pemimpin politik Timor-Leste, ABRI menggambarkan kemungkinan Timor-Leste yang merdeka sebagai ancaman terhadap stabilitas Indonesia. Bertahun-tahun setelah invasi yang terjadi pada 1975, ABRI tetap bersikeras bahwa komunislah yang mereka lawan di Timor-Leste.<sup>5</sup>

## Doktrin ABRI

13. Doktrin dasar ABRI dikenal dengan nama Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, yang mengajarkan bahwa seluruh warga negara harus berperan dalam pertahanan nasional. Konsep ini berasal dari pengalaman selama perang kemerdekaan, ketika TNI bergantung pada dukungan rakyat.<sup>6</sup> Awalnya, konsep ini murni merupakan konsep pertahanan yang berdasarkan pada gagasan bahwa seluruh bangsa perlu melawan musuh yang datang dari luar jika musuh tersebut telah berhasil menaklukkan militer yang ada. Lama-kelamaan, konsep ini berubah karena militer mulai melihat ancaman terhadap keamanan nasional yang terbesar justru datang dari dalam.

14. Peran ABRI dalam kehidupan perpolitikan nasional berubah secara signifikan ketika pada 1959 Presiden Sukarno mendeklarasikan ‘Demokrasi Terpimpin’ dan memberi Tentara Nasional Indonesia hak untuk ikut serta dalam politik. Di bawah kepemimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution, ABRI membuat kebijakan Dwifungsi ABRI, yang mengakui bahwa ABRI memiliki dua fungsi yaitu fungsi keamanan dan fungsi sosial politik.

15. Sejak 1965 dan munculnya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, ABRI secara eksklusif lebih banyak berkonsentrasi pada keamanan nasional. Hal ini dijawabantahkan dalam berbagai kebijakan dan konsep, yang lebih jauh membenarkan keterlibatan ABRI dalam seluruh perikehidupan bangsa. Pada 1966, misalnya, ABRI menganut konsep yang merangkul semua bidang, yaitu Ipoleksos—ideologi, politik, ekonomi, dan sosial.<sup>7</sup> Penyatuan struktur teritorial, yang menciptakan keberadaan ABRI secara geografis di seluruh wilayah Indonesia (lihat paragraf 17 dan 18), mencerminkan fokusnya untuk menguasai situasi dalam negeri.

16. Selama rezim Orde Baru berkuasa, perbedaan pendapat semakin tidak ditoleransi, hingga pada puncaknya setiap kritik yang ditujukan kepada rezim tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap negara. UU Pertahanan 1982 menyebutkan peran sosial-politik ABRI, yang berbunyi:

Pertahanan dan keamanan nasional mencakup pertahanan melawan ancaman-ancaman baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam, dan ancaman-ancaman ini dapat diarahkan terhadap kedaulatan, persatuan, dan solidaritas nasional, keutuhan bangsa dan hukum nasional, dan nilai-nilai falsafah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar.<sup>8</sup>

## Struktur teritorial ABRI

17. Struktur teritorial militer Indonesia dibagi menjadi dua bidang operasional yang luas, yaitu komando tempur dan komando teritorial. Struktur teritorial merupakan ciri khusus militer Indonesia, yang berawal dari zaman perang kemerdekaan, ketika tentara Indonesia masih terbentuk dari satuan-satuan

nonprofesional yang bersifat lokal, yang melakukan perang gerilya melawan Belanda. Struktur-struktur lokal ini berkembang menjadi struktur teritorial resmi yang ada hingga sekarang, yang menjadi bayang-bayang dan menyejajari struktur pemerintahan sipil. Secara operasional, pada puncak struktur ini terdapat Komando Daerah Militer atau Kodam, yang mengawasi sejumlah Komando Resor Militer atau Korem.\* Pada tingkat ini, komando militer tidak selalu berhubungan dengan tingkatan administratif yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi berpenduduk padat—Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur—memiliki Kodam sendiri, dan dalam hal ini Korem di tiga wilayah terakhir itu meliputi sejumlah kabupaten. Tapi, sebagian besar Kodam meliputi lebih daripada satu provinsi sementara Korem meliputi wilayah-wilayah seluas satu provinsi. Inilah yang terjadi di Timor-Leste hampir sepanjang masa pendudukan (lihat paragraf 31 - 33). Di bawah Korem, struktur teritorial selalu sejajar dengan satuan-satuan pemerintahan sipil: setiap kabupaten memiliki satu Komando Distrik Militer atau Kodim dan setiap kecamatan memiliki Komando Rayon Militer atau Koramil. Hampir di setiap desa terdapat Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Militer Indonesia juga memiliki angkatan pertahanan sipil yang dikenal dengan nama Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Rakyat Terlatih (Ratih), yang berada di bawah komandonya. Kelompok-kelompok paramiliter ini direkrut dari masyarakat sipil di desa, cara yang murah untuk memperluas kontrol ABRI dan mengerahkan masyarakat umum untuk melakukan tugas-tugas pengamanan (lihat bagian 4.3: Militerisasi masyarakat Timor-Leste, paragraf 64 – 140, di bawah ini). Hasilnya adalah sebuah lembaga yang mampu menanamkan kekuasaan baik pada pemerintah maupun masyarakat di semua lapisan, serta sebarisan besar pasukan tetap yang pada 1993 mampu menugaskan seorang prajurit untuk setiap 900 orang penduduk.<sup>9</sup>

18. Pada tahun-tahun pertama kepemimpinan rezim Orde Baru oleh Presiden Soeharto, struktur teritorial ini dikonsolidasikan dan diperluas. ABRI menjadi tulang punggung rezim itu, dan melalui struktur teritorialnya ABRI mampu menggunakan sejumlah cara untuk memastikan dominasinya. Jaringan musyawarahnya yang terlembaga dan dianggotai oleh para pejabat tingkat tinggi baik dari kalangan sipil maupun kepolisian, yang disebut dengan Musyawarah Pimpinan Daerah atau Muspida, ada di tingkat provinsi dan kabupaten, sementara Tripika (Tiga Pimpinan Kecamatan) di tingkat kecamatan. Di bidang lain, rezim Orde Baru lebih banyak menampilkan wajah sipil pada dunia. Misalnya, Orde Baru mendorong rakyat bersumpah setia kepada negara dengan cara memastikan keikutsertaan mereka dalam aspek-aspek seremonial nasionalisme Indonesia. ABRI juga menerapkan proyek-proyek kerja publik seperti program ‘ABRI Masuk Desa’, sesuai dengan peran dwifungsi ABRI.

---

\* Hingga 1985, kelompok-kelompok Kodam berada di bawah komando satuan teritorial yang lebih tinggi, yaitu Kowilhan (Komando Wilayah Pertahanan). Kowilhan kemudian dihapus karena dianggap melebihi kebutuhan.

## **ABRI dan Polisi**

19. Polisi Republik Indonesia atau Polri secara kelembagaan merupakan bagian militer selama masa Orde Baru. Sejarah panjang pengabdian polisi pada kepemimpinan angkatan darat sangat berpengaruh pada kemandirian polisi, berikut kapasitas mereka untuk menegakkan hukum dan peraturan. Kekebalan hukum yang selama ini dinikmati oleh angkatan darat dan mereka yang bekerja untuknya juga merupakan dampak pengabdian tersebut. Polisi memiliki doktrin yang serupa dengan ABRI; didirikan atas dasar keyakinan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab seluruh rakyat. Di bawah Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling, anggota masyarakat berperan untuk menjaga keamanan wilayah mereka.<sup>10</sup> Seperti tentara, polisi juga memiliki struktur wilayah, termasuk di tingkat desa (Bintara Polisi Daerah, Binpolda). Selain menjalankan tugas-tugas kepolisian yang normal, polisi juga memiliki satuan bersenjata khusus yang disebut Brigade Mobil atau Brimob. Awalnya, Brimob bertanggung jawab atas keamanan internal, dan karena peran ini telah diambilalih oleh tentara selama masa Orde Baru, Brimob kemudian dikhususkan untuk mengendalikan kerusuhan dan banyak digunakan untuk tujuan ini.

## **Pendanaan ABRI dan perannya dalam perekonomian Indonesia**

20. Sejak terbentuknya, ABRI telah memainkan peran dalam perekonomian Indonesia, yang umumnya disebabkan oleh alokasi dana yang tak memadai untuk angkatan bersenjata,<sup>11</sup> dan sebagai akibatnya ABRI terpaksa mengumpulkan dana sendiri.<sup>12</sup> Praktik 'Pendanaan Non-Budgeter' ini akhirnya menjadi berurat-berakar secara kelembagaan.<sup>13</sup>

21. Proses ini dimulai pada zaman Revolusi, ketika TNI harus melakukan improvisasi untuk menyediakan kebutuhan prajuritnya serta kebutuhan negara yang sedang berjuang. Tapi, keterlibatan mendalam mereka di bidang perekonomian baru dimulai pada akhir 1950-an, ketika tentara mengambil peran sentral dalam semua aspek kehidupan bernegara. Nasionalisasi yang terjadi pada 1957 memberikan kepada tentara kontrol atas sejumlah aset negara, yang digunakannya untuk kepentingan lembaga dan perorangan. Para prajurit ABRI juga menduduki posisi kuat di lembaga-lembaga penting milik negara, seperti Badan Urusan Logistik atau Bulog, yang bertanggung jawab atas pembagian bahan makanan pokok.<sup>14</sup> Ini merupakan awal dari peran terlembaga ABRI sebagai kekuatan ekonomi yang besar dalam negara.

22. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengurangi alokasi anggaran untuk militer dari hampir 30 persen menjadi kurang daripada 10 persen dari APBN.<sup>15</sup> Ia menuai pujian atas apa yang tampak seperti pengurangan peran militer dalam masyarakat. Namun, pada saat yang sama ABRI telah menjadi lebih besar, baik dalam hal ukuran maupun jangkauan wilayah. ABRI juga telah mengembangkan perannya dalam berbagai urusan negara. Kekurangan dalam hal pendanaan dari pemerintah dapat ditutup oleh berbagai bisnis yang dikembangkan ABRI.<sup>16</sup>

23. Tujuan pembangunan rezim Orde Baru membenarkan peran ekonomi ABRI.<sup>17</sup> Konsep ‘kekaryaan’ (saat anggota militer diberi jabatan sipil di berbagai instansi dan perusahaan negara) membenarkan peran ABRI dalam perekonomian negara.<sup>18</sup> Ini berkaitan erat dengan konsep militer penting lainnya, yaitu ‘pembinaan’, suatu gagasan bahwa disiplin dan ketaatan militer adalah vital untuk kemajuan seluruh bangsa. Untuk melakukan koordinasi atas fungsi-fungsi tersebut, ABRI membentuk kantor pusat masalah sosial politik (Kasospol).<sup>19</sup> Hasilnya adalah sejumlah besar perwira yang hanya mengurus hal sipil, yang pada 1992 telah berjumlah 14.000 orang (lihat segmen 4.4 mengenai pemerintahan sipil, paragraf 141 – 183 di bawah ini).<sup>20</sup>

24. Kontrol ABRI terhadap aset-aset negara membuatnya dapat memastikan agar kontrak-kontrak yang menguntungkan diberikan kepada bisnis yang terkait dengan ABRI. Hal ini sering menyebabkan terjadinya operasi yang tidak efisien pada lembaga-lembaga negara demi kepentingan ABRI. Contoh paling nyata adalah Pertamina, konglomerat minyak milik negara yang hampir bangkrut pada pertengahan 1970-an, setelah terjadi penumpukan utang besar-besaran dan menjadi “negara dalam negara”, yang hanya bertanggung jawab kepada Presiden Soeharto.<sup>21</sup> Krisis di Pertamina terjadi bertepatan dengan persiapan menuju intervensi di Timor-Leste dan, untuk beberapa saat, krisis itu sempat membuat TNI ragu mengenai kelayakan untuk melancarkan invasi penuh di wilayah tersebut.<sup>22</sup>

25. Selain memiliki peran formal dalam birokrasi dan perusahaan milik negara, para perwira ABRI juga beroperasi dalam berbagai kapasitas di luar batasan hukum yang berlaku. Mereka dapat menggunakan posisi mereka sebagai perantara untuk para pengusaha yang mau membayar demi mendapat jalur istimewa. Banyak pengusaha itu adalah orang Indonesia keturunan Cina yang menyiapkan modal dan kemampuan pengelolaan keuangan, sementara perwira ABRI menyediakan pengaruh politis dan, bila perlu, kekuatan militer.<sup>23</sup> Salah satu anggota kelompok ini yang banyak dikenal adalah Liem Sioe Liong, teman dekat Soeharto sejak Orde Baru belum berkuasa. Banyak investor asing yang masuk melalui hubungan serupa.<sup>24</sup> Misalnya, PT Freeport McMoran, sebuah tambang emas dan tembaga di Papua Barat. Di sana, ABRI dikontrak untuk memberikan jasa pengamanan sebagai bagian dari transaksinya dengan perusahaan tambang tersebut.\*

.....  
\* Tulisan di *Jakarta Post*, 13 Maret 2003, menyebut bahwa Freeport-McMoran Copper and Gold Inc. telah mengirim “dokumen rahasia kepada kantor pengawas pemerintah di New York serta kepada US Security and Exchange Commission, yang mengungkapkan bahwa pada 2001 perusahaan tersebut telah membayar USD4,7 juta untuk mempekerjakan sekitar 2.300 ‘pegawai keamanan pemerintah Indonesia.” *The Australian Herald* (tulisan Sian Powell) pada 15 Maret 2003 melaporkan, Freeport mengungkapkan telah melakukan pembayaran sebesar USD11 juta kepada TNI selama dua tahun terakhir. Freeport menyatakan bahwa “Tambang Grasberg telah dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu kepentingan nasional yang vital. Pernyataan ini berarti bahwa militer memainkan peran penting untuk mengamankan wilayah kerja perusahaan.” Pernyataan Freeport menerangkan bahwa ia telah membayar ongkos “pengamanan yang berkaitan dengan pemerintah” untuk operasi tambang ini sebesar USD5,8 juta pada 2001 dan USD5,6 juta pada 2002 (lihat <http://www.minesandcommunities.org/Action/press127.htm>).

## Reorganisasi ABRI pada masa Orde Baru

26. Pada zaman Soekarno, keempat angkatan bersenjata (angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan polisi) bersaing satu sama lain, dan para pemimpin staf gabungan ketika itu tidak mampu melakukan koordinasi tugas-tugas pengamanan.<sup>25</sup> Pada akhir dekade 1950-an dan 1960-an, penyatuan dan pemusatan yang lebih besar dapat dicapai, dan pada 1967, Presiden Soeharto dengan Orde Barunya menempatkan tugas-tugas militer di bawah komando sebuah kementerian, yaitu Departemen Pertahanan dan Keamanan atau Dephankam.<sup>26</sup> Sejak 1967 hingga akhir kekuasaan Orde Baru, Panglima ABRI atau Pangab selalu dipegang oleh seorang jenderal angkatan darat. Kewenangan operasional dialihkan dari kepala staf setiap angkatan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang cenderung dirangkap oleh Pangab. Perubahan-perubahan ini menegaskan dominasi angkatan darat secara *de facto* di atas ABRI.

27. Di bawah kepemimpinan Soeharto, sektor intelijen ABRI berkembang menjadi posisi yang memiliki kekuatan sangat besar dalam militer. Intelijen menjadi salah satu aspek inti operasi keamanan internal, yang juga mencakup operasi wilayah, operasi tempur, serta hukum dan ketertiban.<sup>27</sup> Pembungkaman terhadap setiap perbedaan pendapat di dalam negeri merupakan fungsi utama angkatan bersenjata. Ketika dipadukan dengan struktur komando terpusat yang baru, sektor intelijen yang semakin berkembang ini membawa dampak signifikan kepada kebijakan dan sikap ABRI.

28. Presiden Soeharto mulai berkuasa pada masa-masa yang bergolak, dan salah satu dari struktur pertama yang ia bentuk untuk melindungi posisinya adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib. Ia memiliki kendali langsung terhadap lembaga yang berada di luar konstitusi dan sangat kuat ini.<sup>28</sup> Lembaga ini sangat antikomunis dan misinya adalah:

Memulihkan keamanan dan ketertiban sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan-kegiatan ekstremis dan subversif lainnya.<sup>29</sup>

29. Pada 1966, BPI atau Badan Pusat Intelijen diganti namanya menjadi Koordinasi Intelijen Nasional atau KIN dan dibawah Presiden Soeharto melalui Kopkamtib. Sebuah lembaga lebih informal yang memainkan peran penting pada masa awal pemerintahan Orde Baru di Indonesia adalah Satuan Operasi Khusus atau Opsus yang dipimpin oleh Jenderal Ali Moertopo. Badan ini membantu mengatur Pemilu 1971, dan secara rahasia menjawab berbagai tantangan, seperti mengakhiri "Konfrontasi" dengan Malaysia, dan merekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua Barat pada 1969.<sup>30</sup> Pada 1974, Opsus erat dikaitkan dengan *think-tank* sipil, Centre for International Strategic Studies atau CSIS, saat membangun strategi yang berujung pada pengambilalihan Timor-Leste (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

30. Pada 1974, setelah kerusuhan besar yang dikenal dengan Malari, yang menyingkap adanya ketidakpuasan yang meluas pada Orde Baru serta terjadinya perpecahan yang serius dalam tubuh militer sendiri, Soeharto melakukan konsolidasi

dan pemusatan aparat intelijen dan keamanan dalam negeri. Kekuatan yang besar dipusatkan pada Mayor Jenderal Benny Moerdani yang mengepalai bagian intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan, sekaligus menjabat sebagai wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen dan kepala Pusat Intelijen Strategis. Sistem pemeriksaan dan keseimbangan militer dan politik yang biasanya mengendalikan badan intelijen dihapuskan, dan intelijen memperoleh kekuatan dan pengaruh dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jenderal Moertopo serta Moerdani, dengan jaringan intelijen mereka, memainkan peran kunci dalam pengembangan dan penerapan kebijakan di Timor-Leste pada 1974 – 1975.

## Struktur organisasi ABRI di Timor-Leste

31. Pada subbagian ini akan dijelaskan tentang struktur komando ABRI selama 25 tahun masa intervensi, invasi, dan pendudukan Indonesia di Timor-Leste. Di sini akan ditelusuri bagaimana ABRI berusaha menyamakan struktur organisasinya di Timor-Leste dengan struktur organisasinya di Indonesia, sambil harus menghadapi kenyataan bahwa sifat konflik yang ada memaksa ABRI memperlakukan Timor-Leste sebagai kasus yang khusus dan pelik selama berlangsungnya masa pendudukan.

32. Selama 24 tahun masa pendudukan, sejumlah pergantian struktur dan kebijakan dilakukan dalam pengaturan militer Indonesia di Timor-Leste. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh sifat konflik di Timor-Leste sendiri, oleh bantuan internasional, dan kadang-kadang oleh perhatian internasional, dan akhirnya oleh tekanan internasional agar Indonesia menyinggalkan wilayah tersebut. Tahap-tahap keterlibatan militer Indonesia di Timor-Leste adalah sebagai berikut:

- Operasi intelijen rahasia pada 1974 dalam rangka persiapan untuk melakukan tindakan pengambilalihan militer dan pendudukan secara penuh;
- Pembentukan struktur komando militer di Timor-Leste untuk yang diistilahkan sebagai masa transisi, yang berlangsung hingga akhir dekade 1970-an, ketika ABRI berupaya melakukan konsolidasi dan menghancurkan perlawanan bersenjata;
- Pengalihan komando ke struktur komando regional konvensional ketika ABRI menyatakan Timor-Leste telah “aman”;
- Perluasan struktur teritorial ABRI setelah 1979, untuk mengendalikan masyarakat sipil ketika mereka turun dari gunung-gunung dan ditempatkan di berbagai kamp dan desa;
- Pembentukan dua struktur komando secara sejajar, yaitu komando tempur dan komando teritorial, pada dekade 1980-an;
- Keputusan untuk memperlakukan Timor-Leste sebagai provinsi yang “normal” setelah Indonesia membuka sebagian Timor-Leste pada akhir 1988;
- Pergeseran fokus menuju operasi intelijen dan penggunaan Brimob untuk mencegah penyebaran kegiatan bawah tanah dan demonstrasi masyarakat pada dekade 1990;

- Pengeralhan pasukan Kostrad pada akhir 1998 saat terbentuknya milisi;
- Pembentukan struktur komando khusus setelah Jajak Pendapat (30 Agustus 1999), ketika Presiden Habibie menyatakan diberlakukannya darurat militer di Timor-Leste,
- Pencabutan kembali struktur komando khusus pada akhir September 1999, yang kemudian diganti dengan Satuan Tugas Gabungan Timor Timur untuk melakukan koordinasi pengunduran diri Indonesia seiring dengan kedatangan Interfet (International Force for East Timor).

33. Uraian ini merupakan latar belakang untuk bab-bab pelanggaran hak asasi manusia pada Bagian 7 dalam laporan ini, dan untuk Bagian 8: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Uraian ini tidak dimaksudkan untuk memberi analisis menyeluruh dari semua faktor yang berperan dalam pergantian struktur organisasi dan kebijakan ABRI, atau segala dampak yang ditimbulkan oleh pergantian tersebut. Sebaliknya, uraian ini menyoroti berbagai perkembangan penting yang relevan dengan hal-hal yang menjadi pusat perhatian Komisi.

**Tabel 1: Struktur komando militer di Timor-Leste**

<b>Tanggal</b>	<b>Komando</b>	<b>Operasi besar yang diketahui</b>
Akhir 1974	Operasi Khusus (Opsus) <sup>31</sup>	Operasi Komodo
Awal 1975	Asisten I/ Intelijen, Departemen Pertahanan dan Keamanan, didukung oleh pasukan khusus Kopassandha <sup>32</sup>	Operasi Flamboyan
31 Agustus 1975	Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja Gabungan (Kogasgab Seroja). <sup>33</sup>	Operasi Flamboyan Operasi Seroja (invasi)
Agustus 1976	Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan Timor Timur (Kodahankam)	Operasi Seroja
Oktober 1978	Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja (Kogasgab Seroja)	Operasi Seroja Operasi <i>Skylight</i>



26 Maret 1979	Komando Regional Militer 164/Wira Dharma (Korem 164)	Operasi Keamanan Operasi Kikis Operasi Persatuan
1984	Komando Operasi Keamanan Timor (Koopskam Timor Timur). (Komando Perang dan intelijen)	Operasi Watumisa 1 Operasi Watumisa 2
Mei 1990	Komando Pelaksanaan Operasi Timor Timur (Kolakops Timor Timur).	
Maret 1993	Komando Resort Militer 164 (Korem 164)	Tidak ada operasi formal yang dilakukan, meskipun pasukan perang ditempatkan secara permanen di Timor-Leste.
7 September 1999	Komando Penguasa Darurat Militer Timor Timur	
23 Sep 1999	Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur	

Sumber: CAVR

## Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja,<sup>34</sup> Agustus 1975 – Agustus 1976

34. Keterlibatan militer Indonesia di Timor-Leste dimulai pada pertengahan 1974, ketika Satuan Operasi Khusus (Opsus) di bawah pimpinan Mayor Jenderal Ali Moertopo mulai melaksanakan operasi rahasia yang disebut dengan Operasi Komodo. Pada awal 1975, Operasi Komodo berakhir dan diganti dengan Operasi Flamboyan, di bawah kendali Mayor Jenderal Benny Moerdani, kepala intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Operasi tersebut mendapat dukungan sumberdaya yang lebih baik, dan melibatkan satuan pasukan khusus (Kopassandha), serta melakukan aktivitas yang lebih luas daripada Operasi Komodo, termasuk menciptakan ketidakstabilan, mengumpulkan data intelijen, dan melatih anggota kelompok paramiliter yang direkrut dari masyarakat Timor-Leste. Pada 31 Agustus

1975, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Panggabean, membentuk Komando Satuan Tugas Gabungan Operasi Seroja (Kogasgab Seroja).<sup>35</sup> Dengan demikian, keterlibatan militer Indonesia di Timor-Leste ditempatkan langsung di bawah arahan dan kendali komando pusat ABRI.

35. Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja dipimpin oleh Brigadir Jenderal Soeweno, yang mengomandoi invasi penuh pada Desember 1975, yang dikenal dengan nama Operasi Seroja. Operasi ini merupakan operasi militer gabungan yang melibatkan pasukan dari seluruh angkatan, termasuk yang berikut:

- Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad;
- Komando Pasukan Sandhi Yudha, Kopassandha;
- Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat, milik angkatan udara;
- Batalion-batalion marinir serta infanteri dari beberapa komando daerah.

36. Meskipun Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja langsung memegang komando atas semua pasukan, operasi tersebut dilaksanakan di bawah perintah Kostrad, mula-mula oleh Komandan Tempur (Kopur) II, kemudian setelah Maret 1976 oleh Komandan Tempur Lintas Udara (Kopur Linud).

37. Pada awal 1976, Komando Seroja membagi Timor-Leste menjadi empat sektor operasi. Sektor A meliputi Dili dan daerah Oecussi; Sektor B meliputi Bobonaro, Covalima, Ermera, dan Liquiçá; Sektor C meliputi Aileu, Ainaro, Manufahi, dan Manatuto; dan Sektor D meliputi Baucau, Viqueque, serta Lautém.\* Dengan perkecualian sektor A (Dili), suatu gabungan Resimen Tim Tempur (RTP) ditugaskan mengawasi operasi di setiap sektor. Setiap Resimen Tim Tempur terdiri atas enam sampai delapan batalion teritorial, yang mendukung satuan artileri, kavaleri, dan zeni yang disebut sebagai satuan Bantuan Tempur atau Banpur.

## **Komando Daerah Militer Timor Timur, Agustus 1976 – Oktober 1978**

38. Segera setelah parlemen Indonesia meloloskan undang-undang untuk menyatukan Timor-Leste dengan Republik Indonesia pada Juli 1976, ABRI melakukan reorganisasi struktur komandonya di Timor-Leste untuk menggabungkan apa yang selama ini merupakan operasi eksternal menjadi struktur organisasi militer biasa. Pada 4 Agustus 1976, Kementerian Pertahanan dan Keamanan pada dasarnya membuat operasinya di Timor-Leste menjadi operasi dalam negeri dengan cara membentuk Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan (Kodahankam) Timor Timur. Dokumen-dokumen kementerian menjabarkan peran Kodahankam Timor Timur dalam rangka melakukan konsolidasi posisi militer selama apa yang disebut dengan masa transisi:

.....  
\* Indonesia menyesuaikan beberapa batas kabupaten (Zumalai dulunya bagian dari Bobonaro/Ainaro dan bukan bagian dari Covalima), juga mengubah beberapa nama di akhir dekade 1970 (Same menjadi Manufahi, Lospalos menjadi Lautém).

Komando Pertahanan Wilayah Timor Timur dibentuk dengan maksud untuk membangun landasan bagi Pembinaan dan Pengembangan Pertahanan dan Keamanan di Timor Timur selama “masa transisi,” yang berlangsung sampai pada akhir Repelita Kedua (pada 1979), serta untuk menerapkan Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional.<sup>36</sup>

39. Perubahan yang terjadi sangat besar:

- Tentara mulai membentuk sistem komando teritorial, terdiri atas Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil). Pada mulanya, Kodim diberi nomor 01 (Dili) sampai dengan 13 (Oecussi). Instruksi pada Februari 1977 tentang organisasi Kodahankam memperhitungkan bahwa delapan dari tigabelas Kodim yang ada akan beroperasi di bawah Korem, sementara lima lainnya akan berdiri sendiri dan melapor langsung pada Kodahankam. Tapi, mengingat Korem 164 baru dibentuk Maret 1979, dalam kenyataan semua Kodim berada di bawah komando dan kendali langsung Kodahankam dan kemudian, sejak Oktober 1978 hingga Maret 1979, di bawah penerus Kodahankam yaitu Kogasgab Seroja.
- Kodahankam membawahi beberapa jenis satuan tempur. Meneruskan praktik yang dilakukan pendahulunya, Kodahankam mengerahkan Resimen Tim Tempur atau RTP di sektor-sektor operasi. Pada akhir 1976 hingga awal 1977, struktur ini meliputi RTP 16 di Sektor B, RTP 13 di Sektor C, dan RTP 15 di Sektor D. Selain itu juga dikerahkan Batalion Tempur Berdiri Sendiri serta Batalion Bantuan Tempur Berdiri Sendiri yang semuanya di luar RTP, yang meliputi pasukan artileri, kavaleri, zeni, dan pasukan khusus lainnya.
- Kodahankam meliputi Satuan Tugas/Badan Pelaksanaan Intelijen yang disingkat Satgas/Balak Intel, atau Satgas Intel saja. Satuan ini memainkan peran penting dalam penindasan di Timor-Leste. Satgas Intel akan terus memainkan peran ini hingga dua dekade berikutnya.
- Polisi militer dikerahkan di Dili dan kota-kota utama lainnya. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Polisi Militer memainkan peran aktif dalam pertumbuhan sistem pusat-pusat penahanan dan berdirinya fasilitas rumah tahanan. CAVR tidak memiliki data yang menunjukkan bahwa Polisi Militer melakukan tindakan disipliner terhadap personel militer selama masa ini.
- Satuan polisi tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dibentuk pada masa ini, meskipun selama beberapa tahun mereka beroperasi langsung di bawah komando Kodahankam.
- Birokrasi militer juga mengalami perkembangan yang signifikan.\*<sup>37</sup>

\* Selain dari staf umum yang telah ada, Komandan Kodahankam Timor Timur juga dilayani oleh sejumlah tenaga spesialis (informasi, keuangan, perkembangan mental, sejarah, hukum, dan psikologi) sejumlah badan pelaksanaan (komunikasi dan elektronik, polisi militer, kesehatan, administrasi personel, logistik komando, dermaga laut, dan lapangan udara), serta sejumlah satuan operasional (Brigif/RTP, satuan tugas intelijen, batalion berdiri sendiri, satuan wilayah, satuan tugas laut dan udara, dll).

40. Selama periode ini, ABRI terlibat dalam operasi militer penuh melawan Fretilin/Falintil, yang memegang kendali di wilayah pedalaman yang cukup luas dan terhadap sejumlah besar masyarakat sipil. Senjata militer internasional, terutama dari AS, memainkan peran penting dalam memberikan kemampuan kepada ABRI untuk menghancurkan markas basis perlawanan Fretilin di gunung dan di hutan, dan untuk mengakhiri fase perlawanan ini.

### **Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) Operasi Seroja, Oktober 1978 – Maret 1979**

41. Pada 12 Oktober 1978, didirikan Kogasgab Seroja yang baru.<sup>38</sup> Kogasgab Seroja ditempatkan di bawah kendali Kodam XVI/Udayana, yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur.<sup>39</sup> Sebulan kemudian, kendali operasi terhadap Timor-Leste dialihkan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang ketika itu mengawasi wilayah tersebut, kepada Komando Wilayah Pertahanan atau Kowilhan II, yang meliputi Jawa, Bali, dan seluruh Nusa Tenggara. Semua perubahan tersebut mengisyaratkan pengakuan oleh ABRI bahwa mereka telah memperoleh kemenangan penting atas Fretilin/Falintil, dan bahwa tak lama lagi keadaan akan segera “normal kembali”. Keputusan Menteri mengenai pembentukan komando baru menyatakan:

Dari sejak pembentukannya, dan dalam waktu sesegera mungkin, Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja (akan) menghancurkan sisa-sisa Gerombolan Pengacau Keamanan, untuk mempertahankan dan meningkatkan keamanan di wilayah ini, dan membantu dalam persiapan normalisasi pemerintahan sipil yang berjalan, dengan melaksanakan Operasi Keamanan Dalam Negeri di Provinsi Timor Timur.<sup>40</sup>

42. Brigadir Jenderal Dading Kalbuadi yang telah memimpin Kodahankam sejak 1976, ditunjuk menjadi Komandan Kodam XVI/Udayana, dan karena itu tetap langsung mengomandoi operasi militer di Timor-Leste.

43. Di bawah komando Kolonel Sutarto, Kogasgab Seroja mengawasi tahap akhir Operasi Seroja di Timor-Leste pada akhir 1978 dan awal 1979 (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Dengan jatuhnya basis pertahanan Fretilin yang terakhir di kawasan Gunung Matebian (November 1978), Gunung Kablaki (sekitar Januari 1979), Fatubessi, Ermera (Februari 1979), dan Alas, Manufahi (Maret 1979), ABRI memperoleh kekuasaan formal atas seluruh wilayah Timor-Leste. Kematian Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, pada 31 Desember 1978 semakin memberi alasan bagi tentara Indonesia untuk berpikir bahwa pertempuran telah usai. Semua perkembangan ini mengawali reorganisasi lebih lanjut pada struktur organisasi militer di Timor-Leste.

## **Korem 164/Wira Dharma, 1979 – 1999**

44. Dengan dinyatakan Timor-Leste dalam kondisi aman, ABRI kemudian mengakhiri Operasi Seroja, dan pada 26 Maret 1979, ABRI membentuk Komando Resort Militer 164/Wira Dharma atau Korem 164.<sup>41</sup> Ini merupakan satu dari empat Korem yang berada di bawah Kodam XVI/Udayana, dengan markas besar di Denpasar, Bali. Karena rakyat sipil yang menyerah ditempatkan di kamp-kamp penahanan dan kemudian di desa-desa, struktur teritorial pun diperluas. Babinsa (bintara pembina desa) memperluas jangkauan militer hingga ke tingkat desa. Menjelang 1990, jumlah Babinsa melebihi jumlah keseluruhan desa di Timor-Leste.<sup>42</sup>

45. Ketika melaksanakan operasi, komandan Korem juga menjabat sebagai komandan Kolakops (Komando Pelaksana Operasi). Jadi, Kolakops hanyalah nama lain dari Korem, meskipun ia memiliki pasukan nonorganik tambahan.<sup>43</sup>

46. Pada 1979, Menteri Pertahanan dan Keamanan mengeluarkan perintah operasi tempur di Indonesia selama 1979 – 1980. Tujuan operasi tersebut di Timor-Leste dijelaskan di bawah ini:

- a) Penghancuran sisa-sisa kegiatan dan kemampuan perlawanan bersenjata dari Gerakan Pengacau Keamanan agar mereka tidak lagi mempunyai kemampuan strategis, khususnya dalam kaitannya dengan perlawanan politik oleh unsur-unsur Gerakan Pengacau Keamanan di luar negeri.
- b) Penutupan Timor Timur sehingga tidak mungkin bagi gerakan Pengacau Keamanan untuk lolos dari wilayah tersebut atau menyelundupkan bantuan fisik dari luar ke dalam wilayah Timor Timur.
- c) Bantuan program rehabilitasi infrastruktur dan normalisasi kegiatan penduduk.<sup>44</sup>

## **Komando Operasi Keamanan Timor Timur, 1984 – 1990**

47. Pada 1984, ABRI menyusun struktur komando tempur baru yang disebut Komando Operasi Keamanan Timor Timur (Koopskam Timor Timur).<sup>45</sup> Kostrad mendominasi komando tempur yang baru itu. Komandan Divisi Infanteri I Kostrad (Divif I/Kostrad) memegang posisi pemimpin dan stafnya mengisi berbagai posisi dalam struktur komando perang yang baru itu.

48. Selama periode ini, terdapat hubungan hierarkis antara Korem dan Koopskam, dan Koopskam memegang komando utama. Koopskam bertanggung jawab atas operasi tempur dan intelijen, sedang Korem bertanggung jawab atas urusan teritorial. Kepala Komando Operasi Keamanan adalah seorang brigadir jenderal dan karenanya lebih tinggi dari komandan Korem 164, yang adalah seorang kolonel.

49. Kopassandha dan Kostrad memainkan peran besar dalam pertempuran di Timor-Leste selama periode ini. Para perwira yang ditunjuk menjadi komandan Koopskam selama pertengahan dekade 1980 sekaligus mengabdikan sebagai komandan Divisi Infanteri Kostrad yang bemarkas di Jawa Barat.<sup>\*</sup> Penunjukan ganda ini memudahkan koordinasi antara Kopassandha dan pasukan Divif I/Kostrad yang bemarkas di Jawa Barat.

50. Pada Juli 1988 Divisi Infanteri Kedua Kostrad ditunjuk untuk menggantikan Divisi Infanteri Pertama di bawah struktur Komando Operasi Keamanan untuk Timor Timur. Sebuah buku sejarah militer menunjukkan bahwa pada serahterima tersebut, ABRI menganggap Falintil dalam keadaan lemah, namun mengakui kemampuannya untuk melakukan operasi maupun memengaruhi penduduk setempat.

Sisa-sisa GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) yang berkeliaran di hutan-hutan Timor Timur, terutama yang terdapat di sektor tengah dan timur, secara fisik berjumlah kurang dari 244 orang. Mereka memiliki sekitar 217 buah senjata, yang terdiri dari berbagai jenis senjata ringan, laras panjang dan pendek.

Mereka adalah bekas pemimpin dan anggota Fretilin dan ideologi mereka berhaluan komunisme, Marxisme dan Leninisme. Mereka masih mampu menunjukkan eksistensi mereka. Melalui berbagai cara, mereka mempengaruhi segelintir orang untuk mendukung sebuah negara merdeka yang terpisah dari Republik Indonesia.<sup>46</sup>

## **Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Timor Timur, 1990 – 1993**

51. Pada Desember 1988, sebagai tanggapan atas permintaan dari Gubernur Mario Viegas Carrascalão di awal tahun tersebut, Presiden Soeharto menandatangani Surat Keputusan Presiden No. 62/1988, yang memberikan Provinsi Timor Timur “status yang setara” dengan ke-26 provinsi lainnya. SK No. 62 tersebut memberi izin untuk bepergian secara lebih bebas di dalam provinsi, membolehkan warga negara Indonesia dari wilayah lain di Indonesia memasuki Timor-Leste, memberikan izin masuk bagi wisatawan ke Timor-Leste, dan membolehkan wartawan luar negeri mengunjungi provinsi tersebut (setelah memperoleh persetujuan resmi). Semua ini merupakan upaya memperlihatkan sikap ramah pendudukan militer Indonesia atas wilayah tersebut. Pada 1989, Komandan Korem, Kolonel Rudolf Samuel Warrouw, mengumumkan operasi baru dengan nama Operasi Senyum yang bertujuan mengurangi pembatasan terhadap perjalanan, membebaskan sejumlah tahanan politik, serta membatasi penggunaan penyiksaan selama interogasi.

<sup>\*</sup> Hal ini berlaku pada Brigadir Jenderal Sugito (sekitar 1983 – 1985), Brigadir Jenderal Warsito (1985 – 1987), Brigadir Jenderal H. B. Mantiri (1987 – 1988), dan mungkin Brigadir Jenderal Sutarto (? – 1983).

52. Keputusan untuk memperlakukan Timor-Leste sebagai “provinsi biasa” mengakibatkan perubahan lebih jauh pada struktur militer. Pada Mei 1990, Komando Operasi Keamanan untuk Timor Timur dikembalikan ke Komando Pelaksana Operasi di Timor Timur (Kolakops Timor Timur).<sup>47</sup> Komandan Korem, Kolonel Rudolf Samuel Warrouw, ditunjuk membawahi Kolakops dan ia dipromosikan menjadi brigadir jenderal menggantikan Brigadir Jenderal Mulyadi, seorang jenderal garis keras.

53. Meski demikian, periode ini terjadi bersamaan dengan bangkitnya pemuda perkotaan dan gerakan Resistansi bawahan dan digunakannya demonstrasi oleh rakyat menentang rezim pemerintah Indonesia (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Pada 12 November 1991, tentara militer Indonesia terfilmkan melakukan pembunuhan massal atas para demonstran yang melakukan aksi damai di permakaman Santa Cruz, Dili (Lihat Bagian 3: Sejarah konflik, dan Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Meski Dewan Kehormatan Militer dibentuk, sejumlah perwira tinggi dipecat dari kedinasan, beberapa perwira menengah dan prajurit dibawa ke mahkamah militer, tidak ada tindakan langsung untuk mengubah struktur militer di Timor-Leste.

### **Komando Regional Militer 164/Wira Dharma (Korem 164), 1993 – 1999**

54. Meskipun dunia internasional mengutuk militer Indonesia setelah pembunuhan massal di Santa Cruz, ABRI yakin bahwa ia telah dapat mengendalikan Resistansi. Dokumen militer pada Agustus 1992 menyebutkan bahwa:

Tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia telah menceraiberaikan sebagian besar jaringan bawah tanah, baik di dalam maupun di luar Timor Timur.<sup>48</sup>

55. Kepercayaan diri militer tersebut makin tinggi dengan ditangkapnya Xanana Gusmão pada 20 November 1992 dan Mauhunu (Antonio Gomes da Costa) pada 3 April 1993.

56. Upaya militer semakin bergeser ke arah pengendalian dan penekanan terhadap perlawanan kelompok pemuda. Upaya ini dipimpin langsung oleh Kopassus (Komando Pasukan Khusus).<sup>49</sup> Ketika Komando Pelaksana Operasi di Timor Timur (Kolakops) dibubarkan, Satuan Gabungan Intelijen (SGI) dialihkan ke Komando Regional Militer 164 dan namanya diubah menjadi Satuan Tugas Intelijen (Satgas Intel). Bertentangan dengan kebijakan resmi untuk menormalisasi status Timor-Leste dan mengurangi kehadiran militer di sana, pada akhir 1994 Brigadir Jenderal Prabowo Subianto dan Kopassus memulai operasi perang urat syaraf untuk mengintimidasi dan menyor pendudukan Timor-Leste, menambah pelatihan militer untuk pegawai negeri dan mahasiswa, serta memperbanyak kelompok paramiliter dan mendirikan organisasi milisi baru.<sup>50</sup>

57. Fokus pada tindakan represif terhadap perlawanan di perkotaan selama dekade 1990-an juga ditandai oleh kehadiran dan penggunaan sejumlah besar satuan polisi anti-huru-hara, Brimob.<sup>51</sup> Di Timor-Leste, rasio antara jumlah satuan Brimob dan jumlah penduduk jauh lebih besar daripada di daerah lain di Indonesia pada saat itu.<sup>52</sup> Di Timor-Leste, pada Agustus 1998, hampir 7.400 personel Brimob yang terkenal dengan kekejamannya ditempatkan di sana, terbagi dalam satuan teritorial (sebanyak 214 personel) dan satuan-satuan yang dibawa dari luar daerah (7.156). (Lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan.)

### **Terus hadirnya pasukan tempur**

58. Pada Maret 1993, Kolakops dibubarkan dan fungsinya dialihkan ke Korem. Operasi tempur biasanya bukan merupakan tanggung jawab komando teritorial.<sup>52</sup> Sektor Tempur A dan B di Timor-Leste dialihkan ke Korem 164 dan ABRI terus menempatkan pasukan tempur dalam jumlah besar. Informasi terperinci mengenai penempatan pasukan sejak 1998 didapatkan dari dokumen rahasia militer yang diselundupkan dari Timor-Leste.<sup>53</sup> Dokumen-dokumen ini secara jelas menyebutkan banyaknya penempatan pasukan tempur: lima batalion tempur infanteri dan sejumlah kontingen dengan tugas khusus sudah berada di Timor-Leste sejak Agustus 1998. Selain itu, satuan pelatihan Kopassus juga hadir, yang merupakan bukti bahwa Timor-Leste telah digunakan sebagai medan latihan bagi pasukan-pasukan elite ABRI.<sup>54</sup>

59. Selama periode antara saat pembubaran Komando Pelaksanaan Operasi di Timor Timur (pada 1993) dan 1999, ABRI terus menempatkan pasukan Kostrad, Kopassus, serta infanteri dan satuan lainnya dari luar Timor-Leste. Dari 1993 hingga 1997, rata-rata ada enam batalion luar yang ditempatkan di Timor-Leste pada setiap saat. Data Komisi menunjukkan, hanya ada satu batalion Kostrad ditempatkan di Timor-Leste pada setiap saat selama periode tersebut. Pada 1995, ABRI mulai menempatkan pasukan strategis dengan tugas khusus ke Timor-Leste. Kontingen pertama pasukan tempur ini, yang bernama sandi 'Rajawali'<sup>†</sup> ditempatkan di sektor tempur di bawah Korem 164 pada Oktober 1995.<sup>55</sup> Mereka kebanyakan ditarik dari Kostrad, dan pasukan tersebut biasanya dimutasi setiap 12 bulan. Pada akhir 1998, ditempatkan pasukan dari kelompok intelijen dan antiteror Kopassus. Mereka digandengkan dengan Satgas Intel (yang lebih dikenal dengan sebutan awalnya, SGI). Pada 1998, jumlah keseluruhan batalion luar yang ditempatkan di Timor-Leste meningkat hingga mencapai paling sedikit dua belas batalion.<sup>56</sup>

\* Rasio pasukan Brimob terhadap penduduk sipil di Indonesia adalah 1:20.000 (Lowry, hal. 94); di Timor-Leste, jumlah ini berkisar pada 1: 700 (berdasarkan 1.013 unit Brimob pada 1998; dan jumlah penduduk 747.557 pada sensus 1990).

† Berbeda dengan Kopassus Rajawali.



## **Komando Darurat Militer Timor Timur, September 1999**

60. Sebagai buntut kekerasan yang terjadi setelah Jajak Pendapat, dan di bawah tekanan internasional yang keras untuk mengizinkan pasukan penjaga perdamaian luar memasuki Timor-Leste, Jenderal Wiranto mengirim surat kepada Presiden B. J. Habibie pada 6 September 1999 mengenai “perkembangan terakhir situasi Timor Timur dan rekomendasi kebijakan untuk penanganannya”.<sup>57</sup> Wiranto menerangkan bahwa keamanan semakin memburuk, menjadi “brutal dan anarkis dan menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda”. Di antara alasan yang dikutipnya adalah “kekecewaan kelompok prointegrasi yang disebabkan oleh keberpihakan pihak Unamet” selain “kesalahan konsepsi di kelompok prointegrasi yang meyakini bahwa mereka dapat mengubah hasil referendum melalui kekerasan.” Tekanan internasional menyebabkan Presiden B. J. Habibie mengambil tindakan berdasarkan surat tersebut, dengan menandatangani Keppres Nomor 107/1999 yang mengumumkan berlakunya darurat militer di Timor-Leste mulai tengah malam 7 September 1999.

61. Setelah pengumuman darurat militer tersebut, Jenderal Wiranto mengeluarkan Perintah Panglima yang menggariskan pembentukan Komando Penguasa Darurat Militer Timor Timur sejak tengah malam, pada 7 September 1999.<sup>58</sup> Disebutkan bahwa tujuan utama adalah mengembalikan keamanan di Timor-Leste dalam waktu sesingkat mungkin, memberikan jaminan keamanan sehingga hasil Jajak Pendapat dapat dijalankan, dan mempertahankan kepercayaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, termasuk ABRI dan Polri.

62. Mayor Jenderal Kiki Syahnakri diangkat menjadi panglima darurat militer. Ia dan perwira tinggi lain yang baru diangkat pernah bertugas di Timor-Leste selama dekade 1990-an, dan beberapa di antara mereka pernah memegang posisi komandan menjelang diadakannya Jajak Pendapat. Di antara mereka terdapat sejumlah perwira Kopassus.\* Ini artinya sejumlah perwira, yang kebanyakan Kopassus, memegang komando atas pasukan Kostrad selama periode darurat militer tersebut. Wiranto mungkin ingin menempatkan perwira Kopassus pada posisi komando sebagai upaya untuk mengurangi kecemasan terhadap personel Kopassus yang telah memainkan peran utama dalam mengorganisasi milisi dan untuk mencegah berkembangnya ketegangan antarsatuan. Selama periode darurat militer inilah terjadi pelanggaran HAM yang paling hebat sepanjang 1999.

## **Komando Darurat Militer dibubarkan: Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur**

63. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara anggota utamanya mengingatkan bahwa Indonesia memiliki waktu yang terbatas untuk membuktikan

\* Yang pernah bertugas di Timor Leste adalah Kiki Syahnakri, Amirul Isaeni, dan Gerhan Lentara, dan yang berasal dari Komando Pasukan Khusus adalah Amirul Isaeni, mungkin juga Liliek Koeshardinato dan Irwan Kusnadi.

bahwa darurat militer dapat secara efektif menciptakan ketertiban dan keamanan (Lihat Bagian 3: Sejarah konflik, dalam segmen setelah Jajak Pendapat). Ketika nyata bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan, Presiden Habibie tunduk pada tekanan tersebut dan meminta bantuan PBB. Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1264 pada 15 September 1999, dan Interfet dimobilisasi pada 20 September untuk mengembalikan perdamaian dengan wewenang penuh sebagaimana terdapat dalam Bab VII Piagam PBB. Pada 23 September 1999 atau segera sesudahnya, Presiden B.J. Habibie mengakhiri darurat militer di Timor-Leste.<sup>59</sup> Komando Operasi Darurat Militer di Timor Timur dibubarkan dan dibentuk komando keamanan baru yang diberi nama Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur. Satuan tugas ini dikepalai oleh Brigadir Jenderal Polisi J.D. Sitorus, komandan Kolonel Sahala Silalahi, dan wakil komandan Kolonel Suryo Prabowo. Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur dibentuk untuk melakukan koordinasi dengan Interfet yang akan mendarat.

## Militerisasi masyarakat Timor-Leste\*

### Pendahuluan

64. Masyarakat Timor-Leste mengalami militerisasi besar-besaran selama pendudukan Indonesia. Sifat militerisasi tersebut beragam dalam hal cakupan dan intensitasnya dalam berbagai periode selama konflik, tapi umumnya cukup merasuk selama 24 tahun pendudukan dan menyisakan dampak mendalam pada kehidupan semua orang Timor-Leste.

65. Tak lama setelah Revolusi Anyelir, 25 April 1974, militer Indonesia meningkatkan perhatian intelijennya kepada Timor-Leste, dengan tujuan mendukung partai prointegrasi Apodeti. Di pengujung 1974, militer Indonesia mulai menjalankan operasi-operasi rahasianya di wilayah tersebut (lihat Bagian 3: Sejarah konflik) dan telah mulai mempersenjatai serta memberi pelatihan militer kepada anggota partai Apodeti di Timor Barat.<sup>60</sup> Intelijen militer Indonesia merupakan arsitek utama pencaplokan Timor-Leste. Mereka melakukan kampanye diplomasi untuk mempertegas status Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan, yang pada akhirnya membuat Indonesia memutuskan menginvasi Timor-Leste pada Oktober 1975.

66. Operasi-operasi intelijen merupakan bagian besar dari operasi militer Indonesia dalam berbagai periode selama konflik. Dimulai dengan operasi-operasi rahasia pada 1974 – 1975, selama tahun-tahun awal pendudukan atas kota-kota utama, sampai kepada penyerahan diri besar-besaran dan pemukiman kembali penduduk sipil pada 1977 – 1978, peranan intelijen sangat menonjol (lihat segmen 4.2

---

\* Bagian ini membahas berbagai jenis pasukan paramiliter yang dikerahkan di Timor-Leste oleh militer Indonesia. Demi kejelasan, istilah 'pasukan pertahanan sipil' digunakan untuk menyebut Hansip, Ratih, Wanra, dan sejenisnya, semuanya adalah orang Timor-Leste yang direkrut oleh angkatan bersenjata Indonesia. Istilah 'paramiliter' digunakan untuk menyebut satuan-satuan pembantu asal Timor-Leste yang dibentuk oleh ABRI selama masa pendudukan, dan istilah 'milisi' digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok yang dibentuk dalam masa menjelang Jajak Pendapat 1999. 'Pasukan pembantu' digunakan untuk menyebut berbagai kelompok ini secara keseluruhan.

mengenai angkatan bersenjata Indonesia dan perannya di Timor-Leste, paragraf 4 – 63, di atas; juga Bagian 3: Sejarah konflik). Setelah penyerahan diri besar-besaran, Resistansi merancang ulang strateginya dengan membangun jaringan klandestin di permukiman penduduk sipil. Intelijen Indonesia menggunakan mata-mata Timor-Leste untuk mencoba menumpas jaringan tersebut. Hal ini telah berdampak mendalam terhadap rasa percaya dan kerekatan sosial komunitas Timor-Leste.

67. Indonesia menginvasi Timor-Leste dengan bantuan pihak-pihak yang mereka sebut ‘Partisan’, yakni anggota Apodeti, UDT, dan partai-partai lain yang melarikan diri ke Timor Barat mulai pertengahan 1974. Para Partisan ini memberi preseden kepada ABRI untuk menggunakan kakitangan orang Timor-Leste. Selama perang besar-besaran yang berlangsung pada dekade 1970-an, Indonesia membentuk batalion-batalion dan kelompok-kelompok paramiliter Timor-Leste, mengerahkan pasukan pertahanan sipil, dan memaksa laki-laki dewasa dan anak-anak memberi bantuan logistik bagi pasukan-pasukan tempur. Pada awal dekade 1980-an, tentara Indonesia memaksa penduduk sipil dalam jumlah sangat besar untuk berjalan melintasi seluruh pulau guna menyapu bersih pasukan perlawanan yang tersisa (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

68. Struktur negara yang dipaksakan Indonesia terhadap Timor-Leste sudah sangat termiliterisasi. Hal ini bersumber dari keterlibatan ekstensif Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam politik dan ekonomi selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto (lihat segmen 4.2 mengenai angkatan bersenjata Indonesia dan perannya di Timor-Leste, paragraf 4 – 63, di atas). Di Timor-Leste, peran ABRI sangatlah besar jika dibandingkan dengan perannya yang biasa dalam Indonesia di zaman Orde Baru. ABRI terlibat langsung dalam pembentukan Provinsi Timor Timur dan setelah itu mendominasi pemerintahannya (lihat segmen 4.4 mengenai pemerintahan sipil, paragraf 141 – 183, di bawah). Selama masa pendudukan Indonesia atas Timor-Leste, provinsi ini merupakan wilayah konflik, yang bervariasi dari perang besar-besaran di tahun-tahun awal, sampai konflik skala kecil sepanjang sebagian besar dekade 1980 dan 1990. Dibanding provinsi lain tempat ABRI juga terlibat konflik, Timor-Leste merupakan kasus ekstrem. Tidak seperti di provinsi-provinsi lain itu, Timor-Leste menjadi bagian dari Indonesia semata-mata melalui invasi, aneksasi, dan pendudukan. Dengan demikian, ia berbeda dari Indonesia pada umumnya dan ABRI harus menggunakan metode yang berbeda untuk menundukkannya.\* Selain itu, Timor-Leste juga merupakan wilayah akuisisi eksternal. Karena alasan-alasan inilah Timor-Leste pada hakikatnya berbeda dari Indonesia dan perilaku ABRI di dalam Timor-Leste dengan demikian juga tidak umum. Hal inilah yang menjadi latar belakang militerisasi mendalam di Timor-Leste oleh pemerintah Indonesia.

69. Pada dekade 1990-an, pemuda Timor-Leste menjadi semakin terbuka dalam kemauannya untuk menentang pendudukan Indonesia. Tanggapan utama terhadap hal ini adalah pergeseran dalam strategi militer, dari melancarkan perang

\* Komisi mencatat adanya kesamaan dengan daerah konflik lain di Indonesia, seperti di Papua Barat dan Aceh.

melawan Falintil menjadi perang intelijen melawan perlawanan klandestin yang semakin meningkat.

70. Gerakan kepanduan, kelompok-kelompok beladiri, dan organisasi pelajar dan mahasiswa di sekolah-sekolah dan universitas dimanfaatkan untuk menerapkan disiplin dan kesetiaan kepada Indonesia di antara pemuda Timor-Leste. Indonesia memberi penekanan khusus pada ideologi nasionalnya (Pancasila) dan pada pengamalan ritual-ritual nasional melalui seremoni bergaya militer dan acara peringatan hari besar nasional.

71. Sementara kegiatan-kegiatan ini mungkin memiliki sifat militeristik yang merasuk perlahan, pembentukan pasukan-pasukan paramiliter dari kalangan pemuda Timor-Leste pada pertengahan dekade 1990 adalah jelas-jelas brutal. Kelompok-kelompok ini, yang dilindungi oleh Kopassus, melakukan kegiatan kejahatan yang terorganisasi pada siang hari dan penghilangan para pendukung kemerdekaan di malam hari. Kelompok-kelompok pemuda ini menjadi pendahulu milisi yang dikembangkan secara kilat oleh ABRI/ TNI pada 1998 – 1999. Seperti pada 1974 – 1975, militer Indonesia kembali menggunakan kakitangan orang Timor-Leste untuk memberi semacam “penyangkalan yang dapat dipercaya” akan perannya dalam kekerasan yang terjadi. Namun, pada 1999 jelaslah bahwa milisi-milisi ini adalah kepanjangan tangan TNI.

## Militerisasi Timor-Leste pra-Indonesia

72. Timor-Leste adalah negeri bergunung-gunung yang secara historis terbagi ke dalam kerajaan-kerajaan regional. Sebagian besar raja tradisional (*liurai*) memiliki pasukan-pasukan dari lelaki setempat, yang sewaktu-waktu akan memerangi pasukan *liurai* tetangga.<sup>61</sup> Dalam berurusan dengan *liurai* Timor, Portugal menggunakan strategi adudomba, dan tak jarang menggunakan pasukan bersenjata *liurai* yang “bersahabat” untuk menumpas pembangkangan yang lain (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Pola ini, saat kekuatan luar memanfaatkan para *liurai* sebagai perantara untuk mengangkat pasukan guna membela kepentingan luar tersebut, dapat diulangi oleh Indonesia dalam kegiatan terselubungnya selama pada 1974 – 1975 dan selama tahun-tahun pendudukan sesudahnya.

73. Perang Dunia Kedua mendatangkan pertama-tama pasukan Australia dan Inggris ke Timor Portugis yang netral, dan kemudian pasukan pendudukan Jepang. Banyak rakyat Timor-Leste mengambil risiko besar untuk membantu sejumlah kecil pasukan Australia dalam kegiatan gerilyanya, sementara yang lain berpihak kepada Jepang atau terperangkap di antara dua kekuatan asing yang berseteru. Lebih daripada 40.000 warga sipil Timor dilaporkan meninggal selama masa pendudukan Jepang dan perang ini menyisakan perpecahan yang mendalam.<sup>62</sup>

74. Ketika Portugal kembali setelah Perang Dunia Kedua, ia mempertahankan kehadiran angkatan bersenjata profesional yang terdiri atas serdadu Portugis dan anggota-anggota yang direkrut dari negeri jajahan Portugal di Afrika. Polisi secara teknis merupakan bagian dari angkatan bersenjata ini. Anggota asal Timor-Leste

juga direkrut ke dalam angkatan bersenjata ini, walau hanya sedikit yang memegang posisi di atas pangkat rendah. Tidak banyak terjadi perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Portugal selama tahun-tahun ini, yang didominasi oleh rezim otoriter Salazar. Polisi rahasia Portugal, PIDE, memantau segala pertanda pembangkangan di kalangan rakyat Timor-Leste, dan memiliki reputasi yang menakutkan.<sup>63</sup> Hal ini mengekang kebebasan berpendapat dan kemampuan membentuk asosiasi atau membuka perdebatan politik. Dibandingkan dengan pengalaman kemudian di bawah Indonesia, dampak angkatan bersenjata Portugal terhadap masyarakat tidak terlalu besar.

75. Ketika Gerakan Angkatan Bersenjata (MFA) mengambilalih kekuasaan di Lisabon pada 25 April 1974, partai-partai politik di Timor-Leste dengan cepat terbentuk (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Komisi mendapat kesaksian dari para pemimpin dua partai besar, Fretilin dan UDT, bahwa mereka menggunakan kekuatan dan kekerasan dalam kampanye mereka dan dalam upaya meningkatkan pengaruh di masyarakat.<sup>64</sup> Ketika UDT mencoba merebut kekuasaan pada 11 Agustus 1975, mereka melakukannya dengan senjata dari pasukan kepolisian. Ketika Fretilin merespons, faktor penentu kemenangannya adalah dukungan dari para anggota Timor-Leste dalam angkatan bersenjata Portugal dan persenjataan mereka. Baik UDT maupun Fretilin membagi-bagikan senjatanya kepada anggota sipil mereka secara serampangan, sehingga meningkatkan kekerasan selama konflik internal.<sup>65</sup> Walaupun konflik internal tersebut berlangsung relatif singkat, ia memperparah perpecahan yang ada dan menciptakan perpecahan baru yang menorehkan luka pada masyarakat Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh militer Indonesia dalam upayanya menumpas Resistansi, termasuk melalui strateginya memiliterkan masyarakat Timor-Leste.

## **Militerisasi partai politik Timor-Leste oleh Indonesia sebelum pendudukan**

76. Komisi mendengar kesaksian dari Tomas Gonçalves, anak pemimpin Apodeti yang juga *liurai* Atsabe (Ermera), Guilherme Gonçalves, tentang bagaimana militer Indonesia menggunakan strategi mempersenjatai dan melatih pemuda-pemuda anggota partai mulai akhir 1974.<sup>66</sup> ABRI menamakan kelompok ini Partisan. Pada Oktober 1974, Tomas Gonçalves berkunjung ke Jakarta dan bertemu perwira-perwira senior militer Indonesia. Ini terjadi tak lama setelah Menteri Luar Negeri Adam Malik bertemu dengan Penanggungjawab Urusan Luar Negeri Fretilin, José Ramos-Horta, dan meyakinkannya bahwa Indonesia akan menghormati hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. ABRI mulai membangun strateginya mempersiapkan pasukan pembantu bersenjata asal Timor-Leste ketika Portugal berupaya menjalankan proses dekolonisasi yang teratur.

77. Ketika Tomas Gonçalves kembali pada November 1974, 216 pemuda dari daerah Atsabe dimobilisasi dan dikirim ke Timor Barat, tempat mereka mendapatkan pelatihan militer dasar dan persenjataan dari para agen rahasia ABRI termasuk anggota Kopassandha.<sup>67</sup> Setidaknya sebagian dari para pemuda ini dipaksa ikut

serta oleh para pemimpin Apodeti.<sup>68</sup> Tomas Gonçalves menyatakan kepada Unit Kejahatan Berat dukungan PBB di Timor-Leste bagaimana pemuda-pemuda tersebut dimobilisasi:

*Saya ditunjuk menjadi panglima Partisan pada 2 Desember 1974. Jadi, ada panglima tertinggi, saya sendiri, kemudian ada dua komandan kompi, delapan komandan peleton, dan 16 komandan regu. Semuanya ada 216 petempur. Saya berada di bawah komando Yunus [Yosfiah, dari Tim Susi, komando Kopassandha yang merupakan bagian dari Operasi Flamboyan].<sup>69</sup>*

78. Sekitar 50 anggota Partisan disertakan dalam setiap tim Pasukan Khusus—Susi, Umi, dan Tuti—dan dikerahkan di daerah asal mereka masing-masing.<sup>70</sup> Setelah Gerakan Bersenjata 11 Agustus 1975 oleh UDT untuk merebut kekuasaan, ABRI bersama anggota-anggota pasukan Partisan ini memulai serangan lintas-batas dari Timor Barat. Ketiga tim ini melakukan penyerbuan lintas-batas lanjutan pada pertengahan September, sekali lagi tanpa banyak membuahkan hasil.<sup>71</sup> Dalam penyerbuan, dilakukan perekrutan paksa pemuda Timor-Leste untuk berperang bersama Partisan,<sup>72</sup> dan terjadi sejumlah pembunuhan.<sup>73</sup>

79. Setelah kekalahan dalam Perang Saudara, pasukan bersenjata UDT dan pendukungnya menarik diri ke perbatasan dan di akhir September masuk ke Timor Barat. Menurut pemimpin militer UDT, João Carrascalão, terdapat sekitar 3.000 pasukan UDT yang melintas batas, lebih daripada 500 di antaranya menenteng senjata.<sup>74</sup> Mereka terserap ke dalam pasukan Partisan. Serangan-serangan lintas-batas ABRI selanjutnya, pada pertengahan Oktober, melibatkan jumlah Partisan yang lebih besar dan mendapat dukungan lebih baik dari artileri angkatan laut, sehingga dapat merebut Batugade dan Balibó (Bobonaro), dan kota-kota perbatasan lainnya.<sup>75</sup> Menurut Tomas Gonçalves, penyerangan tersebut melibatkan 216 Partisan Apodeti, 450 anggota pasukan Indonesia, dan 350 orang di bawah kendali João Tavares.<sup>76</sup> Kelompok terakhir ini dikenal dengan nama Halilintar. Halilintar muncul kembali pada 1994 dengan misi menumpas gerakan klandestin yang semakin berkembang di Distrik Bobonaro, dan selanjutnya menjadi salah satu kelompok milisi terdepan sepanjang 1998 – 1999. Selain menyediakan pengetahuan lokal yang berharga mengenai Timor Portugis kepada satuan-satuan komandonya, Partisan menjadi bagian penting dalam strategi “penyangkalan yang dapat dipercaya” dari Operasi Flamboyan. ABRI mengembangkan mitos bahwa tentara Indonesia yang terlibat dalam operasi-operasi ini hanyalah “sukarelawan” yang membantu orang Timor-Leste kembali dan menguasai keadaan tanahnya.<sup>77</sup> Tapi, Tomas Gonçalves menceritakan kepada Komisi bahwa perencanaan dan kendali operasi dipegang oleh anggota militer Indonesia, dan Partisan Timor-Leste digunakan sebagai pasukan pendukung, pemandu, dan sebagai sumber informasi intelijen.<sup>78</sup>

80. Tampaknya, beberapa Partisan terpilih ikut ambil bagian dalam invasi Dili,<sup>79</sup> dan yang lainnya terlibat dalam pendaratan di Baucau selang tiga hari kemudian. Setelah invasi, para Partisan ikut-serta dalam serangan-serangan di pedalaman.

Walaupun ABRI umumnya merombak ulang penggunaan pasukan pembantu asal Timor-Leste mereka, beberapa satuan Partisan terus dipertahankan selama masa pendudukan, contohnya sebuah kelompok di Ermera yang pada 1999 berjumlah sekitar 130 orang.<sup>80</sup>

## Pembentukan batalion tempur ABRI beranggotakan orang Timor-Leste

81. Pada 1976, ABRI mulai memberi pelatihan militer formal kepada orang Timor-Leste, ketika 60 orang Partisan dikirim ke Jawa. Pada Juni 1977, menyusul 400 orang Timor-Leste tambahan, yang sebagian sebelumnya berdinan sebagai Partisan. Pada 1 Oktober 1977, orang-orang ini lulus dengan pangkat prajurit, dan pada 24 Januari 1978, komandan militer Timor Timur, Kolonel Dading Kalbuadi, secara resmi mendirikan Batalion Infanteri 744/Satya Yudha Bhakti. Batalion baru beranggotakan 460 orang ini dibagi menjadi empat kompi, dengan komando keseluruhan dipegang oleh Mayor Yunus Yosfiah.<sup>81</sup> Di awal 1977, pasukan ini diberi pelatihan 'Raiders' di Tasitolu, sebelah barat pelabuhan udara Dili, dan kemudian dinyatakan siap tempur. Kelompok kedua beranggotakan lebih daripada 500 orang Timor-Leste yang direkrut dan dilatih pada 1978. Mereka menjadi Batalion 745/Sampada Yudha Bhakti, yang diresmikan pada September 1978 di bawah komando Mayor Theo Syafei. Rencana untuk batalion ketiga, Batalion 746, dibatalkan setelah orang-orang yang baru direkrut dianggap tidak layak.<sup>82</sup>

82. Batalion-batalion tersebut dimaksudkan untuk sepenuhnya beranggotakan orang Timor-Leste. Namun, rencana ini tidak pernah terwujud. Di antara anggota asal Timor-Leste, terdapat anggota pasukan infanteri Indonesia dan pasukan khusus, dan para perwiranya adalah orang Indonesia sampai ke tingkat peleton.<sup>83</sup> Kedua batalion menjadi bagian permanen dari struktur Korem di Timor-Leste selama masa pendudukan dan sering digunakan dalam operasi tempur serta tugas-tugas keamanan internal. Mereka mengembangkan reputasi kebrutalan mereka. Tomas Gonçalves, seorang mantan Partisan, menggambarkan Batalion 744 di masa-masa awalnya:

*Partisan baru jadi jahat setelah [Batalion] 744 dibentuk oleh Yunus [Yosfiah], dan mereka jadi anggota 744. 744 terdiri dari orang Jawa, Komando, dan macam-macam. Selama Yunus menjadi komandan 744, selalu terjadi pembunuhan di luar hukum, pembantaian...<sup>84</sup>*

83. ABRI juga merekrut orang Timor ke dalam struktur teritorial reguler Korem/Kodim/Koramil. Beberapa orang Timor sebelumnya pernah berdinan dengan tentara kolonial Portugis, sementara yang lain adalah mantan Hansip yang direkrut ABRI melalui program Milsas (lihat segmen tentang 'Anggota Militer Triwulan', Milsas, paragraf 100 – 102 di bawah ini). Sampai Juli 1998, terdapat 6.097 orang Timor-Leste yang berdinan untuk ABRI, dan dari jumlah tersebut 5.510 berdinan pada TNI dan 569 di kepolisian. Kemungkinan orang Timor menjadi perwira atau bintara jauh lebih kecil daripada orang Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada

Juli 1998 hanya 0,4% dari orang Timor-Leste yang berdinasi di ABRI adalah perwira dan kurang daripada 24% adalah bintara, sementara 76% adalah prajurit. Sementara itu, proporsi untuk 17.834 anggota ABRI asal Indonesia di Timor-Leste ketika itu sangat berbeda: 5,6% perwira, 34,1% bintara, dan hanya 60,4% yang prajurit.<sup>85</sup>

## Berbagai kelompok paramiliter awal, 1976 – 1981

84. Sejak awal, angkatan bersenjata Indonesia bertujuan membawa orang Timor ke dalam konflik di Timor-Leste. Mereka mengangkat orang Timor-Leste sebagai anggota angkatan bersenjata dan menggunakan kelompok paramiliter Timor-Leste untuk melaksanakan operasi rahasia. Selama akhir dekade 1970, militer Indonesia mengerahkan orang Timor-Leste secara khusus untuk berperang melawan Fretilin/Falintil. Kelompok-kelompok paramiliter memiliki peran yang berbeda dengan Partisan, yang diperlakukan lebih sebagai pengangkut barang atau personel pendukung tempur ketimbang sebagai pasukan garis depan. Mereka juga berbeda dengan pasukan pertahanan sipil, yang umumnya tidak memainkan peran tempur di garis depan. Kelompok-kelompok paramiliter yang dibentuk akhir dekade 1970 dan pada dekade 1980 umumnya berkaitan erat dengan Kopassandha.

85. Salah satu pasukan paramiliter yang paling awal dibentuk pada September 1976, ketika Mayor Jenderal Benny Moerdani secara pribadi memberi izin kepada kapten Kopassandha, A.M. Hendropriyono, untuk membentuk Peleton Khusus (Tonsus) beranggotakan orang Timor-Leste di Manatuto. Satuan tersebut direkrut dari anggota inti Apodeti di Laclubar (Manatuto), dan dipimpin oleh mantan anggota Falintil João Branco.\* Kelompok ini dengan cepat tumbuh melampaui ukuran unit peleton. Tonsus dipersenjatai dengan baik dan menggunakan orang Timor-Leste dalam operasi tempur khusus di sektor tengah.<sup>86</sup> Tonsus menjadi prakarsa sukses yang memperlakukan orang Timor-Leste secara setara ketimbang sebagai bawahan. Walaupun berhasil, satuan tersebut berakhir pada 1978, dan ABRI kembali ke kebiasaan lamanya memperlakukan orang Timor-Leste sebagai pembantu logistik ketimbang sebagai petempur garis depan.<sup>87</sup>

86. ABRI juga merekrut orang Timor-Leste masuk ke sejumlah kelompok lain selama akhir dekade 1970. Salah satu kelompok yang disebut Tim Nuklir beroperasi di Moro (Lautém), di bawah komando Camat Edmundo da Conceição da Silva.<sup>88</sup> Para anggota mantan Partisan yang dikenal sebagai sukarelawan militer atau 'Skadam' (Sukarelawan Kodam) terlibat dalam gempuran terhadap Gunung Kablaki pada Juni 1977. Julukan mereka, 'Skadam', tampaknya menunjukkan bahwa mereka resmi diikutsertakan dalam struktur ABRI.<sup>89</sup>

\* Tomas Gonçalves (diwawancarai oleh SCU 8 Agustus 2000) menggambarkan bagaimana orang-orang João Branco telah dilatih di Dili. (Profil Komunitas CAVR di Pairara, Moro [Lautém], 28 Maret 2003.)



## Paramiliter dekade 1980-an

87. Pada 1979, ABRI membentuk Tim Morok (yang berarti 'ganas') di bawah komando Filomeno Lopes, di Manatuto.<sup>90</sup> Tim Morok, yang terdiri atas para mantan anggota Apodeti dan UDT, beroperasi di Manatuto selama dekade 1980-an. Tim kedua, yang disebut Tim Asahan, dibentuk pada 1980 oleh seksi intelijen Kodim Manatuto, yang menempatkannya di bawah kepemimpinan Domingos da Silva ('Apai') dan Antonio Doutel Sarmento, tetapi berjalan hanya satu tahun.<sup>91</sup> Pada 1981, pada masa Operasi Keamanan, tim ketiga yang disebut Alap-Alap dibentuk dan digunakan terutama untuk memberi dukungan pada pasukan tempur.<sup>92</sup>

88. Pada dekade 1980, ABRI mendirikan beberapa kelompok paramiliter yang lebih terlatih baik. Salah satu yang pertama adalah Tim Railakan (yang berarti 'petir') yang dibentuk sekitar 1980 atau 1981, di bawah komando prajurit ABRI, Julião Fraga, orang Timor-Leste dari Baguia (Baucau), dan beroperasi di Baucau.<sup>93</sup> Tim Railakan terlibat dalam beberapa tugas, seperti penangkapan, interogasi, dan penyiksaan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin, dan juga ambil bagian dalam operasi menumpas Falintil. Sekitar 1985, kelompok ini diubah namanya menjadi Tim Saka (Satuan Khusus Pusaka). Julião Fraga terus menjadi komandan kelompok yang diubah namanya ini sampai ia terbunuh di Baucau pada 1995. Railakan/Saka kadang terlihat bekerja langsung dengan Kopassus,<sup>94</sup> dan sering berlaku sebagai perantara bagi Koramil dalam melakukan penangkapan.<sup>95</sup> Seputar waktu Railakan diubah namanya menjadi Tim Saka pada 1985, kelompok paramiliter bernama Tim Sera dibentuk di Baucau. Tim Sera beroperasi di bawah komando mantan pemimpin Falintil bernama Sera Malik, terutama di daerah Baucau-Vemasse-Venilale. Pasukan paramiliter lainnya dari masa ini adalah Tim Alfa, dibentuk oleh kapten Kopassus, Luhut Panjaitan, di Lautém, mungkin pada sekitar 1986.<sup>96</sup>

89. Kelompok-kelompok paramiliter memiliki beberapa kegunaan, seperti ikut-serta dalam penyerangan dan operasi-operasi. Seorang informan CAVR menceritakan bahwa:

*Mayor Sinaga membentuk Tim Lorico di Desa Oestico Loilubo [Vemasse, Baucau] dari para mantan Falintil. Ia menggunakan mereka untuk operasi di hutan, dan setelah mereka menemukan lokasi Falintil, pasukan ABRI akan masuk dan menembak...Setelah Sinaga pergi dari Timor-Leste, anggota Tim Lorico menghilang satu per satu.<sup>97</sup>*

90. Kelompok-kelompok paramiliter juga memiliki fungsi yang menunjukkan kedekatannya dengan Kopassus, seperti dalam operasi-operasi rahasia dan sering berlaku sebagai agen-agen intelijen. Tim-tim ini membentuk tradisi kedekatan hubungan antara ABRI, khususnya Kopassus, dengan unit-unit paramiliter Timor-Leste. Pada tingkat pribadi, hubungan tersebut sering terus berlanjut selama tahun-tahun konflik.<sup>98</sup>

## Pasukan Pertahanan Sipil

91. Salah satu prinsip dasar ideologi militer Indonesia adalah pengertian Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), di mana seluruh penduduk sipil harus memainkan peran dalam pertahanan nasional.\* Menurut pengertian ini, warga sipil Indonesia dapat dipilih untuk menjalani pelatihan militer dasar, hingga kemudian dikenal sebagai Rakyat Terlatih (Ratih). Seleksi lebih lanjut terhadap barisan Ratih ini dapat menghasilkan (a) Pertahanan Sipil (Hansip), yang bertanggung jawab melindungi penduduk sipil pada saat bencana alam atau perang; (b) Keamanan Rakyat (Kamra), yang bertanggung jawab membantu polisi; dan (c) Perlawanan Rakyat (Wanra), yang harus membantu angkatan bersenjata.† Meskipun secara teoretis seluruh golongan ini berada di bawah administrasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri), di Timor-Leste kelompok-kelompok ini beroperasi langsung di bawah komando dan pengaruh militer Indonesia.<sup>99</sup>

92. Penggunaan penduduk sipil Timor-Leste yang direkrut ke dalam pasukan pertahanan sipil di Timor-Leste selama masa konflik adalah contoh bagaimana ABRI menyesuaikan strategi standarnya dengan kondisi wilayah ini. Di Timor-Leste, ABRI menggunakan pasukan pertahanan sipil dalam peran keamanan teritorial yang biasa, tapi juga dalam peran tempur serta pengintai dan intelijen. Di Indonesia, Departemen Dalam Negeri adalah lembaga yang mengatur pasukan pertahanan sipil, tapi di tahun-tahun awal konflik di Timor-Leste, pasukan Hansip ini beroperasi langsung di bawah komando dan kendali militer Indonesia dan baru di dekade 1980-an tanggung jawab tersebut beralih ke Departemen Dalam Negeri.<sup>100</sup>

93. Penggunaan luas pasukan pertahanan sipil warga Timor-Leste berdampak dramatis terhadap kehidupan orang Timor-Leste dengan membawa konflik dan militer ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berbasis di komunitas-komunitas, anggota pasukan pertahanan sipil digunakan sebagai penghubung antara penduduk sipil dan militer. Pengumpulan informasi intelijen adalah kegiatan yang terjadi di mana-mana, dan anggota pasukan pertahanan sipil sering terlibat dalam pelanggaran langsung terhadap penduduk sipil, baik yang dilakukan bersama anggota ABRI maupun sendiri-sendiri. Karena dilindungi oleh ABRI, mereka relatif menikmati impunitas atas tindakannya. Komisi menerima banyak pernyataan dan kesaksian mengenai kekerasan yang dilakukan anggota komunitas yang telah menjadi anggota pasukan keamanan sipil di bawah ABRI (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan; dan Bab 7.7: Pemerksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual).

\* Prinsip ini diperoleh dari strategi gerilya yang digunakan di dalam revolusi Indonesia.

† Tinjauan umum sistem ini dapat dibaca dalam dokumen rahasia Korem 164 Wira Dharma, Seksi Intel, "Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih," ditandatangani oleh Mayor Willem da Costa, tertanggal 10 September, 1982, hal. 2; dan Robert Lowry, *The Armed Forces of Indonesia* (St. Leonards, NSW: Allen and Unwin, 1996), hal. 111.

94. Satuan-satuan Hansip Timor-Leste pertama dibentuk pada paruh kedua 1976, tidak lama setelah pernyataan integrasi Indonesia pada Juli 1976.<sup>101</sup> Sampai pertengahan 1976, terdapat 5.897 anggota Hansip di Timor-Leste; jumlahnya bervariasi di seluruh wilayah, dengan jumlah terbesar di Baucau (700) dan Ainaro (665), dan terkecil di Lautém (187).<sup>102</sup> Anggota Hansip sering digunakan sebagai personel dukungan tempur, peran yang biasanya diisi oleh Wanra di tempat-tempat lain di Indonesia. Di Indonesia, Hansip adalah lembaga mantap yang anggotanya menerima gaji sehingga cenderung bertugas lama, sedangkan anggota Wanra tidak selalu digaji. Namun, perbedaan Hansip dan Wanra di Timor-Leste tidak selalu jelas. Hal ini mungkin saja karena pihak militer sering menggunakan Hansip dalam kapasitas sebagai Wanra, atau mungkin karena suatu waktu antara 1978 dan 1980 Hansip diklasifikasi ulang sebagai Wanra. Keduanya memainkan peran yang pada hakikatnya sama. Sampai 1980, jumlah orang yang ketika itu resmi disebut Wanra mencapai 6.500, tetapi dua tahun kemudian, jumlah tersebut menurun jadi 4.800.<sup>103</sup>

95. Pasukan Rakyat Terlatih (Ratih) pertama kali dibentuk di Timor-Leste pada 1981, untuk membantu Operasi Keamanan. Pada tahun berikutnya, terdapat 6.000 orang Ratih.<sup>104</sup> Ekspansi yang demikian pesat ini bersamaan waktunya dengan adanya rencana untuk mengalihutugaskan Hansip/Wanra menjadi Ratih, terutama untuk menghemat biaya. Pasukan Keamanan Rakyat (Kamra) dibentuk oleh polisi Indonesia pada awal 1981, dan jumlahnya mencapai 1.690 pada 1982.<sup>105</sup> Secara keseluruhan, sampai 1982 terdapat hampir 12.500 orang Timor-Leste yang terlibat dalam berbagai organisasi pertahanan sipil. Walaupun sulit membuat pernyataan yang pasti tanpa mengetahui jumlah penduduk di Timor-Leste pada 1982, angka ini adalah kurang-lebih 2,25% dari keseluruhan jumlah penduduk.\* Secara nasional angka ini adalah sekitar 2%.<sup>†</sup>

96. Selama 1981 – 1982 komando militer di Timor-Leste menurunkan status banyak Hansip menjadi Ratih. Pada waktu itu, ABRI menyatakan tujuannya untuk:

[M]embentuk kesadaran di antara rakyat Timor mengenai perlunya membela negara, menuju pembentukan kesadaran oleh setiap warga bahwa ia memiliki hak dan kewajiban untuk ambil bagian tanpa ragu-ragu dalam bela negara.<sup>106</sup>

97. ABRI mengalami kesulitan dalam mengendalikan pasukan pertahanan sipilnya. Pada 1983, sebagian karena diperlakukan tidak baik, dan mungkin sebagai respons atas hilangnya pekerjaan mereka akibat rencana pengurangan anggota pada 1982,<sup>107</sup> banyak anggota Hansip yang membelot ke Falintil.<sup>108</sup>

98. Satuan-satuan pertahanan sipil berfungsi dalam suatu struktur militer teritorial yang sudah demikian luas, yang di tingkat desa mencakup Babinsa (Bintara Polisi

\* Penghitungan ini didasarkan pada aras perkiraan Biro Pusat Statistik Indonesia bahwa pada 1982 penduduk Timor-Leste berjumlah 555.350.

† Berdasarkan angka 4 juta anggota pasukan pertahanan sipil dalam populasi 200 juta pada 1992. Lihat Lowry, *The Armed Forces of Indonesia*, hal. 112.

Daerah), Binpolda, dan terkadang sebuah peleton dari Batalion 744 atau 745. ABRI melakukan upaya besar untuk merekrut satuan-satuan pertahanan sipil. Beberapa anggota bergabung dengan sukarela; yang lain di bawah paksaan.<sup>109</sup> Anggota-anggota satuan pertahanan sipil secara umum menjalani masa pelatihan yang singkat dari komando teritorial setempat (Kodim atau Koramil), dan setelah dilatih mereka akan menjalani peran bantuan tempur bagi ABRI dan pasukan paramiliternya:

Tugas dan fungsi milisi adalah untuk berpatroli, dan menutup jalan-jalan setapak yang digunakan oleh musuh ketika berpindah (hal ini dapat dilaksanakan sendiri atau bersama dengan Pasukan Marinir 5). Sementara fungsi dan tugas Hansip adalah untuk menjaga pos-pos TNI tertentu (di malam hari), dan untuk berlaku sebagai penunjuk jalan pada saat patroli, atau untuk melakukan kegiatan bantuan tempur bagi milisi.<sup>110</sup>

99. Dalam sebagian besar kasus, satuan-satuan pertahanan sipil bertindak atas perintah komando militer Indonesia setempat.<sup>111</sup> Komisi menemukan bahwa pasukan pertahanan sipil disinyalir terlibat dalam banyak pelanggaran selama operasi-operasi militer.\*

### **‘Anggota militer triwulan’, Milsas, 1989 – 1992**

100. Tampaknya setelah mengambilalih kendali Hansip dari ABRI pada awal dekade 1980, pada 1989 Departemen Dalam Negeri tidak ingin memberi dukungan sumber anggaran secukupnya untuk mempertahankan Hansip dan kelompok cadangan yang dikenal sebagai Perlindungan Masyarakat (Linmas), yang dilatih untuk penanggulangan bencana dan situasi darurat. Ketika itu, secara nasional ABRI tengah kesulitan untuk memenuhi rencana kuotanya untuk menjadikan 3,5% dari seluruh penduduk nasional sebagai anggota pertahanan sipil.<sup>112</sup> Karena keanggotaan satuan-satuan pertahanan sipil di Timor-Leste melampaui rata-rata nasional, penghematan dana barangkali adalah alasan yang kuat untuk pengurangan ini.<sup>113</sup> Akibatnya, Departemen Dalam Negeri memutuskan untuk mengalihkan banyak anggota Hansip ke dalam militer. Program ini disebut ‘Milsas’, singkatan dari militerisasi, atau dikenal juga sebagai ‘anggota militer triwulan’. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia mencatat bahwa:

Milsas—yang oleh pejabat militer senior di Jakarta sering disebut sebagai anak-anak daerah TNI—hanya berfungsi di Timor Timur untuk membantu operasi TNI di Timor Timur.<sup>114</sup>

\* HRVD (basis data pelanggaran hak asasi manusia) milik CAVR mencantumkan 784 tindakan yang dilakukan oleh Hansip pada masa 1975 – 1979. Lihat khususnya Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual dan 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan .

101. Pada 1989, ABRI memilih sekitar 1.000 mantan Hansip untuk dikirim ke Malang (Jawa Timur) dan Bali untuk mengikuti program pelatihan tiga bulan. Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, para mantan Hansip akan menjadi anggota ABRI dan kembali ke Timor-Leste dan sebagian besar ditempatkan di Kodim. Pada 1992, kelompok kedua seribu orang mantan anggota Hansip dipilih dan dikirim ke Jawa dan Bali untuk menjalani pelatihan. José Sales dos Santos menjelaskan:

*Saya dimiliterisasi pada gelombang kedua, bersama 1.000 Hansip dari seluruh distrik. [Sebanyak] 700 [orang] dikirim latihan ke Malang dan 300 dikirim ke Bali. Setelah tiga bulan, semuanya kembali bertugas di Kodim masing-masing.<sup>115</sup>*

102. Antara 1989 dan Agustus 1991, program ‘milsas’ ini menghasilkan pengurangan sebesar 50% atas keseluruhan jumlah Hansip (mencakup Kamra dan Wanra), dari 4.996 menjadi 2.023.<sup>116</sup>

## Tenaga Bantuan Operasi (TBO)

103. ABRI memaksa banyak warga sipil Timor-Leste untuk bekerja sebagai kuli angkut, pemandu jalan, tukang masak, dan bahkan pembantu pribadi tentara, khususnya selama masa operasi intensif dekade 1970-an dan awal dekade 1980-an. Sebuah dokumen militer dari 1982 menyatakan bahwa 60.000 warga Timor-Leste terlibat sebagai personel pendukung.<sup>117</sup> Mereka ditempatkan sebagai tenaga bantuan operasi (TBO). Banyak orang direkrut sebagai TBO selama operasi 1981 yang dikenal dengan nama ‘pagar betis’ (Operasi Kikis) (Lihat Bagian 3: Sejarah konflik, dan Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan). Satu sumber menggambarkan pemaksaan yang digunakan dalam perekrutan:

*Pada 1979, Francisco Amaral didatangi oleh tiga orang Hansip dan dibawa ke Uatolari ... ia diinterogasi oleh [pegawai] kecamatan dan Batalion 202 mengenai di mana perlengkapan [Fretilin] disembunyikan, yang ia tidak tahu ... ia dipukuli sampai ia kencing dan berak dan darah keluar dari mulut dan hidungnya. Setelah itu sebuah Kompi Marinir mengambilnya sebagai TBO.<sup>118</sup>*

104. Banyak orang muda diambil sebagai TBO. Mereka diperbantukan pada suatu satuan untuk jangka waktu yang berbeda-beda, terkadang sepanjang operasi berlangsung, walau kadang juga jauh lebih lama. Administrator Apostolik Katolik Dom Martinho da Costa Lopes mencatat bahwa pada waktu itu perekrutan paksa ini menyisakan dampak yang amat buruk bagi warga desa biasa yang diambil dari ladang dan kebunnya pada masa tanam. Sebuah laporan polisi pada 1978 memberi penilaian yang cukup terbuka mengenai konsekuensi sosial perekrutan paksa:

Selama Operasi Gempur di sektor tengah baru-baru ini, orang-orang dipaksa menjadi TBO. Pelaksanaan hal ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya di Dili, yang menjadi sepi di

malam hari [karena] para orang tua takut kalau anak-anaknya akan diambil oleh ABRI. Kegiatan pendidikan dan Pramuka di sekolah-sekolah sementara ini agak terganggu.<sup>119</sup>

105. Bab 7.8 mengenai hak anak memerinci pengalaman anak-anak dan pemuda Timor-Leste yang diambil sebagai TBO oleh militer Indonesia. Banyak dari mereka yang terekspos pada kondisi pertempuran dan dipaksa berjalan kaki sambil membawa peralatan militer yang berat, dan diharuskan tinggal dalam kamp-kamp militer bersama tentara dewasa. Alfredo Alves mengenang pengalamannya ketika ia diambil dari ibunya menjadi TBO pada usia 11 tahun, serta intimidasi dan kekerasan yang dilakukan tentara Indonesia terhadap rekan-rekannya anak-anak Timor-Leste:

*Satu hari seorang TBO yang sedang membawa beban berat, menolak membawa lebih banyak lagi beban. Tentara itu jadi marah. Ketika kembali ke kamp, semua tentara di peleton dan TBO dikumpulkan. Komandan berkata bahwa seorang TBO tidak boleh menolak membawa barang. Dia bilang tentara datang untuk membantu dan membawa kemerdekaan. Setelah itu TBO yang tadinya menolak membawa barang tersebut dipanggil dan ditembak di depan semua orang. Mereka bilang bahwa kalau kami menolak untuk patuh, nasib kami akan sama seperti dia.*<sup>120</sup>

## ‘Intel’—Mata-mata orang Timor-Leste

106. Selama masa konflik, satuan intelijen menggunakan mata-mata dan informan orang Timor-Leste untuk mengumpulkan informasi. Penggunaan orang Timor-Leste oleh ABRI dalam kapasitas intelijen sudah terjadi sejak sebelum invasi Timor-Leste, ketika ABRI mengandalkan pasukan Partisan untuk menyediakan informasi intelijen setempat dan sebagai pemandu dalam penyusupan awal ke wilayah Timor-Leste. Menurut Tomas Gonçalves, para Partisan diminta memberikan informasi geografis dan politik tentang Timor Portugis:

*Di situ, mereka [orang Indonesia] tidak berbicara dengan kami. Mereka sebut kami ‘Partisan’, dan Partisan tidak bicara dengan mereka... Mereka panggil saya dan bertanya, “Kurang lebih ada berapa banyak senjata yang mereka miliki di Timor? Ada berapa kompi? Di situ apakah banyak orang tahu cara pakai senjata? Mereka tahu bagaimana menjadi pejuang gerilya?”<sup>121</sup>*

107. Belakangan, ketika penduduk sipil menyerah secara besar-besaran dan ditahan oleh ABRI di kamp-kamp penahanan dan desa-desa pemukiman ulang, prioritas ABRI adalah untuk menjaga agar mereka tidak berhubungan dengan Falintil yang masih ada, sehingga ABRI memerlukan sumber-sumber intelijen untuk mengetahui siapa saja yang dekat dengan pasukan gerilya. Pada akhir 1981 dan Januari

1982, Komandan Korem 164 Kolonel Adolf Sahala Radjagukguk mengeluarkan serangkaian perintah mengenai operasi teritorial dan intelijen, peran Babinsa dan keamanan kota, termasuk wilayah pemukiman ulang.<sup>122</sup> Perintah-perintah ini menunjukkan bahwa militer menyadari masih adanya perlawanan yang kuat di antara penduduk sipil, dan perlunya mengupayakan pemutusan hubungan dan dukungan kepada Resistansi bersenjata. Untuk mencapai hal ini, berbagai dokumen menetapkan serangkaian tujuan, seperti membangun masyarakat tempat pasukan keamanan akan “bersarang” secara mendalam di tiap-tiap komunitas, memantau dan mengandalkan para informan orang Timor-Leste untuk menciptakan operasi intelijen kuat yang mampu mengendalikan penduduk sipil dan membatasi kontak dengan Falintil. Contohnya sebuah organisasi yang dibentuk di Quelicai:

*Pada waktu itu [1981] terdapat organisasi yang disebut ‘Siliman’ [Siguranca Sipil Masyarakat], yang dibentuk oleh TNI-Koramil, dengan tujuan untuk memata-matai. Anggotanya adalah warga Quelicai. Di antara mereka ada [nama-nama disebut]... Organisasi itu sering memantau gerakan deponen dan jika mereka ketahuan akan dilaporkan kepada Koramil.<sup>123</sup>*

108. Pada awal dekade 1980-an, setelah penyerahan diri besar-besaran pada 1978 – 1979, sejumlah besar penduduk Timor-Leste ditempatkan di dalam kamp-kamp pemukiman ulang. Secara struktur, ABRI merancang agar pos-pos pertahanan sipil (Hansip/Wanra) ditempatkan di kota-kota sekitar. Pasukan pertahanan sipil (Hansip/Wanra) diharapkan dapat mengisi peran perantara antara rakyat dengan militer, yang biasanya diwakili oleh seorang Babinsa atau Tim Pembina Desa.<sup>124</sup> Tugas mereka antara lain menjalankan tugas yang diberi oleh militer, serta memantau sesama warga. Untuk mendukung, Ratih akan melakukan pengamanan internal:

Penduduk sipil laki-laki yang dipersenjatai dengan tombak dan parang, dalam keadaan bahaya, akan dikumpulkan di satu tempat di desa mereka (di dalam kota).<sup>124</sup>

109. Hal ini terjadi pada satu masa ketika ABRI bermaksud menggunakan semakin banyak orang Timor-Leste sebagai pasukan pembantu keamanan/pertahanan, untuk mendekatkan Timor-Leste dengan doktrin ABRI ‘Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta’ (Hankamrata). Sebuah dokumen militer dari Februari 1982 membahas gagasan ini:

Dengan menguatnya keamanan, SATPUR (satuan tempur) akan dikurangi besarnya sementara peran pertahanan sipil (HANSIP-WANKAMRA) akan ditingkatkan dan akan memainkan peran terpenting dalam membela dan mengamankan wilayah mereka dari sisa-sisa GPK dan ekstremis.<sup>125</sup>

.....  
\* Kehadiran pos Babinsa di setiap desa di Timor-Leste jumlahnya jauh melebihi yang normal di Indonesia, dan mencerminkan tujuan ABRI untuk mengontrol ketat penduduk Timor-Leste.

110. Warga Timor-Leste direkrut untuk bekerja sebagai informan dengan berbagai cara. Beberapa orang sukarela membantu satuan-satuan intelijen, yang lainnya disuap, dan yang lainnya lagi dipaksa atau diancam. Militer sering berupaya “membelotkan” anggota klandestin dan mantan gerilyawan Falintil untuk bekerja bagi Satgas Intel.

111. Menjelang akhir dekade 1980-an, ketika Resistansi membangun gerakan klandestin di kota-kota, ABRI membutuhkan kemampuan intelijen lokal yang kuat agar dapat mengendalikan jaringan klandestin yang sedang bertumbuh ini. Mulai saat itu, strategi ABRI bergeser dari fokus terhadap perlawanan gerilya kepada upaya untuk membongkar Resistansi klandestin. Setiap unit teritorial (seperti Korem, Kodim, Koramil) memiliki personel intelijen dan masing-masing merekrut jaringan informannya sendiri. Unit intelijen yang memiliki reputasi paling menakutkan adalah Satuan Tugas Intelijen (SGI).<sup>\*</sup> Satuan ini pertama kali dibentuk di bawah Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan (Kodahankam) pada 1976 dan belakangan dialihkan kepada struktur-struktur komando penerus.<sup>† 126</sup> Secara resmi SGI berada di bawah kendali Korem, sampai pada pertengahan dekade 1990 Kopassus memiliki kendali yang luas atas SGI.<sup>127</sup>

112. Orang Timor-Leste menyebut para informan intelijen dan mata-mata sebagai *Mauhu*; ‘Mau’ berarti nama laki-laki dan ‘hu’ berarti ‘meniup’. Sistem informan intelijen dan mata-mata ini memainkan peran penting dalam menciptakan kecurigaan di antara orang Timor-Leste. Ini memungkinkan militer untuk menyusup ke dalam Resistansi, serta menyebarkan desas-desus dan disinformasi. Banyak orang Timor-Leste terpaksa memainkan peran berbahaya sebagai agen ganda, dan selalu berada dalam bahaya dicurigai oleh kedua pihak. Ada banyak mata-mata Timor-Leste, dan kehadiran mereka yang luas berarti bahwa warga sipil jarang tahu siapa yang sebenarnya ‘Mauhu’ dan siapa yang bukan, siapa yang harus dihindari dan siapa yang harus dipercaya. Meluas dan merasuknya sistem ini menabur kecurigaan mendalam di kalangan penduduk Timor Timur, dan kerekatan sosial menjadi korban dari elemen terselubung dalam konflik ini.

## Dekade 1990 dan perhatian pada pemuda

113. Di akhir dekade 1980-an, para pemuda Timor-Leste muncul sebagai unsur penting baru dalam gerakan resistansi klandestin kota. Hal ini menimbulkan kerisauan rezim Indonesia yang telah berharap besar pada generasi baru Timor-Leste yang dididik dalam sistem Indonesia.

114. Di akhir dekade 1970 dan awal dekade 1980, polisi Indonesia, yang ketika itu adalah bagian resmi militer, mendorong tumbuhnya gerakan kependuan Indonesia

.....  
<sup>\*</sup> Lihat paragraf 56 dan 59. Militer biasanya menyingkat ‘Satuan Tugas Intelijen’ menjadi ‘Satgas Intel’, tapi terdapat juga dokumen-dokumen militer dari 1992–1993, saat ia disingkat sebagai SGI. Sebagian besar orang Timor Leste mengenal unit ini dengan nama SGI.

<sup>†</sup> Pada 1978, Satgas ditransfer ke Kogasgab Seroja; pada 1979, Satgas ini ditransfer ke Korem 164; pada 1984, ke Komando Operasi Keamanan; dan pada 1990, ke Kolakops.



(Pramuka) sebagai cara untuk menanamkan disiplin nasional di antara anak-anak muda Timor-Leste. Program ini mencakup pelatihan gaya militer seperti baris-berbaris, membantu Palang Merah Indonesia, dan menghadiri upacara-upacara resmi. Sampai Mei 1978, terdapat hampir 10.000 anggota, yang meningkat menjadi 22.455 pada 1981.<sup>128</sup> Kelompok-kelompok beladiri pemuda juga dibentuk dan didorong perkembangannya. Melalui pelatihan fisik umum dan dengan mengenakan seragam, kelompok-kelompok ini meniru perilaku tentara.

115. Mahasiswa Timor-Leste juga dijadikan sasaran oleh angkatan bersenjata Indonesia. Pada dekade 1990, Timor-Leste memiliki satu universitas dan satu politeknik. Resimen Mahasiswa (Menwa) dibentuk di kampus-kampus tersebut. Seperti halnya di Indonesia, Resimen Mahasiswa ini menjadi jalur bagi ABRI untuk melakukan indoktrinasi tambahan kepada mahasiswa.<sup>129</sup> Di Timor-Leste, ini menjadi cara bagi ABRI untuk menyusup ke dalam organisasi-organisasi mahasiswa dan kelompok-kelompok klandestin di kampus. Mahasiswa Timor-Leste yang kuliah di Jawa dan Bali diharuskan bergabung dalam organisasi resmi mahasiswa dan pelajar Timor-Leste, Impettu (Ikatan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar Timor Timur).<sup>130</sup> Banyak orang Timor-Leste berada dalam pemantauan intelijen.

## Pasukan pembunuh

116. Pada awal dekade 1990, sebuah pasukan paramiliter gaya baru muncul sebagai upaya ABRI untuk mengendalikan perlawanan klandestin kota yang semakin berkembang. Kelompok yang dikenal sebagai “Ninja” ini beroperasi di malam hari dengan berbaju hitam dan bertopeng.<sup>131</sup> Mereka ditakuti karena peran mereka dalam menghilangnya semakin banyak orang yang dicurigai sebagai anggota Resistansi. Mereka pada kenyataannya adalah pasukan pembunuh.\*

117. Pada 1995, muncul kelompok baru yang disebut Gardapaksi† (Garda Muda Penegak Integrasi). Pada dasarnya ia merupakan penerus kawanan Ninja, dengan fokus serupa untuk membidik Resistansi klandestin. Kelompok ini memiliki hubungan erat dengan Kopassus dan dibentuk oleh menantu Presiden Soeharto, perwira Kopassus Kolonel Prabowo, pada Juli 1995.<sup>132</sup> Walaupun organisasi ini secara resmi dimaksudkan untuk membantu pemuda Timor dalam menjalankan usaha kecil, para anggotanya segera mengembangkan usaha penyelundupan, judi, dan jasa perlindungan yang ilegal atau semi-legal. Selain itu, mereka terus membidik dan mengganggu gerakan klandestin, seperti halnya pasukan Ninja. Gardapaksi berkembang pesat: pada awal 1996, ia memiliki 1.100 anggota; pada April, diumumkan bahwa ada rencana untuk menambahkan 1.200 anggota setiap tahunnya; dan pada Mei tahun itu, 600 anggota dikirim ke Jawa untuk menerima pelatihan dari Kopassus.<sup>133</sup> Walaupun ada hubungan terang-terangan dengan Kopassus, dua tahun setelah pembentukan kelompok ini,

\* Perilaku “kelompok Ninja” ini mirip dengan ‘penembak misterius’ (Petrus) di Jawa di awal dekade 1980, walaupun mereka memiliki maksud yang berbeda. Diprakarsai oleh Jenderal Benny Moerdani, penembak misterius menargetkan penjajah dan membiarkan jasadnya di depan umum.

† Kadang-kadang dieja Gadapaksi.

ketua Gardapaksi, Marçal de Almeida, mengungkapkan ketidaksenangannya bahwa organisasinya dikenal sebagai sarang *mauhu*, istilah dalam bahasa Tetum untuk intelijen militer. Kemunculan Gardapaksi terjadi bersamaan dengan naiknya pamor Kopassus dibanding Kostrad di Timor-Leste. Dengan dominasi Kopassus, terjadi pergeseran pada operasi psikologis yang dirancang untuk menyusup, mengintimidasi, dan menghancurkan jaringan Resistansi klandestin. Gardapaksi adalah unsur garis depan dalam strategi ini. Pada 1995, berbagai kelompok paramiliter di Timor-Leste menerima pelatihan militer di Aileu, yang dilakukan oleh Kopassus. Gardapaksi berlanjut sampai ia digantikan oleh berbagai kelompok milisi pada 1998 – 1999.

### Milisi, 1998 – 1999

118. Banyak di antara milisi yang bermunculan pada 1998 – 1999 berakar dalam kelompok-kelompok yang telah dibentuk jauh lebih awal dalam periode pendudukan. Tabel di bawah menunjukkan sejarah milisi Timor, termasuk nama pemimpin Timor mereka, sesuai dengan sektor dan distrik, yang dibentuk pada 1975 – 1999.

Tabel 2: Milisi-milisi di Timor-Leste, 1975 – 1999				
Sektor A: Timur Komandan: Joanico Césario Belo (Sersan Kopassus Timor Timur)				
Distrik	Nama	Pemimpin Timor	Waktu pembentukan	Latar belakang/ hubungan
Lautém	Jati Merah Putih	José da Conceição	1985	Tim Alfa awalnya didirikan oleh Kopassus pada 1985; diganti namanya menjadi JMP pada 1999.
Viqueque	Makikit; 59/75 Junior/ Naga Merah	Alfonso Pinto (Lafaek)  Alvaro de Jesus	1983  1999	Disponsori oleh Kopassus. Asal-usul dari pemberontakan Viqueque pada 1959.
Baucau	Saka	Joanico C. Belo (Kopassus)	1983	Dibentuk oleh Kopassus dari mantan Falintil dan paramiliter lama Baucau, Railakan, 1959 – 1975.
	Sera	Sera Malik	1986	Didirikan oleh Kopassus.

	Forum Komunikasi Partisan	Antonio Monis	1975	Dibentuk kembali pada 1999 dari anggota lama Partisan.
Manatuto	Mahadomi	Aleixo de Carvalho	1999	Pendiri dan penasihat Vidal Doutel Sarmento adalah bupati dan anggota kehormatan Kopassus
	Morok	Filomeno Lopes da Cruz (April 1999: Thomas de Aquino Kalla	Sekitar 1995	

**Sektor B: Tengah**  
**Komandan: Eurico Guterres**  
 (mantan pemimpin kelompok “ninja” Gardapaksi, Dili, awal dekade 1990.)

Distrik	Nama	Pemimpin Timor	Waktu pembentukan	Latar belakang/ hubungan
Dili	Aitarak	Eurico Guterres	1999	Milisi Gardapaksi di Dili awal dekade 1990; dilatih oleh Kopassus
Liquiçá	BMP (Besi Merah Putih)	Manuel de Sousa	27 Des 1998	Hubungan langsung dengan militer—berbasis di Koramil Maubara
Ermera	DMI (Darah Merah Integrasi); Ramelau (nama gunung di sektor tengah) Naga Merah Tim Pancasila	Miguel Babo  Manuel de Sousa	April 1999	Turunan dari Partisan dan Wanra

Sektor C: Baratdaya Komandan: Cancio Lopes de Carvalho				
Distrik	Nama	Pemimpin Timor	Waktu pembentukan	Latar belakang/hubungan
Ainaro	Mahidi (Mati Hidup untuk Indonesia)	Cancio Lopes de Carvalho	17 Des 1998	Komandan militer Ainaro
Manufahi	Ablai	Nazario Corte Real	27 Mar 1999	Hubungan dengan Kopassus
Covalima	Laksaur (sejenis burung)	Olivio Mendonca Moruk		Bupati (militer), dan komandan militer Covalima
Aileu	Ahi (Aku Hidup untuk Integrasi)	Horacio Araújo	27 Mar 1999	Dibentuk dan didukung oleh pemerintah kabupaten.
Sektor D: Barat Komandan: João Tavares (mantan pemimpin paramiliter Halilintar, bagian dari operasi-operasi rahasia prainvasi 1975)				
Distrik	Nama	Pemimpin Timor	Waktu pembentukan	Latar belakang/hubungan
Bobonaro	Halilintar; Dadurus Merah Putih; Buntur; Armui (Aku Rela Mati untuk Integrasi); Kaer Metin Merah Putih (Pegang Kuat Merah Putih); Harimau Merah Putih; Saka Loromanu (Saka Barat); Firmi Merah Putih (Penganut Merah Putih)	João Tavares	1975; dibentuk kembali pada 1994	Hubungan lama dengan militer melalui Halilintar.
Oecussi	Sakunar (Kalajengking)	Simão Lopes	April 1999	Terkait dengan Kopassus

Sumber: Penelitian dan kompilasi CAVR

## Pembentukan milisi

119. ABRI mulai memobilisasi kelompok-kelompok milisi di seluruh Timor-Leste pada pertengahan sampai akhir 1998. Milisi-milisi ini dibentuk sebagai tanggapan langsung atas kebebasan baru orang Timor-Leste untuk berkampanye bagi kemerdekaan, setelah kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 dan pengumuman sebulan kemudian oleh penerusnya, Presiden BJ Habibie, bahwa Timor-Leste bisa mendapatkan opsi 'otonomi luas'. Setelah Habibie melangkah lebih jauh pada Januari 1999 dan menawarkan kepada Timor-Leste pilihan antara otonomi dan kemerdekaan, kelompok-kelompok milisi menjamur di semua distrik.

120. Dalam banyak hal, pembentukan milisi hanyalah merupakan puncak dari strategi militerisasi yang telah digambarkan di atas. Dalam pembentukan milisi, TNI memanfaatkan berbagai jenis pasukan pembantu beranggotakan orang Timor-Leste yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun sejak 1975. Beberapa kelompok milisi, seperti Tim Saka dan Tim Sera di Baucau, Tim Alfa di Lautém, dan Tim Makikit di Viqueque, sudah ada sejak satu dasawarsa atau lebih. Halilintar di Bobonaro bermula dari satuan Partisan pada bulan-bulan menjelang invasi, dan setelah vakum selama beberapa tahun, dihidupkan kembali pada 1994 untuk membantu ABRI dalam kampanye melawan gerakan klandestin yang merebak di distrik tersebut. Yang lainnya adalah turunan lanjut dari kelompok-kelompok paramiliter sebelumnya. Pemimpin milisi Mahidi di Ainaro juga pernah memimpin para "sukarelawan" yang meneror Ainaro di awal 1990-an.

121. Kelompok milisi yang lain merekrut pemimpinnya dari pasukan pembantu resmi seperti Wanra, Hansip, dan Gardapaksi. Sebuah dokumen militer bertanggal April 1998 menunjukkan bahwa terdapat 12 tim paramiliter ketika itu, yang meliputi setiap distrik di Timor-Leste kecuali Dili dan Oecussi. Dari dokumen tersebut jelas bahwa tim-tim ini, yang antara lain adalah Tim Saka, Sera, Alfa, Makikit, Halilintar, dan Morok—yang semuanya mempertahankan nama tersebut ketika menjelma menjadi milisi—merupakan bagian dari struktur teritorial.<sup>134</sup> Cepatnya milisi tersebut dimobilisasi pada 1999 terutama adalah karena mereka mampu memanfaatkan struktur yang sudah ada. Pendahulu kelompok-kelompok milisi utama terangkum dalam Tabel 2 pada paragraf 118 di atas.

122. Keseluruhan periode menjelang dan langsung setelah Jajak Pendapat terjadi dengan latar kekerasan. Sebagian besar kekerasan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi, dengan pasukan TNI yang memainkan peran pendukung atau terlibat langsung. Peran angkatan bersenjata Indonesia dalam merencanakan dan mendalangi kekerasan ini terdokumentasi dengan baik. Penyelidikan oleh Komisi Nasional HAM Indonesia dan Komisi Penyelidik Internasional atas Timor-Leste (ICIET) dukungan PBB yang dilakukan segera setelah terjadinya gelombang kekerasan, dan oleh Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit, SCU) dukungan PBB di Timor-Leste selama misi-misi UNTAET dan UNMISSET, serta banyak kesaksian dan submisi yang diterima oleh CAVR dan penelitian oleh CAVR sendiri, semua membawa kepada kesimpulan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa militer Indonesia benar-benar terlibat secara mendalam dalam segala aspek kekerasan yang terjadi, mulai dari pembentukan awal

kelompok-kelompok milisi sampai kepada menjalankan tahap akhir dan yang paling menyeluruh dari kekerasan pada September – Oktober 1999.

123. Selain bukti-bukti sejarah yang sudah disebut, terdapat banyak kumpulan bukti lain yang menengarai bahwa milisi dibentuk, didukung, dan dikendalikan oleh TNI. Bukti-bukti ini terangkum di bawah ini.\*

### Keterlibatan TNI dalam pembentukan milisi-milisi

124. Pejabat senior militer Indonesia terlibat dalam perencanaan, pembentukan, dan pelatihan milisi. Pada Februari 1999, mantan pemimpin Partisan, Tomas Gonçalves, yang mengklaim bahwa ia ditawari namun menolak untuk menempati posisi senior dalam struktur milisi, berbicara kepada media internasional dan menjelaskan peran kunci personel militer dalam pembentukan milisi, sambil menyebut komandan Korem, Kolonel Tono Suratman, dan komandan Kodam IX Udayana Mayor Jenderal Adam Damiri, serta menyebut peran besar yang dimainkan oleh satuan intelijen SGI yang didominasi Kopassus.<sup>† 135</sup> Tomas Gonçalves mengatakan:

*Perintahnya datang dari Pangdam, [Mayor Jenderal] Adam Damiri, kepada Komandan Korem Timor Timur dan Komandan Kopassus Yayat Sudrajat—hapuskan seluruh CNRT, semua orang prokemerdekaan, keluarga baik orangtua, anak lelaki, perempuan, dan cucu mereka. Komandan Sudrajat menjanjikan pembayaran Rp200.000 kepada siapa saja yang ingin menjadi milisi.<sup>136</sup>*

125. Dalam dakwaan Unit Kejahatan Berat terhadap Jenderal Wiranto dan yang lainnya, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat menjelaskan mengenai serangkaian pertemuan di mana pejabat militer senior merencanakan pembentukan dan perekrutan milisi:

.....  
\* Ringkasan Komisi mengenai bukti kaitan antara milisi dan TNI sangat mengandalkan laporan oleh Geoffrey Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity*, Juli, 2003, hal.82-129, yang diberikan OHCHR kepada Komisi sebagai submisi.

† Pada 1993, SGI diubah namanya menjadi Satuan Tugas Intelijen, namun terus dikenal luas sebagai SGI (Lihat 4.2: ABRI dan perannya di Timor-Leste). Pada 1999, satuan ini terdiri atas personel satuan Kopassus, yang disebut Satgas Tribuana, di bawah komando Letnan Kolonel Yayat Sudrajat. Kopassus telah memainkan peran yang dominan dalam struktur militer Indonesia di Timor-Leste sejak pertengahan dekade 1990. Sejumlah perwira senior yang memiliki latar belakang Kopassus yang pernah bertugas di Timor-Leste memainkan peran penting selama Jajak Pendapat. Termasuk di antara mereka Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang resminya adalah wakil militer utama satuan tugas Indonesia yang diberi tugas untuk berhubungan dengan UNAMET, tapi yang juga diyakini telah memainkan peran penting dalam pembentukan milisi selama masa ini. Selain Letnan Kolonel Sudrajat, Danrem Kolonel Tono Suratman juga sebelumnya pernah bertugas dengan Kopassus. Atasan langsungnya, Mayor Jenderal Adam Damiri, komandan Kodam Udayana yang berbasis di Bali, juga merupakan anggota Kopassus. Di tingkat kabinet, tokoh utama lainnya yang merancang kebijakan mengenai Timor-Leste adalah Menteri Koordinasi bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (purn) Feisal Tanjung, yang adalah salah satu dari empat menteri di kabinet dengan latar belakang Kopassus. Yang lainnya adalah Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, yang keterlibatan luasnya dengan Timor-Leste sudah dimulai sejak masa komando pra-invasi dengan Tim Susi. (Robinson, hal.28 – 29.)

1. Pada atau sekitar Agustus 1998 [komandan Daerah Militer IX Udayana, Mayor Jenderal] Adam Rachmat Damiri mendatangkan seorang pemimpin pro-Indonesia dari Timor-Leste naik pesawat ke Denpasar, Bali, untuk menghadiri sebuah pertemuan. Pada pertemuan ini, Damiri meminta pemimpin asal Timor-Leste ini membentuk kelompok untuk mendukung dan mendorong integrasi.
2. Pada atau sekitar Agustus 1998 Damiri berkunjung ke Dili dan bertemu dengan para komandan TNI dan pemimpin pro-Indonesia asal Timor-Leste. [Komandan Korem 164] Kolonel Suhartono Suratman hadir pada pertemuan tersebut. Damiri menjelaskan kepada kelompok yang hadir tersebut bahwa perhatian internasional diarahkan pada Timor-Leste dan ini merupakan masalah bagi Indonesia. Ia mengatakan pada mereka bahwa mereka perlu merancang rencana untuk menciptakan organisasi-organisasi yang akan menyebarluaskan rasa pro-Indonesia di seluruh Timor-Leste. Ia mengatakan pada mereka bahwa mereka harus membentuk pasukan pertahanan sipil yang kuat, didasarkan pada model-model dukungan TNI sebelumnya, dan bahwa pasukan ini harus dikembangkan dan dibangun untuk membela integrasi.
3. Pada atau sekitar November 1998, Damiri berkunjung ke Timor-Leste. Dalam kunjungan ini, ia bertemu lagi dengan para pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia di Dili, termasuk orang-orang yang di kemudian hari menjadi pemimpin kelompok-kelompok milisi. Damiri meminta orang-orang yang hadir untuk bersatu dan membantu TNI memerangi kelompok prokemerdekaan Front Revolusioner bagi Timor-Leste Merdeka [Frente Revolucionário de Timor-Leste Independente, Fretilin]. Dalam pertemuan dengan pemimpin pro-Indonesia ini, Damiri memuji pemimpin milisi kelak, Eurico Guterres, sebagai seorang pemuda yang bersedia membela integrasi dan mengatakan bahwa ia siap memberi Guterres lima puluh juta rupiah untuk memulai kerjanya.
4. Pada atau sekitar November 1998, Tono Suratman bertemu dengan para pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia di markasnya di Dili. [Komandan Tribuana, Letnan Kolonel] Yayat Sudrajat hadir pada pertemuan tersebut. Suratman mengatakan kepada kelompok yang hadir tersebut bahwa ia ingin agar Eurico Guterres, yang kelak akan menjadi pemimpin milisi, membentuk organisasi baru untuk membela integrasi seperti kelompok pemuda pro-Indonesia Gardapaksi.
5. Pada awal 1999, [Mayor Jenderal] Zacky Anwar Makarim [yang menjabat sebagai kepala badan intelijen militer, BIA, sampai Januari 1999] menerima para pendiri kelompok pro-Indonesia Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT) di kantornya di Jakarta. Selama pertemuan tersebut ia mengatakan bahwa perang gerilya akan diperlukan untuk dapat mengatasi pendukung prokemerdekaan jika opsi otonomi kalah dalam Jajak Pendapat.
6. Pada atau sekitar Februari 1999, Damiri bertemu dengan pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia di markas Kodam IX Udayana di Denpasar, Bali.

Damiri mengatakan kepada mereka bahwa TNI siap memberi dukungan secara rahasia bagi pasukan-pasukan pro-Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dukungan ini harus bersifat rahasia untuk menghindari kecaman dan kritikan internasional. Damiri meminta orang-orang yang hadir untuk mengumpulkan orang Timor-Leste yang pernah berdinan dengan TNI. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bertemu dengan Suratman untuk instruksi lebih lanjut.

7. Pada atau sekitar Februari 1999, Suratman bertemu dengan seorang pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Dili. Ia mengatakan kepadanya bahwa karena TNI berada di bawah rezim yang reformis, ia tidak dapat mengambil bagian dalam operasi terbuka melawan gerakan kemerdekaan. Suratman meminta pemimpin pro-Indonesia tersebut membentuk kelompok milisi. Suratman mengatakan bahwa TNI siap memberi dukungan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok milisi.
8. Pada atau sekitar Februari 1999, Yayat Sudrajat bertemu dengan anggota TNI dan pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia di markas Satuan Tugas Intelijen di Dili. Sudrajat mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa Satuan Tugas Intelijen memiliki daftar pendukung kemerdekaan yang akan dibunuh. Ia menyatakan bahwa Satuan Tugas Intelijen dan kelompok pro-Indonesia akan bekerjasama melakukan pembunuhan-pembunuhan ini. Ia mengatakan bahwa Kopassus berpakaian preman akan mulai melakukan pembunuhan pendukung prokemerdekaan.
9. Pada atau sekitar Maret 1999, [Asisten Operasional Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal] Kiki Syahnakri bertemu dengan pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia di markas besar TNI di Jakarta. Syahnakri mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa TNI akan mendukung upaya pro-Indonesia mereka dan bahwa Makarim bertanggung jawab melakukan koordinasi atas segala aktivitas menjelang Jajak Pendapat. Syahnakri mengatakan kepada mereka bahwa persenjataan sudah dikirim ke Timor-Leste, dan bahwa sekembalinya mereka ke Dili, mereka harus menghubungi Suratman untuk mengatur pembagian persenjataan tersebut
10. Pada awal 1999, [Gubernur Abilio] Soares menganjurkan para bupati untuk membentuk kelompok-kelompok milisi di kabupaten mereka masing-masing. Beberapa dari para bupati ini menjadi pemimpin milisi.<sup>137</sup>

126. Satu aspek dari peran TNI dalam pembentukan milisi adalah keterlibatannya secara langsung dalam perekrutan. Pada awal 1999, kepala staf Korem saat itu, Letnan Kolonel Supardi, dikutip mengatakan bahwa TNI telah merekrut 1.200 anggota milisi dan akan meneruskan perekrutan sampai Maret.<sup>138</sup> Selain menggunakan insentif keuangan sebesar Rp200.000,00 untuk mendorong perekrutan,\* TNI juga menggunakan ancaman dan pemaksaan (lihat lebih jauh di bawah). Ditetapkan berbagai target dalam perekrutan anggota milisi di tiap

\* Saat itu, Rp200.000,00 setara dengan USD26,66.



distrik—yakni sekitar sepuluh orang per desa.<sup>139</sup> Selain itu, pelatihan milisi dilakukan sesuai aturan yang digariskan dalam berbagai instruksi dan laporan yang diterbitkan oleh perwira senior sampai pada tingkat teratas di dalam struktur komando teritorial.<sup>140</sup>

## Dukungan TNI bagi milisi

127. Para anggota TNI dan pemerintahan Indonesia memberi status resmi pada milisi. Mereka melakukan hal ini, misalnya, dengan menghadiri upacara pengangkatan anggota milisi dan pawai-pawai di seantero Timor-Leste. Komandan Korem, Kolonel Suratman, bertemu dan memberi “bimbingan” kepada anggota milisi Besi Merah Putih (BMP) di markas Kodim 1638 pada 16 April 1999, sepuluh hari setelah pembantaian warga sipil di Gereja Liquiçá dan sehari sebelum amukan milisi di Dili, di mana BMP juga ambil bagian.<sup>141</sup> Sampai pada 8 Mei 1999 pun Komandan Korem Timor Timur Kolonel Suratman menghadiri upacara pembentukan milisi Mahadomi di Manatuto. Ia dan beberapa tokoh lain, termasuk Gubernur Abilio Soares, Bupati Dili, Domingos Soares, dan asisten operasional angkatan darat saat itu, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, juga hadir pada pawai pada 17 April, saat Eurico Guterres berbicara kepada anggota milisi dan menganjurkan mereka membunuh “orang-orang yang telah mengkhianati integrasi”. Di akhir pawai tersebut, para anggota milisi menyebar dan menyerang Dili. Salah satu sasaran mereka adalah rumah Manuel Carrascalão, tempat ratusan orang berlindung untuk menghindari kekerasan milisi di distrik mereka. Di rumah tersebut, mereka membunuh 12 orang.<sup>142</sup>

128. Selain unjuk dukungan ini, penguasa Indonesia memberi milisi dukungan resmi dengan memperlakukan mereka sebagai bagian dari struktur pembantu resmi militer. Dalam komunikasi resmi, kelompok-kelompok milisi ini sering disebut sebagai bagian dari kelompok-kelompok pertahanan sipil.<sup>143</sup> Sejak April 1999, kelompok-kelompok milisi juga secara resmi diakui sebagai Pam Swakarsa (organisasi sukarelawan keamanan sipil).<sup>144</sup>

## Partisipasi TNI dalam kegiatan milisi

129. Hubungan dekat antara TNI dan milisi terlihat jelas dari tumpang-tindihnya keanggotaan mereka. Banyak anggota milisi yang juga adalah anggota TNI aktif, suatu fakta yang diperkuat oleh dokumen-dokumen resmi militer dan pemerintah Indonesia.<sup>145</sup> Setidaknya satu kelompok milisi (Tim Saka) telah merupakan ‘kompi khusus’ yang sepenuhnya terintegrasi dalam struktur TNI sejak beberapa tahun sebelumnya.<sup>146</sup> Selain itu, pemimpin milisi diperlakukan sebagai bagian aparat keamanan resmi dan diundang dalam pertemuan-pertemuan bersama tentara, polisi, dan pejabat pemerintah.<sup>147</sup>

## Pemberian pelatihan, persenjataan, dan dukungan operasional

130. TNI juga memberi pelatihan, persenjataan, dan dukungan operasional bagi milisi. Peran TNI dalam melatih milisi diperkuat oleh beberapa sumber termasuk berbagai dokumen, telegram Indonesia, dan setidaknya satu pernyataan kepada media oleh Letnan Kolonel Supardi, kepala staf Korem di bulan-bulan awal 1999.<sup>148</sup> TNI menyediakan persenjataan, dan kontrol atas penggunaannya juga diatur oleh TNI.<sup>149</sup> Banyak bukti mengenai hal ini ditemukan dalam dokumen-dokumen, juga kenyataan bahwa milisi memiliki persenjataan modern yang jenisnya sama dengan yang digunakan oleh tentara dan polisi Indonesia.<sup>150</sup> Jenderal Wiranto sendiri mengakui kepada para penyelidik bahwa:

*Kadang-kadang senjata disediakan, tapi ini bukan berarti mereka [milisi] membawa senjata ke mana pun mereka pergi. Senjata-senjata tersebut disimpan di markas Koramil.<sup>151</sup>*

131. Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat membuat tuduhan-tuduhan berikut dalam dakwaannya terhadap Jenderal Wiranto dan yang lainnya:

1. Pada atau sekitar Maret 1999, [Gubernur Abilio] Soares mengadakan rapat di kantornya di Dili. [Komandan Korem 164, Kolonel Suhartono] Suratman dan [komandan unit Kopassus, Satgas Tribuana, Letnan Kolonel Yayat] Sudrajat hadir pada pertemuan tersebut. Soares mengatakan kepada kelompok pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia bahwa para pendukung kemerdekaan yang mencari perlindungan kepada pastor dan suster-suster adalah komunis yang harus dibunuh. Ia juga mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa TNI akan menyediakan senjata kepada kekuatan pro-Indonesia. Ia mengatakan apabila TNI tidak dapat menyediakan senjata yang cukup, ia akan menyediakannya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia akan menyediakan dana bagi organisasi pro-Indonesia, BRTT.
2. Pada atau sekitar Maret 1999, Yayat Sudrajat dan anggota TNI yang lain menyampaikan sejumlah besar senjataapi kepada seorang pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia. Sudrajat meminta pemimpin Timor-Leste tersebut untuk memberi senjata kepada kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia.
3. Pada atau sekitar April 1999, [kepala badan intelijen angkatan bersenjata BIA] Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim mengatakan kepada para komandan TNI dan pemimpin-pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia bahwa mereka harus bekerja keras untuk otonomi karena apabila otonomi kalah, akan lebih banyak darah yang tumpah. Ia menawarkan pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia untuk menggunakan senjata otomatis dan memerintahkan Suratman mengumpulkan dan membagi-bagikan senjataapi tersebut.
4. Pada atau sekitar April 1999, Suratman, setelah diminta oleh Makarim untuk menyediakan senjata api otomatis kepada pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia, memerintahkan bawahannya, Sudrajat, untuk mengatur pengumpulan dan distribusi senjata api tersebut.<sup>152</sup>

132. TNI juga memberi dukungan operasional kepada para milisi. Terkadang dukungan ini berupa penggunaan markas dan pos-pos TNI oleh milisi. Dalam kasus milisi yang dibentuk jauh sebelum 1999, penggunaan basis TNI seperti ini hanyalah merupakan penerusan hubungan lama. Satu contoh adalah penggunaan markas Kopassus oleh Tim Alfa di Lospalos.

### **Operasi gabungan TNI-milisi**

133. Dalam operasi gabungan, pasukan TNI sering hadir ketika terjadi penyerangan oleh milisi, dengan pasukan TNI berada pada posisi di belakang anggota milisi dan menembak hanya untuk membela milisi ketika mereka diserang.<sup>153</sup> Satu operasi milisi yang dihadiri oleh pasukan TNI adalah pada pembantaian di Gereja Liquiçá pada April 1999. Partisipasi anggota TNI menjadi semakin jarang setelah kedatangan UNAMET pada Juni 1999, walaupun ini terus berlanjut selama minggu-minggu menjelang Jajak Pendapat, termasuk dalam kejadian-kejadian berpamor tinggi seperti penyerangan pada kantor UNAMET di Maliana (Bobonaro) pada 29 Juni 1999. Operasi gabungan TNI-milisi yang luas kembali terjadi setelah Jajak Pendapat pada September 1999, setelah staf internasional dipaksa meninggalkan distrik-distrik dan terkepung di kantor pusat UNAMET di Dili atau telah meninggalkan negeri ini.<sup>154</sup>

### **Pemberian dukungan keuangan dan materi oleh TNI dan badan-badan lainnya**

134. Akhirnya, terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa pejabat sipil dan militer Indonesia mendanai milisi dan menyediakan sumberdaya untuk mereka gunakan. Sekitar Rp39 miliar (atau USD5,2 juta) disalurkan kepada kelompok-kelompok milisi melalui pemerintah sipil Indonesia.<sup>155</sup> Rencana anggaran untuk “sosialisasi otonomi” disusun oleh setiap kabupaten, yang mencakup alokasi dana untuk milisi, dan diserahkan kepada gubernur untuk disahkan.\* Dana tambahan disediakan melalui cabang-cabang pemerintahan Indonesia dan TNI yang lain. Terdapat juga bukti bahwa kelompok politik prointegrasi, FPDK (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan) dan BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur), yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan sipil (lihat segmen 4.4 tentang pemerintahan sipil), digunakan untuk menyalurkan dana dari pemerintah dan militer kepada milisi.<sup>156</sup> FPDK dikepalai oleh Bupati Dili, Domingos Soares, sementara ketua BRTT adalah Francisco Lopes da Cruz, mantan presiden UDT yang menjadi wakil gubernur Timor Timur pada tahun-tahun awal pendudukan, dan pada 1999 menjadi duta besar keliling dengan misi menganjurkan pandangan Indonesia tentang Timor-Leste secara internasional.<sup>157</sup>

135. Hubungan dekat antara milisi dan TNI serta penguasa sipil Indonesia ini membuat Komisi Penyelidik PBB menyatakan dalam laporannya bahwa:

\* CAVR menyimpan beberapa anggaran seperti ini.

1. Terdapat bukti bahwa Tentara Indonesia dan penguasa sipil di Timor-Leste dan beberapa di Jakarta menerapkan kebijakan untuk menggunakan milisi untuk memengaruhi hasil Jajak Pendapat. Pendekatan yang digunakan adalah untuk memberi kesan bahwa orang Timor-Leste saling berperang.
2. Terdapat bukti bahwa kebijakan menggunakan milisi dijalankan oleh Kopassus dan badan intelijen TNI lainnya. Kebijakan ini terwujud dalam perekrutan aktif, pendanaan, penyediaan senjata, dan bimbingan serta penyediaan dukungan logistik bagi milisi dalam intimidasi dan serangan terornya.
3. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, anggota militer Indonesia, selain mengarahkan milisi, juga terlibat langsung dalam intimidasi dan serangan teror tersebut. Intimidasi, teror, perusakan harta benda, pemindahan, dan evakuasi paksa tidak akan mungkin terjadi tanpa keterlibatan aktif tentara Indonesia serta pengetahuan dan restu komando militer tertinggi.
4. Polisi Indonesia, yang bertanggung jawab atas keamanan menurut Kesepakatan 5 Mei,\* tampak telah terlibat dalam tindak intimidasi dan teror, dan dalam kasus-kasus lain tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini.
5. Komisi beranggapan bahwa pada akhirnya militer Indonesialah yang bertanggung jawab atas intimidasi, teror, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya yang dialami oleh orang Timor-Leste sebelum dan sesudah Jajak Pendapat. Selanjutnya, bukti yang dikumpulkan sampai saat ini menunjukkan bahwa orang-orang tertentu terlibat langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.<sup>158</sup>

### Konsekuensi kerjasama milisi-TNI

136. Ian Martin, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB selama masa UNAMET, mengatakan kepada Komisi:

*[W]akil Jaksa untuk Kejahatan Berat yang ditunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bukti yang cukup untuk menuntut kepemimpinan tertinggi TNI dengan kejahatan terhadap umat manusia... Dalam pendapat saya, tidak ada lagi keraguan bahwa penghancuran Timor-Leste bukan semata merupakan hasil respons emosional milisi dan pembangkangan orang Timor-Leste di dalam TNI: ini merupakan operasi yang direncanakan dan dikoordinasi di bawah arahan TNI.<sup>159</sup>*

\* Perundingan antara Indonesia dan Portugal di New York pada 5 Mei 1999 membawa hasil bahwa kedua pemerintahan memercayai Sekretaris Jenderal PBB untuk mengorganisasi serta menjalankan Jajak Pendapat untuk menentukan apakah rakyat Timor-Leste menerima atau menolak otonomi khusus bagi Timor-Leste di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia mengemban tugas pengamanan selama Jajak Pendapat.

137. Kekerasan pada 1999 dibahas di bagian lain dalam laporan ini (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.2 tentang pembunuhan dan penghilangan; Bab 7.3 tentang pemindahan paksa dan kelaparan; Bab 7.4 tentang penahanan dan penyiksaan; dan Bab 7.7 tentang kekerasan seksual). Dalam kaitannya dengan bab ini, penting untuk diperhatikan adanya hubungan erat antara TNI dan kelompok-kelompok milisi Timor-Leste, serta dominasi TNI atas pemerintahan sipil dan kepolisian di Timor-Leste. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa masuk ke Timor-Leste pada 1999, milisi yang didukung TNI meneror penduduk, tanpa intervensi oleh polisi Indonesia.<sup>160</sup>

138. Pihak berwenang Indonesia menyatakan bahwa kelompok-kelompok milisi ini adalah ungkapan spontan dukungan setempat untuk integrasi, dan bahwa kekerasan merupakan hasil konflik antara orang Timor-Leste yang prokemerdekaan dengan yang prointegrasi. Tapi, tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk mencegah ancaman-ancaman ini. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian di Liquiçá dan Dili pada April 1999 tidak pernah dicari dan dibawa ke pengadilan. “Pelucutan senjata” milisi pada Agustus 1999 jelas-jelas merupakan sandiwara yang dirancang untuk memberi kesan bahwa milisi membalas keputusan Falintil untuk menarik pasukannya (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

139. Ketika kekerasan besar-besaran terjadi setelah Jajak Pendapat, TNI mencoba menggambarkan hal ini sebagai kekerasan spontan akibat kejutan dan kemarahan atas hasil yang mendukung kemerdekaan. Tapi, implementasi yang cepat dan luasnya skala kekerasan dan penghancuran menengarai suatu operasi yang direncanakan baik dengan dukungan logistik yang canggih.<sup>161</sup> Walaupun milisi sering berada di garis depan aktivitas seperti ini, dalam banyak kasus mereka didukung secara langsung oleh anggota militer dan polisi.<sup>162</sup> Mereka pada dasarnya menjalankan rencana TNI. Dan memang, ancaman milisi untuk menghancurkan Timor-Leste jika pilihan kemerdekaan yang menang pernah diperingatkan sebelumnya oleh Komandan Militer Timor Timur Kolonel Suratman beberapa bulan sebelum Jajak Pendapat, ketika ia mengatakan dalam wawancara dengan televisi Australia:

*Saya mau sampaikan satu pesan: kalau pihak prokemerdekaan menang, bukan hanya Pemerintah Indonesia yang akan berurusan dengan hasilnya. PBB dan Australia juga akan harus mengatasi masalah itu, dan jika ini memang terjadi, tidak akan ada yang menang. Semuanya akan dihancurkan. Timor Timur tidak akan ada lagi seperti sekarang. Akan jauh lebih buruk dari[pada] 23 tahun yang lalu.<sup>163</sup>*

140. Selama masa menjelang Jajak Pendapat, penduduk sipil Timor-Leste diteror dan tidak dapat mengandalkan polisi atau pemerintahan sipil untuk menghormati hukum serta menegakkan hukum dan ketertiban. Militer dan polisi, yang bertugas melindungi penduduk, justru membiarkan dan mendukung kekerasan serta

intimidasi ini. Dengan penarikan mundur PBB dan pengamat internasional pada hari-hari setelah Jajak Pendapat,\* kerjasama antara milisi dan TNI terjadi sangat terang-terangan dan keduanya berpartisipasi dalam pemindahan jumlah penduduk sipil yang amat besar ke Timor Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia.<sup>164</sup> Selama proses ini, militer Indonesia, polisi, dan milisi Timor melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, dan penganiayaan lainnya terhadap penduduk sipil.

## Pemerintahan sipil

### Pemerintahan sementara di Timor-Leste

141. Pada 18 Desember 1975, segera setelah melakukan invasi besar-besaran di Timor-Leste, Indonesia membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT).<sup>†</sup> Kebanyakan posisi pemerintahan ini diisi oleh orang Timor-Leste yang prointegrasi dengan Indonesia, yang umumnya berasal dari partai Apodeti dan UDT. Anggota PSTT diangkat di Dili sementara pertempuran keras sedang berlangsung akibat dari invasi yang masuk makin jauh ke dalam wilayah pedalaman. Selama tujuh bulan masa tugasnya, Pemerintahan Sementara tersebut ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membuat keputusan karena begitu dominannya militer Indonesia. Kesaksian mantan Gubernur Timor Timur Mario Carrascalão di depan Komisi menyebutkan:

*Saya tidak bisa menganggap PSTT sebagai sebuah Pemerintah yang sebenarnya. Ketua Eksekutifnya adalah Arnaldo de Araújo, dengan Lopes da Cruz sebagai wakilnya. Ketua Dewan Rakyat adalah Guilherme Gonçalves. Dewan Rakyat itu baru mulai berfungsi... mereka berkumpul satu kali yaitu pada Mei 1976 di sini, hanya untuk membahas satu butir "piagam"-nya, yaitu, mengenai integrasi tanpa referendum.<sup>165</sup>*

142. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang No. 7/76, dan Presiden Soeharto menandatangani pada Juli 1976, Indonesia mengklaim bahwa integrasi Timor Timur secara resmi telah sempurna. Undang-Undang No. 7/76 memerintahkan pembentukan sebuah pemerintahan provinsi, dan untuk memberlakukan UU ini pada 30 Juli 1976, Pemerintah RI mengeluarkan Dekrit No.19/1976 yang menetapkan struktur pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten di Timor Timur. Aturan ini menerapkan struktur pemerintahan sipil baku yang berlaku di Indonesia terhadap Timor-Leste. Walau demikian, dengan sedikit perubahan aturan ini tetap mempertahankan struktur pemerintahan sipil Portugis: *concelho* menjadi kabupaten (distrik), *posto* menjadi kecamatan (subdistrik), *suco*

\* Duabelas Pejabat Hubungan Militer PBB bertahan di Kedutaan Besar Australia di Dili setelah UNAMET pergi pada 14 September 1999. Mereka dilindungi oleh pasukan Kostrad.

† Pada bagian ini di laporan tertulis 'Timor Timur', untuk menunjukkan nama administratif pemerintahan Indonesia bagi wilayah tersebut. Istilah 'Timor-Leste' tetap digunakan untuk menyebut wilayah tersebut untuk maksud selain sebagai bagian pemerintahan Indonesia.

menjadi desa, dan *aldeia* menjadi kampung/dusun. Hasil kebijakan ini adalah jumlah satuan pemerintahan pada tingkat kabupaten dan kecamatan jauh melebihi apa yang umumnya berlaku di wilayah Indonesia lainnya. Terlebih lagi, seperti di wilayah Indonesia lainnya, militer Indonesia (ABRI) membangun struktur komando teritorial yang sejajar dengan pemerintahan sipil, yang artinya juga lebih banyak kehadiran militer di tingkat lokal di Timor-Leste dibandingkan dengan wilayah lain Indonesia.

Tabel 3: Struktur pemerintahan Indonesia, dengan satuan yang setara dalam sistem Portugis serta militer Indonesia				
Tingkat	Istilah Indonesia	Posisi pemerintahan	Kesetaraan Portugis	Komando militer yang sejajar
provinsi	provinsi	gubernur	<i>territory</i>	Korem
distrik (13)	kabupaten	bupati dan sekretaris	<i>conçelhos</i>	Kodim
subdistrik (62)	kecamatan	camat dan pembantu camat	<i>postos administrativos</i>	Koramil
desa (442)	kelurahan/desa	lurah/kepala desa	<i>suco</i>	Babinsa
subdesa	kampung/dusun RW (Rukun Warga) RT (Rukun Tetangga)	kepala kampung	<i>aldeia/povoacã</i>	
RT	RT/RW	ketua RT	<i>bairro</i>	

Sumber: Dokumen penelitian CAVR, arsip CAVR

### Kedudukan Gubernur\*

143.Selama rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, gubernur sebuah provinsi Indonesia ditunjuk sekali dalam lima tahun oleh presiden, dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional.† Perwira militer yang masih aktif atau sudah pensiun ditunjuk untuk memegang jabatan gubernur di hampir setengah dari seluruh provinsi di Indonesia. Di Timor-Leste, pemerintah RI menunjuk penduduk sipil asli Timor-Leste sepanjang masa pendudukan.

.....  
 \* Arnaldo dos Reis Araújo, 1976 – 1978, Apodeti; Guilherme Maria Gonçalves, 1978 – 1982, Apodeti; Mario Viegas Carrascalão, 1982 – 1987 dan 1987 – 1992, UDT; Abilio José Osorio Soares, 1992 – 1997 dan 1997– 1999, Apodeti.

† Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan ketua badan legislatif di daerah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), secara formal merupakan penguasa tertinggi di suatu provinsi Indonesia.

144. Pada 4 Agustus 1976, Jakarta menunjuk Arnaldo dos Reis Araújo, pemimpin Apodeti, sebagai gubernur pertama, dan dengan demikian menjadikan Timor Timur sebagai provinsi baru. Ketua UDT, Francisco Lopes da Cruz, ditunjuk sebagai wakil gubernur. Araújo diganti pada 1978, setelah ia secara terang-terangan mengkritik Indonesia.<sup>166</sup> Dalam sebuah wawancara dengan wartawan Indonesia pada September 1980, Araújo berkata:

*Pemerintah menunjukkan perhatian yang besar [untuk Timor Timur], tetapi sayangnya ini tidak ditujukan secara langsung kepada warga Timor Timur. Ini tidak ubahnya seperti pada zaman penjajahan Portugis: uang datang dari Portugal diberikan atas nama warga Timor Timur hanya untuk dikirim kembali ke Portugal atas nama pribadi orang yang dikirim oleh pemerintah Portugal sendiri.*

145. Ia memberi saran kepada pemerintah Indonesia untuk:

*[M]enciptakan situasi normal sesegera mungkin dan akhiri situasi teror, kekuasaan tanpa batas, kesewenang-wenangan, dan hukum rimba, anarki, monopoli ekonomi, dan lain-lain, sama seperti pada zaman penjajahan Portugis.*<sup>167</sup>

146. Pengganti Araújo, Guilherme Maria Gonçalves, adalah anggota Presidium Apodeti, salah seorang penandatangan Deklarasi Balibó dan seorang *liurai*. Ia tokoh pendukung aneksasi oleh Indonesia, dan merekrut banyak orang yang ikut membentuk satuan Partisan Timor Timur yang menyertai invasi militer Indonesia. Kekuasaannya sebagai gubernur berakhir pada 1982 setelah ia cekcok dengan Sekretaris Wilayah (Sekwilda), Kolonel Paul Kalangi, mengenai masalah penggunaan pajak kopi yang telah dibayar ke pemerintah daerah.<sup>168</sup>

147. Selama tahun-tahun awal ini, pemerintahan sipil menghadapi banyak persoalan. Hal ini termasuk kurangnya personel, sulitnya komunikasi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman bahasa Indonesia di antara orang Timor-Leste, dan pada tingkat kepemimpinan terjadi perseteruan antara anggota Apodeti dan UDT yang bekerja dengan orang Indonesia. Laporan polisi pada Maret 1983 menyatakan:

*Sejak dibentuknya PSTT, penunjukan pejabat Pemda diprioritaskan pada eks-anggota partai Apodeti [baik sebagai gubernur, bupati, atau camat], sedangkan eks-anggota partai UDT hanya ditunjuk sebagai pembantu mereka. Namun banyak di antara mantan UDT dalam posisi administratif mempunyai hubungan buruk dengan atasan mereka sehingga jalannya Pemda belum sesuai dengan apa yang diharapkan.*<sup>169</sup>

148. Terlebih lagi, pada awal-awal tahun pendudukan ketika ABRI masih berperang hebat dengan pasukan Fretilin, masalah pemerintahan sipil merupakan hal yang tidak terlalu diprioritaskan.



149. Gubernur yang ketiga, Mario Viegas Carrascalão, salah seorang pendiri UDT, dilantik pada 18 September 1982. Ia menjabat selama dua periode, hingga Juni 1992.\* Carrascalão adalah salah seorang di antara segelintir orang Timor-Leste yang memiliki gelar sarjana pada dekade 1970, dan pernah menjadi anggota delegasi Indonesia ke PBB dari 1980 –1982.<sup>170</sup> Ia mengatakan kepada Komisi bahwa ia diangkat atas “instruksi” Jenderal Benny Moerdani.<sup>171</sup> Selama Carrascalão menjabat sebagai gubernur, Timor-Leste mengalami proses ‘normalisasi’ dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan provinsi dikonsolidasikan dan Provinsi Timor Timur dijadikan sejajar dengan hampir semua provinsi di Indonesia. Di akhir 1988, Presiden Soeharto menandatangani Keppres No. 62/1988, yang secara resmi mengakhiri keterutupan wilayah ini dan menormalkan kembali status Timor Timur sebagai provinsi.<sup>172</sup> Mario Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa hanya setelah keputusan ini dibuat, kontrol militer terhadap Timor-Leste berkurang.<sup>173</sup>

150. Setelah menduduki jabatan lima-tahunan yang kedua, Carrascalão diganti pada 1992 oleh Abilio Osorio Soares, tokoh yang tidak terlalu memegang peranan<sup>†</sup> di Apodeti.<sup>174</sup> Pencalonan Soares didukung oleh menantu Presiden Soeharto, Letnan Kolonel Prabowo, yang pada waktu itu bertugas di Kopassus dan terlibat sangat dalam di Timor-Leste.<sup>175</sup> Abilio Soares menjadi gubernur sampai berakhirnya pendudukan Indonesia.

151. Mantan Ketua UDT, Francisco Lopes da Cruz, masih menjabat sebagai wakil gubernur sampai 1982. Ia digantikan oleh pejabat militer Indonesia, Brigadir Jenderal A.B. Saridjo, yang memegang jabatan sampai 1993.<sup>176</sup> Ia kemudian diganti lagi oleh perwira militer lain, yaitu Letnan Kolonel J. Hariwibowo, yang menjabat sampai 1999. Kedua wakil gubernur tersebut adalah mantan sekretaris wilayah daerah (sekwilda).

152. Pada 1987, Timor-Leste dibagi menjadi tiga wilayah administratif, yaitu: bagian timur dengan ibukota di Baucau; bagian tengah berpusat di Gleno; dan bagian barat dikendalikan dari Maliana (Bobonaro).<sup>‡</sup> Setiap wilayah ini diperintah oleh seorang asisten gubernur, yang biasanya seorang perwira militer.<sup>177</sup>

## Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda)

153. Secara resmi, jabatan eksekutif nomor dua di provinsi dipegang oleh sekretaris wilayah daerah (sekwilda). Kenyataannya, sebagaimana provinsi lain Indonesia, karena pemegang posisi ini berwenang mengendalikan anggaran provinsi, posisi ini menjadi

.....  
\* Mario Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai gubernur setelah Pembantaian Santa Cruz pada November 1991, di dalam Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, April 2003. Sesungguhnya, hal itu bertepatan dengan selesainya masa jabatannya yang kedua.

† Abilio Soares adalah adik dari tokoh Apodeti, José Osorio Soares, yang dibunuh ketika berada dalam tahanan Fretilin pada Januari 1976, di pantai selatan Timor-Leste.

‡ Pembagian ini tidak sama dengan kelima divisi militer.

sangat berpengaruh. Pemegang posisi ini secara formal ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pada awalnya, warga Timor-Leste yang menduduki jabatan ini, meski selanjutnya semua (kecuali satu) pejabat yang ditunjuk adalah perwira militer.<sup>\*</sup> Sekwilda membidangi urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek.<sup>178</sup> Kedudukan yang sama juga terdapat pada tingkat kabupaten.

## Dewan Perwakilan Rakyat

154. Dewan Perwakilan Rakyat adalah bagian legislatif pada setiap tingkat pemerintahan di Indonesia. Lembaga ini terdapat di tingkat pusat (DPR), provinsi (DPRD Tingkat I), dan kabupaten (DPRD Tingkat II). Secara teoretis, ketua DPRD, bersama dengan gubernur, memegang kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi. Selama masa pendudukan di Timor-Leste, 80% jabatan di tiap perwakilan dikuasai tiga partai yang diizinkan negara.<sup>†</sup> ABRI secara otomatis mendapat jatah 20% kursi.

155. DPRD pertama di Timor-Leste dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. I/AD, 1976 tertanggal 4 Agustus 1976 dengan Guilherme Gonçalves sebagai ketuanya. Lembaga ini mempunyai 30 anggota, tidak ada satu pun yang dipilih. DPRD Tingkat II juga dibentuk. Mantan Wakil Bupati Viqueque, Armindo Soares Mariano, berkata kepada Komisi bahwa satu-satunya kriteria menjadi anggota DPR pada awal 1976 itu adalah penunjukan dan persetujuan dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida),<sup>‡</sup> yang terdiri atas pemerintah dan komandan militer tingkat kabupaten. Ia menambahkan:

*Pada waktu itu, mereka [Muspida] langsung mengangkat para anggota karena belum ada lembaga DPR, tidak ada juga pemilu. Di Tingkat II pun anggotanya ditunjuk. Memang ada lembaga DPR di sana tapi mereka itu hanya ditunjuk... semua... orang anu berasal dari desa anu dan kecamatan anu. Misalnya DPR di Viqueque pada waktu itu memerlukan 20 orang, jadi 20 orang ini diambil masing-masing empat orang dari lima kecamatan, dan mereka adalah tokoh-tokoh nonformal, liurai atau anak liurai yang agak menonjol, mereka itulah yang ditunjuk lalu duduk di sana.<sup>179</sup>*

156. Tidak ada catatan bahwa DPRD memberikan perhatian terhadap nasib rakyat Timor-Leste selama bencana kelaparan antara 1979 – 1980.<sup>180</sup> Bagaimana pun, pada 1981, eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pejabat Indonesia di Timor-Leste memberikan inspirasi kepada anggota DPRD setempat untuk menulis surat keluhan

---

<sup>\*</sup> Sekretaris Wilayah Daerah di Timor Timur adalah: Jose Bonifacio dos Reis Araújo (1976), J.R. Sinaga (ABRI), A.P. Kalangi (ABRI), Drs. Saridjo (ABRI), Antonio Freitas Parada, J. Hariwibowo (ABRI), Drs. Radjagarina Brahmana (ABRI).

<sup>†</sup> Golkar (Golongan Karya), PDI (Partai Demokrasi Indonesia), dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

<sup>‡</sup> Muspida secara teoretis adalah mekanisme konsultasi untuk melakukan koordinasi antara pemerintahan sipil dan komando teritorial militer dan kepolisian. Dalam praktiknya, muspida didominasi oleh militer.

kepada Presiden Soeharto.<sup>181</sup> Surat protes anggota DPRD tersebut, ditandatangani oleh anggota paling tua dan yang paling muda, mengungkapkan kemarahan terhadap rezim ekonomi yang diciptakan oleh penguasa pendudukan dan akibatnya terhadap penduduk Timor-Leste:

Situasi ekonomi rakyat Timor Timur sedang melewati tahap yang paling tragis sejak permulaan perang saudara... Cukup banyak bantuan untuk membangun ekonomi yang telah diterima...tapi rakyat Timor Timur belum merasakan manfaat dari produksi komoditas pertanian mereka seperti kopi, cendana, kemiri, kayu, tembaga, dan hasil bumi lainnya. PT Denok adalah perusahaan khusus yang berlokasi di Timor Timur untuk menyerap seluruh hasil ekonomi provinsi dengan imbalan jasa bagi Pemerintah Indonesia... Lima tahun setelah integrasi, sebagian besar penduduk belum bisa menikmati kondisi hidup yang layak.<sup>182</sup>

157. Laporan ini juga menyesalkan penyalahgunaan dana pembangunan oleh pejabat militer yang menduduki posisi tinggi di pemerintahan sipil. Surat tersebut menuduh Sekwilda, Kolonel AP (Paul) Kalangi, serta wakilnya, Kapten A. Azis Hasyam, telah menyelewengkan dana pembangunan yang dialokasikan langsung dari pemerintah pusat di Jakarta. Para anggota Dewan mengklaim mengetahui pengeluaran belanja “ratusan juta rupiah” yang mereka temukan “terang-terangan fiktif”. Surat itu juga menyatakan bahwa bantuan obat-obatan yang dikirim banyak ditemukan di toko-toko di Dili, sementara itu rumah sakit justru mengalami kekurangan persediaan obat-obatan. Akhirnya, anggota Dewan juga mengeluhkan bahwa untuk mendapatkan kerja di pemerintahan provinsi—lembaga yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Timor-Leste—seorang pelamar harus menjadi warga negara Indonesia. Pekerjaan pegawai negeri hanya tersedia bagi mereka yang mendukung pendudukan.\* Salah satu indikasi bagaimana pihak militer menghadapi pernyataan penentangan, bahkan dalam bentuknya yang paling halus, adalah ditahannya anggota dewan yang menulis surat tersebut.<sup>183</sup>

158. Pemilihan Umum diadakan setiap lima tahun di Indonesia. Pemilihan umum nasional yang pertama di Timor Timur diadakan pada 1982. Sebanyak 311.375 penduduk ikut memilih. Hasilnya benar-benar menipu dan pada awalnya menunjukkan lebih daripada 100 persen pemilih terdaftar memberikan suara mereka untuk partai pemerintah, yakni Golkar (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Sebagai hasil dari pemilihan umum, 36 orang memperoleh kursi di DPRD Tingkat I, sedangkan delapan orang mewakili Timor Timur di DPR Pusat. Pada tahun-tahun kemudian, tingkat pluralisme meningkat, dalam batasan yang dikontrol ketat oleh Orde Baru. Pada 1995, kursi DPRD Tingkat I Timor Timur bertambah menjadi 45. Pada pemilihan umum tahun itu, Golkar memenangi 20 kursi; PDI, lima; PPP, dua; sementara ABRI memperoleh jatah sembilan kursi.

\* Diskriminasi sistemik dalam perekrutan pegawai ini sama dengan persyaratan zaman Orde Baru, saat semua pegawai harus menjadi anggota Golkar yang telah bersumpah untuk melindungi ideologi Pancasila.

Tabel 4: Komposisi anggota DPR Provinsi Timor Timur berdasarkan fraksi, 1980-1997						
Tahun	Fraksi PPP	Fraksi Golkar	Fraksi PDI	Fraksi ABRI	Fraksi non-ABRI	Total Anggota DPR
1980	0	25	0	0	0	25
1981	0	24	0	0	0	24
1982*	0	32	0	4	0	36
1987*	0	34	2	9	0	45
1988	0	34	2	9	0	45
1989	0	33	2	9	0	44
1990	0	34	2	9	0	45
1991	0	34	2	9	0	45
1992*	2	29	5	9	0	45
1997*	1	30	5	9	0	45

\*Tahun Pemilu.  
 Sumber: DPRD Tingkat I Timor Timur

### Lembaga Administrasi Pemerintah: program nasional di tingkat provinsi

159. Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru sangat tersentralisasi. Sebagian besar keputusan kebijakan diambil di Jakarta sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional terstruktur. Ketika itu, Indonesia menerapkan Repelita sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal dan pembangunan. Para menteri yang berkantor di Jakarta, departemen, dan biro pemerintah menerapkan kebijakan tersebut melalui kantor-kantor mereka yang berada di tingkat provinsi. Diperlukan waktu beberapa tahun sebelum struktur ini dapat beroperasi di Timor Timur karena fokus utama Indonesia adalah operasi militer. Selain itu, Indonesia perlu merekrut dan melatih pejabat pemerintah. Sejak awal, Timor Timur dikendalikan oleh militer. Pada tahun-tahun awal pendudukan, tidak seperti wilayah lain di Indonesia, Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) membentuk tim yang secara langsung memerintah Timor Timur. Timor Timur diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri pada 1978, yang membuat terbentuknya sistem pemerintahan yang setara dengan praktik pemerintahan Indonesia pada umumnya.\* Namun, militer tetap memegang kontrol utama atas pemerintahan. Militer memegang posisi kunci

\* Bahkan setelah disetarakan dengan praktik pemerintahan yang biasa di Indonesia, Timor Timur tetap merupakan kasus yang bersifat khusus. Timor Timur mendapatkan anggaran khusus langsung dari pemerintah pusat. Di samping itu, Timor Timur juga menerima dana khusus yang cukup besar melalui Instruksi Presiden (Inpres). Selain itu, anggaran nasional memiliki jalur anggaran khusus bagi Timor Timur (butir anggaran 16).

dalam pemerintahan sipil dan punya wewenang veto atas penunjukan jabatan. Ini memberinya kekuasaan besar, khususnya atas perekonomian provinsi, tetapi juga atas penyusunan kebijakan lokal.

160. Begitu integrasi secara resmi terjadi pada Juli 1976, militer Indonesia mulai memberlakukan standar-standar sesuai dengan yang berlaku dalam struktur Indonesia. Pada 14 Agustus 1976, Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadikan Timor Timur sebagai daerah operasi militer dalam negeri dengan mendirikan Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan Timor Timur (Kodahankam Timor Timur) yang beroperasi di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan.<sup>184</sup> Dokumen kementerian menyebutkan bahwa:

Komando Daerah Pertahanan Keamanan Timor Timur dibentuk dengan maksud untuk membangun landasan bagi Pembinaan dan Pengembangan Pertahanan dan Keamanan di Timor Timur selama “masa transisi” sampai akhir Repelita Kedua [April 1979], serta untuk menjalankan Pembinaan dan Pengembangan Pertahanan dan Keamanan Nasional.<sup>185</sup>

161. Subbagian mengenai ABRI pada Bagian 4 ini telah membahas proses ini secara lebih terperinci. Pada dasarnya, militer membentuk struktur teritorial yang memperkenalkan sistem pos-pos dan komando militer serta polisi, yang sejajar dengan pemerintahan sipil sampai tingkat desa.

162. Dalam kurun beberapa tahun pertama pendudukan Indonesia, Jakarta memerintah Timor-Leste secara langsung. Pada 1976 – 1977, Tim Koordinasi Pusat Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tanggung jawab atas program dan koordinasi pendidikan. Hal itu mencerminkan fokus awal rezim pendudukan pada pelatihan bahasa, agar orang Timor-Leste dapat berasimilasi dengan negara Indonesia.<sup>186</sup> Di Timor-Leste, tim ini bekerja melalui Tim Pendamping Pendidikan dan Kebudayaan.

163. Pada 1978, tim yang lebih besar dibentuk untuk menjalankan pemerintahan, yang dinamai Tim Pelaksana Pembangunan Pusat, TPPP. Pelaksananya terdiri atas personel dari lembaga pemerintah di Jakarta, yang diketuai oleh Jenderal Benny Moerdani. Tim ini bekerja melalui Tim Pelaksana Pembangunan Daerah atau TPPD, yang secara formal diketuai oleh gubernur tapi sebenarnya di bawah kendali Kolonel Kalangi, yang saat itu menjabat sekwilda.<sup>187</sup> Kebanyakan sektor pemerintahan, seperti keamanan dan ketertiban, politik, informasi, komunikasi, pengendalian jumlah penduduk dan perumahan, tenaga kerja, PKK, dan kegiatan keagamaan, langsung berada di bawah pengawasan langsung TPPP Jakarta. Pemerintahan setempat bertanggung jawab hanya atas lima sektor: pendidikan dasar, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, dan kesejahteraan sosial.<sup>188</sup>

164. Setelah 1978, ketika kendali pemerintahan Timor Timur secara resmi diserahkan dari Departemen Pertahanan kepada Menteri Dalam Negeri, Indonesia mendirikan lebih banyak kantor-kantor pemerintah. Fokusnya adalah pada

pendidikan dan informasi publik. Kantor pemerintah yang pertama kali beroperasi adalah kantor pendidikan dasar, yang dibuka pada 1978. Selain bahasa, fokus awal yang lain adalah informasi, dan pada 1978 Departemen Penerangan Timor Timur memasang pemancar televisi di Marabia, di perbukitan ke arah selatan dekat kota Dili. Departemen ini membagikan pesawat televisi ke seluruh Timor-Leste untuk memastikan bahwa siaran langsung dapat ditonton.<sup>189</sup>

165. Pada akhir 1970, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai berfungsi. Lembaga ini memusatkan diri pada infrastruktur, bangunan sekolah dasar, dan sekolah keguruan. Pada 1979, Departemen Pendidikan terbentuk, sebagai proses yang terpisah dengan pembentukan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Timor Timur.<sup>190</sup> Ketika Pelita ketiga dimulai pada April 1979, sebagian Timor Timur dimasukkan dalam mekanisme perencanaan nasional. Pada permulaan Pelita keempat, pada 1984, Timor Timur menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan dan penerapan kebijakan nasional Indonesia.

166. Pada awal 1980-an, Indonesia mengembangkan struktur pemerintahan yang baku di Timor-Leste. Indonesia membentuk tiga kantor yang biasanya berada di tingkat provinsi. Yang pertama dari tiga kantor ini adalah Kantor Wilayah (Kanwil). Kantor Wilayah merupakan kantor penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, terintegrasi secara vertikal dengan kantor pusat, dan bertanggung jawab untuk penerapan kebijakan secara langsung, misalnya kebijakan perpajakan dan industri.<sup>191</sup> Di Timor-Leste, kantor-kantor ini kebanyakan dikepalai oleh pejabat militer yang diperbantukan pada pemerintah sipil (dikaryakan),<sup>†</sup> dan kebanyakan stafnya berasal dari luar Timor-Leste.<sup>192</sup> Di antara kantor dinas yang berkuasa adalah Bappeda. Sebagai titik koordinasi utama untuk proyek-proyek pemerintah, Bappeda mengalokasikan proyek “basah” kepada pengusaha, militer, serta pejabat pemerintah.<sup>193</sup>

167. Kelompok kantor administrasi yang lain adalah satuan pemerintah yang disebut dinas,<sup>\*</sup> yang sebagian juga memiliki kantor di tingkat kabupaten. Untuk kantor dinas, proporsi staf yang berasal dari Timor-Leste adalah lebih tinggi,

\* Kanwil “vertikal” serta lembaga lain di bawah menteri-menteri kabinet nasional mencakup Pertambangan dan Energi, Pertanian, Koperasi, Pendidikan dan Kebudayaan, Industri, Transmigrasi, Perdagangan, Kesehatan, Kehutanan, Perhubungan, Informasi, Pekerjaan Umum, Sosial, Ketenagakerjaan, Pembangunan Perdesaan, BP7, dan BKKBN. Cabang lain termasuk Dolog, Bappeda, Inspektorat Provinsi, Badan Pusat Statistik, serta Sospol.

† Pegawai yang dikaryakan adalah perwira militer aktif yang diperbantukan untuk tugas administrasi sebagai bagian dari doktrin dwifungsi ABRI yang memberinya peran dalam bidang politik dan pembangunan serta pertahanan. Lihat pembahasan bagian militerisasi masyarakat Timor Leste pada segmen 4.3 di atas. Pada akhir masa pendudukan, pegawai yang dikaryakan mengisi 140 posisi kunci di pemerintahan Timor Timur, termasuk 19 pemimpin kantor administrasi di tingkat provinsi, wakil gubernur, dan dua posisi asisten gubernur. Sekwilda, kepala bidang sospol (Kakansospol), dan ketua Bappeda semuanya berasal dari militer. Di tingkat kabupaten, mereka mengontrol 64 posisi, termasuk tiga dari 13 posisi bupati. Lihat dokumen militer yang disita pada 1998, “Rekapitulasi Karyawan ABRI yang bertugas di eksekutif + legislatif”, hal 16 dan 17.

‡ Dinas termasuk Pertanian, Peternakan, Pendidikan dan Kebudayaan, Perikanan, Kehutanan, Perpajakan Daerah, Pertambangan, Perkebunan, Kesehatan Publik, Pekerjaan Umum, Sosial, dan Pariwisata.

kadang-kadang mencapai 60%.<sup>194</sup> Meskipun pemerintah daerah tingkat provinsi bertanggung jawab atas satuan-satuan operasional ini, tumpang-tindih yang luas di antara kanwil dan dinas berakibat bahwa pemerintahan lokal tidak lain adalah “perpanjangan pemerintahan pusat”.<sup>195</sup>

## Pemerintah kabupaten dan kecamatan

168. Pemerintah kabupaten dikepalai oleh bupati. Bupati diangkat oleh gubernur. Bupati bertanggung jawab atas pemerintahan kabupaten serta bertanggung jawab melakukan koordinasi atas semua kecamatan yang berada di bawah wilayah kabupaten bersangkutan. Permukiman penduduk di Timor-Leste yang jarang, ditambah lagi dengan banyaknya pembagian pemerintah kabupaten dan kecamatan, berarti bahwa provinsi ini diatur secara berlebihan.

169. Administrasi pemerintah di tingkat kabupaten terutama terdiri atas kantor-kantor dinas; misalnya, ada kantor dinas untuk administrasi tenaga kerja, layanan publik, dan infrastruktur. Segala sesuatunya dikoordinasikan dan diterapkan melalui provinsi. Di antara kantor dinas di tingkat kabupaten, proporsi pegawai yang berasal dari Timor-Leste relatif tinggi, sekitar 60 persen, namun kebanyakan dari mereka adalah pegawai golongan rendah.<sup>196</sup> Setelah Timor Timur dibagi menjadi tiga daerah administrasi pada 1987, seorang asisten gubernur ditugaskan untuk setiap daerah, untuk kemudian melakukan koordinasi atas semua bupati.

170. Pada tahun-tahun awal pendudukan, sangat sedikit jumlah calon yang memiliki kualifikasi untuk jabatan layanan publik, dan hal ini memengaruhi pengangkatan pada banyak posisi. Laporan yang dibuat oleh mantan bupati Lautém pada tahun-tahun awal pendudukan menunjukkan kesulitan yang dihadapi pihak militer dalam menjalankan administrasi:

*Pegawai negeri dari zaman Portugal langsung diangkat. Harus ada persetujuan dari ABRI... Orang-orang di antara kami yang turun [dari gunung] lebih dahulu dan yang dulu adalah pegawai negeri juga langsung diangkat, apakah dia dulu Fretilin, Apodeti, atau UDT...pokoknya angkat...Tapi tiap-tiap kecamatan ada camatnya. Staf-staf ada orang dari pusat untuk mendampingi kami. Mereka juga ABRI... Mereka membantu kami karena kami tidak tahu bahasa Indonesia.<sup>197</sup>*

171. Semua, kecuali satu, bupati pertama berasal dari, atau berhubungan dengan, partai politik Apodeti atau UDT. Sebagian, seperti Claudio Vieira, adalah mantan anggota Partisan. Pengangkatan tampaknya didasarkan pada campuran antara keputusan karena kebutuhan akan personel yang terampil, dan kepentingan militer untuk keperluan pengontrolan dan kepatuhan. Penunjukan penting yang lain, seperti untuk posisi sebagai camat, dilakukan oleh bupati bersama Muspida\*—

\* Pada tingkat kabupaten, Bupati, Danrem, dan Kapolres bertemu pada rapat Muspida.

Musyawarah Pimpinan Daerah.<sup>198</sup> Mantan Wakil Bupati Viqueque, Armindo Soares Mariano, menjelaskan prosedur tersebut kepada Komisi:

*Memang dari Tingkat II yaitu Bupati bersama Muspida, yang mengusulkannya. Pada waktu itu kan tidak ada hal semacam itu, dan hanya meminta kepada Bupati dan kriterianya itu adalah bahwa orang ini siapa-siapa. Jadi dari Bupati yang mengusulkannya, dan usulannya itu dari Bupati kemudian ditandatangani oleh Dandim sebagai Ketua Muspida dan Bupati juga ikut menandatangani. Setelah itu dikirim ke tingkat provinsi, jadi setelah itu turun SK Gubernur.<sup>199</sup>*

172. Selama masa pendudukan Indonesia, militer mengisi beberapa kali jabatan bupati, meskipun orang Timor-Leste cenderung ditunjuk menduduki posisi itu, seperti halnya dengan gubernur.

Tabel 5: Bupati berdasarkan asal-usul dan afiliasi, 1976 – 1999					
Distrik	Tanggal	Bupati	Partai	Asal	Kebangsaan
Aileu	Mei 1976 – 1989	Abel Dos Santos F.	UDT	-	Timor
	1989 – 1994	Fernão Verdial	-	Ainaro	Timor
	1994	Waluyo	ABRI	-	Indonesia
	1994 – 1999	Suprpto Tarman	ABRI	-	Indonesia
Ainaro	Mei 1976 – 1984	Moises Da Silva Barros	Apodeti	Ainaro	Timor
		Letkol. H Hutagalung	ABRI	-	Indonesia
		José A B dos Reis Araújo	Apodeti	Ainaro	Timor
	1994 – 1999	Norberto de Araújo	Apodeti	Ainaro	Timor
	1999	Evaristo D. Sarmiento	UDT	Maubisse	Timor
Ambeno	Mei 1976 – 1984	Jaime dos R de Oliveira	UDT	Same	Timor



	1984 – 1989	Letkol. Imam Sujuti	ABRI	-	Indonesia
	1994 – 1999	Vicente Tilman PD Filomeno Mesquita	Apodeti Apodeti	Viqueque Ambeno	Timor Timor
Baucau	Mei 1976 – 1982	Abel da Costa Belo	Apodeti	Baucau	Timor
	1982 – 1987	Kol. I Gusti Ngurah O.	ABRI	-	Indonesia
	1987 – 1992	Drs. Herman Sediono	ABRI	-	Indonesia
	1992 – 1999	Virgilio Dias Marçal	UDT	Baucau	Timor
Bobonaro	Mei 1976 – 1984	João Da Costa Tavares	UDT	Bobonaro	Timor
	1984 – 1989	João Da Costa Tavares	UDT	Bobonaro	Timor
	1989 – 1992(?)	Mariano Lopes da Cruz	UDT	Manatuto	Timor
	1992(?) – 1999	Guilherme dos Santos	UDT	Bobonaro	Timor
Covalima	Mei 1977 – c. 1981	Américo da Costa Nunes	Apodeti	Bobonaro	Timor
	c. 1981 – 1989	Rui Emiliano T Lopes	UDT	Suai	Timor
		Rui Emiliano T Lopes	UDT	Suai	Timor
	1994 – 1999	Drs. Herman Sediono	ABRI	-	Indonesia
Dili	Mei 1976 – 1984	Mario Sanches da Costa	eks-Fretilin	Laleia	Timor
	1984 – 1989	Raimundo Sarmiento	UDT	Manatuto	Timor
		Armindo Soares Mariano	Apodeti	Viqueque	Timor
	1994 – 1999	Domingos MD Soares	-	Manatuto	Timor

Ermera	Mei 1976 - 1984	Tomas Aquino Gonçalves	Apodeti	Atsabae	Timor
	1984-1989	Tomas Aquino Gonçalves	Apodeti	Atsabae	Timor
		Letkol. Inf. Hidayat	ABRI	-	Indonesia
	1994-1999	Constantino Soares	-	Ermera	Timor
Liquiça	Mei 1977-1984	Francisco dos Santos Ribeiro	Apodeti	Liquiça	Timor
	1984 – 1989	Jaime Remedios de Oliveira	UDT	Same	Timor
		Gaspar Sarmiento	UDT	Liquiça	Timor
	1994 – 1999	Leoneto Martins	Apodeti	Maubara	Timor
Lautém	Mei 1976 – 1985	Claudio Vieira	Apodeti	Moro	Timor
	1985 – 1990	Letkol. Hendrikus	ABRI	-	Indonesia
	1990 – 1995	José Valente	Fretilin	Lore	Timor
	1995 – 1999	Edmundo Conceição Da Silva	Apodeti	Moro	Timor
Manatuto	Mei 1976 – 1984	Luis Maria da Silva	Fretilin	Manatuto	Timor
	1984 – 1989	Elias Enes Carceres	Kota	Manatuto	Timor
		Abilio José Osorio	Apodeti	Laclubar	Timor
	1994 – 1999	Soares Vidal Doutel Sarmiento	Apodeti	Manatuto	Timor
Manufahi	Mei 1976 – 1984	Alexandrino Borromeo	Apodeti	Manufahi	Timor
	1984 – 1989	Tomas Correia	UDT	Manatuto	Timor
		Nazario Andrade	UDT	Manatuto	Timor
	1995 – 1999	Nazario Andrade	UDT	Manatuto	Timor
Viqueque	Mei 1976 – 1984	Jaime dos Santos Carvalho	Apodeti	Viqueque	Timor
	1984 – 1989	Mayor Syarif Hidayat	ABRI	-	Indonesia
	1989 – 1994	Y. Hendro S.	ABRI	-	Indonesia
	1995 – 1999	I Ketut Lunca	ABRI	-	Indonesia
	1999	Martinho Fernandes	Apodeti	Viqueque	Timor

Sumber: CAVR

## Pemerintah tingkat desa

173. Desa-desanya di Indonesia diperintah oleh seorang kepala desa, yang berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pada zaman Portugis berkuasa, desa (*suco*) di Timor-Leste sering diperintah oleh *liurai* setempat. Pada masa pendudukan Indonesia, seperti halnya di sebagian besar daerah di Indonesia, pemimpin adat setempat sering merasa ditekan oleh negara.<sup>200</sup>

174. Setelah peristiwa pemindahan dan pemukiman penduduk secara besar-besaran antara 1978 dan awal dekade 1980, Indonesia mulai membangun perdesaan di Timor-Leste. Pada 1980, Pemerintah Indonesia membentuk LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 25, dan Indonesia menetapkan organisasi tersebut di Timor Timur pada 1982. Pengurus LKMD berasal dari desa, bertugas menjalankan tujuan pembangunan negara di tingkat desa.

175. Lembaga penting lain dari pemerintah desa adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Ini merupakan koperasi para petani yang dimonopoli pemerintah untuk menjual hasil pertanian. Meskipun koperasi ini bertujuan meningkatkan pendapatan dan menjamin pasar, dalam praktiknya tujuan yang baik ini sering disalahgunakan oleh berbagai macam monopoli oleh pemerintah. Inilah masalah yang terjadi di Timor Timur, di mana KUD digunakan untuk membeli kopi dari petani dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasar, dan dari praktik ini monopoli kopi PT Denok yang didukung militer mendapat keuntungan yang sangat besar (lihat pembahasan mendalam di Bab 7.9: Hak ekonomi dan sosial). Pengamat ekonomi Indonesia, Profesor Mubyarto, memberikan komentar atas dampak praktik ini terhadap industri kopi dan kredibilitas pemerintah sipil di Timor Timur:

Stagnasi ekonomi kopi adalah terutama akibat pengaturan oleh monopoli swasta untuk membeli kopi melalui sistem resmi Koperasi Unit Desa (KUD). Di mata masyarakat, monopoli swasta yang bekerja melalui koperasi desa ini melemahkan kredibilitas pemerintah, khususnya berkenaan dengan kemampuannya (atau bahkan integritasnya) dalam pembangunan perdesaan.<sup>201</sup>

176. Para komandan militer dan pejabat tinggi pemerintah seperti gubernur diuntungkan karena kontrol mereka terhadap industri kopi. Mantan gubernur, Mario Carrascalão, telah menjelaskan tentang pembagian keuntungan yang besar di atas kerugian para petani Timor-Leste, dan bagaimana dana 'komisi kopi' dibagi antara militer di tingkat kabupaten dan provinsi serta pejabat sipil—gubernur, jaksa, pemimpin militer, dan yang lain.<sup>202</sup>

177. Pada 1984, program pembangunan yang dijalankan oleh militer yang disebut 'ABRI Masuk Desa' atau AMD diluncurkan.<sup>203</sup> ABRI berpendapat hal itu merupakan sumbangan berharga bagi pembangunan desa oleh pasukan teritorial, sedangkan kritik atas program tersebut menganggap bahwa program ini merupakan cara lain bagi militer untuk tetap dapat melakukan pengawasan terhadap warga.

178. Tingkat kontrol oleh militer atas pemerintah dan ekonomi setempat, dan juga masalah keamanan, mengakibatkan banyak orang Timor-Leste sangat menderita, termasuk sebagian orang yang pada mulanya mendukung intervensi dan pendudukan oleh Indonesia. Tim ekonomi Indonesia menjelaskan dampak militer atas perekonomian provinsi:

Karena campurtangan militer yang besar dalam urusan ekonomi dan pembangunan, penduduk setempat cenderung tidak menghormati mereka. Bahkan di antara kalangan elite Timor Timur ada yang begitu membenci militer karena mereka bertanggung jawab atas stagnasi ekonomi wilayah tersebut.<sup>204</sup>

## Layanan sipil

179. Indonesia membangun angkatan pegawai negeri yang besar di Timor Timur, yang bila dibandingkan dengan angkatan pegawai negeri nasional, ukuran relatifnya terhadap jumlah penduduk nyaris dua kali lebih besar.\* Pada 1981, terdapat 780 pegawai negeri. Pada 1997, terdapat lebih daripada 33.602 pegawai negeri.<sup>205</sup> Dari jumlah ini, 18.000 orang bekerja di ibukota kabupaten, dan sisanya sebanyak 15.300 bekerja di Dili. Banyak di antara mereka adalah guru dan pegawai kesehatan. Banyak pegawai negeri di Timor Timur direkrut dari wilayah lain di Indonesia. Mereka pada umumnya memegang posisi yang lebih penting dibandingkan dengan rekan Timor-Leste mereka. Pelamar kerja yang berasal dari Timor-Leste untuk jabatan pemerintahan harus menunjukkan bukti sebagai warga negara Indonesia. Mereka pada umumnya diperlakukan dengan penuh kecurigaan dan selalu harus melewati saringan untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada negara Indonesia dan doktrinnya, Pancasila. Divisi khusus ABRI yang dikenal dengan sebutan Komando Taktis (Kotis) bertugas melakukan penyaringan.† Kecurigaan mendalam terhadap personel dari Timor-Leste, yang ditunjukkan dengan adanya proses ini, merupakan faktor penghambat bagi para personel Timor-Leste ini untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi sebagai pegawai negeri.<sup>206</sup>

180. Pemerintahan sipil Indonesia di Timor Timur, hampir selama seluruh periode pendudukan, sangat tunduk pada pemerintah militer dan strukturnya. Militer mendominasi semua aspek pemerintahan pada tahun-tahun awal pendudukan

\* Pegawai negeri sipil sebanyak 3,09 persen dari penduduk, dengan 2,12 persen di tingkat nasional. [Badan Pusat Statistik, *Timor Timur Dalam Angka*, Dili, 1993.]

† Pegawai Kotis dapat ditemukan di setiap tingkat struktur komando militer dan bertanggung jawab atas intelijen harian dan pengawasan penduduk. Pada akhir 1970-an, mereka bertugas untuk melakukan penyaringan terhadap warga yang turun dari pergunungan. Setiap orang yang akan mengajukan izin kerja, izin perjalanan, KTP, atau bahkan surat nikah, mula-mula harus mengisi 15 halaman pertanyaan di depan pegawai Kotis. Pertanyaan yang diajukan mencakup kehidupan pribadi individu secara terperinci dan silsilah keturunan, juga mencakup afiliasi politik seseorang, sikap dan reaksi mereka terhadap gerakan bersenjata UDT pada Agustus 1975, invasi Indonesia pada Desember 1975, integrasi, Fretilin, dan lain-lain. Jawabannya mengikat secara hukum, dan pernyataan yang "salah" dapat dikenakan hukuman.

ketika pembungkaman terhadap resistansi merupakan prioritas utama dan operasi militer penuh ketika itu sedang dijalankan. Ketika situasi ini mengendur pada akhir dekade 1970, militer gagal menghancurkan resistansi bersenjata secara total, dan obsesinya untuk mengontrol warga sipil berakibat pada timbulnya penguasaan struktur pemerintah militer di segala bidang hingga di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, personel militer memegang jabatan kunci dalam pemerintah sipil itu sendiri. Banyak pejabat yang menggunakan jabatan ini untuk keuntungan mereka pribadi. Hasilnya adalah pemerintahan ganda, pemerintahan yang berlebihan, dan dampak yang menindas terhadap ekonomi dan pembangunan. Pemerintah sipil juga dikorbankan karena kedekatannya dengan ABRI.

181. Rezim Orde Baru membuat proses pemerintahan sangat tersentralisasi, yang berarti bahwa provinsi yang jauh seperti Timor Timur jauh dari pengambilan kebijakan dan kurang memiliki kekuasaan atas masa depan mereka sendiri. Hal ini diperburuk oleh konteks militer dari konflik di daerah ini. Rezim ini juga memolitisasi pemerintah sipil, dan hal ini terjadi lebih kuat lagi dalam konteks Timor Timur, di mana warga Timor-Leste dengan latar belakang prointegrasi lebih disukai dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap warga Timor-Leste oleh pihak penguasa Indonesia berakibat pada jatuhnya posisi—khususnya posisi senior—dalam pemerintahan sipil yang didominasi oleh warga Indonesia yang dikirim ke wilayah ini.

182. Pemerintahan sipil di Timor-Leste benar-benar lemah dan kurang memiliki integritas. Dalam konteks konflik yang terus-menerus dan masyarakat yang sangat termiliterisasi selama dua puluh empat tahun pendudukan Indonesia, efektivitasnya sebagai institusi sipil yang profesional yang memberikan pelayanan kepada rakyat di daerah tersebut jelas terbatas. Hal ini dengan sendirinya menghalangi perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia warga Timor-Leste.

183. Lagipula, pada akhir 1998 dan selama 1999, pelayanan publik Indonesia terpolitisasi secara mendalam dalam hal persoalan penentuan nasib sendiri, baik sebelum maupun setelah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei. Anggaran pemerintah dipakai untuk mendukung kampanye pro-otonomi, termasuk disalurkan kepada kegiatan milisi-milisi (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

### Catatan akhir

1. Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal. 7-17; James Dunn, *East Timor: Rough Passage to Independence*, Longueville Books, NSW, 2003, hal. 254; Robert Lowry, *The Armed Forces of Indonesia*, Allen and Unwin, St. Leonards, NSW, 1996, hal. 315-316.
2. Sebagian besar informasi di bagian ini diambil dari Ulf Sundhussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, Oxford University Press, Oxford, 1982, hal. 1-50.
3. Ian MacFarling, *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces*, Australian Defence Studies Center, University of New South Wales, NSW, 1996, hal. 114.

4. Robert Cribb. (2001). "How Many Deaths? Problems in the statistics of massacre in Indonesia (1965-1966) and East Timor (1975-1980)". dalam *Violence in Indonesia*. Ingrid Wessel dan Georgia (peny.). Wimhöfer. Hamburg, Abera: 2001, hal: 82-98.
5. Dunn, hal. 159.
6. Lowry, hal. 135.
7. Macfarling, hal. 87.
8. Lowry, hal. 20.
9. Ibid, hal. 94.
10. Ibid, hal. 110.
11. Ulf Sundhaussen, "The Inner Contradiction of the Suharto Regime: A starting point for a withdrawal to the barracks" dalam David Bourchier dan John Legge (ed.), *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, Centre for Southeast Asian Studies Monash University, Victoria, 1994, hal. 277-278.
12. Harold Crouch, "The Trend to Authoritarianism: The Post-1945 Period" dalam Harry Aveling (ed.), *The Development of Indonesian Society*, University of Queensland Press, St. Lucia, 1979, hal. 197.
13. Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1978. hal. 274.
14. Crouch, hal. 280.
15. *Department of State Annual Report on Military Expenditures, 1998*, Submitted to the Committee on Appropriations of the U.S. Senate and the Committee on Appropriations of the U.S. House of Representatives by the Department of State on February 19, 1999.
16. Douglas Kammen, "Notes on the Transformation of East Timor Military Command and Its Implications for Indonesia", *Indonesia* 67, April 1999, Cornell University South East Asia Program (SEAP), Ithaca, hal. 64; Lowry, hal. 23
17. Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hal. 273.
18. Macfarling, hal. 100.
19. Ibid, hal. 130.
20. Ibid, hal. 145.
21. Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hal. 275-77.
22. Kesaksian Jusuf Wanandi pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri serta Komunitas Internasional , 15-17 Maret 2004; Lihat juga laporan ini mengenai hak ekonomi dan sosial.
23. Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hal. 299.
24. Ibid, hal. 300.
25. Lowry, hal. 47-48.
26. Arnold C Brackman, *Indonesia: Suharto's Road*, American-Asian Educational Exchange, 1973, hal. 29.
27. Macfarling, hal. 139.
28. Ibid, hal. 92.
29. Kepres 19/1969, 3 Maret, dikutip dalam Macfarling, hal. 92.
30. Lowry, hal. 70-72.
31. Ken Conboy, *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces*, Equinox Publishing, Jakarta, 2003, hal. 197.
32. Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Markas Besar TNI, *Sejarah TNI Jilid IV (1966-1983)*, Jakarta, 2000, hal. 145; Conboy, hal. 199
33. Surat Keputusan Menhankam/Pangab Skep/1063/VIII/1975, yang ditandatangani oleh Jenderal M. Panggabean.
34. Surat Keputusan Menhankam/Pangab Skep/1063/VIII/1975.
35. Ibid.
36. Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor. KEP/03/II/1977 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Daerah Pertahanan-Keamanan Timor Timur (Kodahankam Tim-Tim, 18 Februari 1977.
37. Surat Keputusan Menhankam/Pangab dan Mendagri, Nomor KEP/35/X/1976 – Nomor 261, Tahun 1976 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Staf Koordinasi Kewilayahan Provinsi Timor-Timur, 26 Oktober 1976.
38. Telegram Menhankam/Pangab Nomor: STR/969/1978 tertanggal 11 September 1978 tentang Persiapan Likwidasi [sic] Kodahankam Tim-Tim.

39. Jiwa Atmadja, *TNI Kembali ke Jadidiri: Profesionalisme Kodam IX/Udayana*, Penerbit Tabloid Mingguan Taksu, Denpasar, 2000, hal. 65.
40. Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Nomor. Kep/23/X/1978 tentang Normalisasi Penyelenggaraan Pertahanan-Keamanan di Daerah Timor Timur dan pembubaran Kodahankam Tim-Tim, 12 Oktober 1978.
41. *Kolakops Timor-Timur Dalam Gambar dan Peristiwa Tahun 1992-1993*, Dili: tanpa penerbit, 1993, hal. 182.
42. Tapol, Occasional Report No. 26, Oct 98, "East Timor under the Indonesian Jackboot, An Analysis of Indonesian Army Documents" <http://tapol.gn.apc.org/reports/ REAST.htm>, diunduh pada 18 Juni 2005
43. Dokumen yang dikirim oleh Komandan Korem (Danrem) 164/Wiradarma kepada Komandan Kodim (Dandim) nomor 1627 sampai dengan 1639: TR Dan Kolak Ops No: TR/661/IX/1983 28 September 1983, seperti dapat dibaca, misalnya, dalam berkas pengadilan terhadap David Dias Ximenes (No. 22/PID/B/84/PN.DIL).
44. Departemen Pertahanan dan Keamanan, Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/01/IV/1979 tentang Kegiatan Bidang Operasi Tempur Tahun 1979-1980, 23 April 1979.
45. Surat Keputusan Pangab Nomor Kep/17/P/IX/1984, 19 September, 1984, dikutip dalam 35 Tahun Dharma Bakti Kostrad, hal. 84.
46. *35 Tahun Darma Bakti Kostrad* [tidak ada informasi penerbitan], hal. 91.
47. Douglas Kammen, "Notes on the Transformation of the East Timor Military Command and its Implications for Indonesia," *Indonesia* 73, April 2002, hal. 61-76.
48. Kepala Tim Analis Intelijen kepada Panglima Kolakops, Memo Intelijen nomor R/63/MI/VIII/1992, tertanggal 11 Agustus 1992, yang dikutip dalam Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor. An Analysis of Its Secret Documents," *Indonesia* 72, October 2001, Cornell University South East Asia Program, (SEAP), Ithaca, hal. 28-29.
49. Moore, hal. 28.
50. Ibid, hal. 26-29.
51. Tapol, Occasional Report No. 26.
52. Douglas Kammen, "The Trouble with Normal: The Indonesian Military, Paramilitaries and the Trial in East Timor", dalam *Violence and the State in Suharto's Indonesia*, Benedict R.O.G Anderson South East Asia Program, Cornell University, South East Asia Program (SEAP), Ithaca, NL 2001, hal. 11.
53. Komando Daerah Militer IX/Udayana, Komando Resort Militer 164, Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan Posisi, November 1997; Komando Daerah Militer IX/Udayana, Komando Resort Militer 164, Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan, Juli 1998.
54. Tapol, Occasional Report No. 26.
55. Ibid.
56. Catriona Drew, "The East Timor Story: International Law on Trial", *European Journal of International Law*, 1990-2004, Academy of European Law, New York.
57. Surat Menhankam/Panglima TNI kepada Presiden RI tentang Perkembangan Lanjut Situasi Timtim dan Saran Kebijaksanaan Penanganannya, No. R/511/P-01/03/14 Set, ditandatangani oleh Jenderal Wiranto, tertanggal 6 September 1999.
58. Petunjuk Panglima TNI, No. 02/P/IX/1999, yang ditandatangani oleh Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tanpa tanggal tapi tampaknya dikeluarkan pada 6 September September 6.
59. Surat 'R/544/P/IX/1999' yang ditandatangani Jenderal Wiranto, tertanggal 20 September 1999.
60. Tomas Goncalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
61. Pidato Uskup Belo saat penandatanganan Pact of National Unity, bertepatan dengan persiapan kampanye pemilihan umum 2001 untuk Constituent Assembly, Juli 2001, arsip Pendidikan Kewarganegaraan Timor-Leste UNDP.
62. Mario Carrascalão dan Tomas Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
63. José Ramos-Horta, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

64. Xanana Gusmão, João Carrascalão, dan Mari Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
65. Mario Carrascalão dan Mari Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
66. Tomas Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; wawancara dengan Tomas Gonçalves, Dili, 23 Oktober 2003.
67. Wawancara dengan Tomas Gonçalves, anggota pendiri Apodeti, Dili, 23 Oktober 2003; Conboy, *Kopassus*, hal. 206.
68. Pernyataan HRVD # 04599 dan 02491.
69. Wawancara SCU dengan Tomas Gonçalves, 8 Agustus 2000, hal. 4.
70. Wawancara SCU dengan Tomas Gonçalves, 8 Agustus 2000, hal. 5; Conboy, *Kopassus*, hal. 240.
71. Tomas Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
72. Pernyataan HRVD #01689; wawancara CAVR dengan Manuel de Oliveira, Alas, 19 Oktober, 2003.
73. Wawancara SCU dengan Tomas Gonçalves, 8 Agustus 2000, hal. 5; pernyataan HRVD nomor 01108-01; 01123-01; 01794-01; 04470-01; 02525-01; 06410-08; 01748-03; 05018-01; 03551-01.
74. Wawancara T.Sherman dengan João Viegas Carrascalão, 13 Maret 1996, hal. 128-129, 132.
75. Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, St. Lucia, Queensland: University of Queensland Press, 1978, hal. 164; Helen Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, Yayasan HAK & Sahe Institute for Liberation, Dili 2000, hal. 195.
76. Wawancara SCU dengan Tomas Gonçalves, 8.8.2000; Conboy, *Kopassus*, hal. 246.
77. Asvi Warman Adam, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2003.
78. Tomas Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
79. Wawancara CAVR dengan Manuel de Oliveira, Alas, 19 Oktober 2003; wawancara CAVR dengan Rui Lopes, 31 Oktober 2003; wawancara CAVR dengan Tomas Gonçalves, 23 Oktober 2003. Narasi yang berbeda dapat dibaca dalam pernyataan tertulis Olandino Luis Maia Guterres, Partisan, kepada CAVR.
80. Geoffrey Robinson, *East Timor 1999 - Crimes Against Humanity*, A Report Commissioned by the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Los Angeles, UCLA, Juli 2003, hal. 160, Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004.
81. Wawancara dengan Manuel de Oliveira, 10 Oktober, 2003, Alas; wawancara dengan Bonifacio Guterres, 10 Mei, 2003, Baucau; pandangan yang bertentangan terdapat di wawancara dengan Antonio do Rosário, 23 Juni 2003, Hera.
82. Wawancara CAVR dengan Miguel Sanches, Maubara (Liquiça), 2003.
83. Tapol, Occasional Report No. 26, hal. 4.
84. Wawancara SCU dengan Tomas Gonçalves, 8 Agustus, 2000, hal. 21.
85. Kodam IX Udayana/Korem 164, Rekapitulasi PA/BA/TA ABRI Putra Daerah Timor-Leste, Dili, Juli 1998
86. Conboy, *Kopassus*, hal. 269.
87. Ibid, hal. 272
88. Pernyataan HRVD nomor #02281, #00706, #02130, #01619, #01632, dan #01633.
89. Wawancara CAVR dengan Antonio Babo Calsinha, Ermera, 28 Mei, 2003.
90. Wawancara dengan Geraldo da Cruz, 28 Juni 2004; pernyataan HRVD nomor #03039 dan #00643; wawancara dengan Bonifacio Guterres, Baucau 10 Mei, 2003.
91. Wawancara CAVR dengan Geraldo da Cruz, staf CAVR, 28 Juni 2004; pernyataan HRVD #00663.
92. Wawancara dengan Sebastião da Cunha, Manatuto, 12 Mei 2004; wawancara dengan Geraldo da Cruz, Dili, 28 Juni 2004.
93. Korem 164, Seksi-Intel, "Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih".
94. Pernyataan HRVD #07336-02; 07735-09.
95. Pernyataan HRVD # 06797-02; 07081-03; 07059-01.
96. General Prosecutor of the United Nations Transitional Administration in East Timor, Indictment against Joni Marques et al, hal. 6; transkrip pembelaan Joni Marques, Case 9-PID.C.G/2000, hal. 38.



97. Wawancara CAVR dengan João da Silva, Vemasse, Baucau 14 Juni, 2003.
98. Robinson, *East Timor* 1999, Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 84.
99. Lihat. "Tinjauan Strategis Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Komando Antar Resort Kepolisian 15.3 Timor-Leste Tahun 1978-1983," Dili, Maret 1978, Lampiran C, hal. 4.
100. "Daerah Pertahanan Kemanan Komando Antar Resor Kepolisian 15.3 Timor Timur. Tinjauan Strategis Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Komando Antar-Resor Kepolisian 15.3 Timor Timur tahun 1978 – 1983. Lampiran C, hal. 4, Dili, Maret 1978.
101. *Korps Marinir TNI AL, 1970-2000*, Dinas Penerangan Korps Marinir, Jakarta, 2000, hal. 219; wawancara dengan Aleixo Ximenes, 2 Februari, 2004.
102. Dokumen rahasia Daerah Pertahanan Keamanan Komando Antara Resort Kepolisian 15.3 Timor-Timur, "Laporan Komando Komtarres 15.3 Timor-Leste Dalam Rangka Kunjungan Kapolri Beserta Rom an Ke Daerah Operasi Timor-Leste," Lampiran 17, Juni 1978.
103. Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, "Instruksi Operasi No. INSOP/03/II/1982, hal. 5. [Catatan: karena tidak ada catatan tentang Wanra sebelumnya, maka dokumen ini barangkali menunjuk kepada Hansip yang bertugas sebagai Wanra]
104. Ibid, hal. 7-8
105. Ibid, hal. 6
106. Petunjuk Teknis No. JUKNIS/06/IV/1982, Babinsa/TPD Activity in developing and phasing out Trained People's Resistance Forces, dikutip dalam Budiardjo dan Liem, hal. 223 - 227
107. Petunjuk Teknis No. JUKNIS/06/IV/1982, Babinsa/TPD Activity in developing and phasing out Trained People's Resistance Forces, dikutip dalam Budiardjo dan Liem, hal. 223; Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, "Instruksi Operasi No INSOP/03/II/198, hal. 5; Lowry, hal. 111.
108. Pernyataan HRVD # 00626-02; 00796; 0626-02.
109. Wawancara dengan Marcelino Soares, 8 Juli 2003; Budiardjo dan Liem hal. 134; pernyataan HRVD # 06018-05, 00429-05
110. *Korps Marinir TNI AL 1970-2000*, Dinas Penerangan Korps Marinir, Jakarta, 2000, hal. 219.
111. Pernyataan HRVD # 07273, 03113-02, 7037
112. Lowry, hal. 111.
113. Ibid, hal. 112
114. Laporan KPP HAM Timor-Leste, 31/01/2000, alinea 38.
115. Wawancara CAVR dengan José Sales dos Santos, Liquiçá 25 Juli 2003, Bazartete, wawancara CAVR dengan Pedro dos Santos, Liquiçá, 9 Juli 2003.
116. Moore, hal. 25
117. Instruksi-Operasi No: Insop/03/II/1982, hal. 8.
118. Pernyataan HRVD # 07455-02
119. Laporan Komando, Komtarbes 15.3 Timor Timur Dalam Rangka Kunjungan Kapolri beserta rombongan ke daerah operasi Timor-Leste, hal.15
120. Alfredo Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Anak dan Konflik, 29 Maret 2004.
121. Tomas Goncalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, 15-18 Desember; wawancar CAVR dengan Tomas Goncalves, Dili, 23 Oktober 2003.
122. Petunjuk Tehnis Nomor: Juknis/05/II/1982 tentang Sistem Keamanan Kota dan Daerah Pemukiman," tanpa tandatangan, tanpa tanggal (halaman terakhir hilang).
123. Pernyataan HRVD # 07092-04
124. "Petunjuk Tehnis Nomor: Juknis/05/II/1982 tentang Sistem Keamanan Kota dan Daerah Pemukiman," hal. 5.
125. Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resor Militer 164/Wira Dharma "Instruksi Operasi No. INSOP/03/II/1982, hal. 1 (tidak lengkap).
126. "Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/03/II/1977," hal. 45; Departemen Pertahanan Keamanan, "Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan /Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/23/X/1978, hal. 20; Komando Resor Militer 164, "Petunjuk Tehnis Nomor: JUKNIS/01-A/IV/1982," tandatangan Williem da Costa, 10 September 1982, tetapi dihasilkan

- April 1982; Komando Operasi Keamanan Timor-Leste, "Prosedur Operasi Tetap Nomor: PROTAP/3/IV/1988, tertanggal 30 April 1988," Lampiran E-2, hal. 3; Kodam IX Kolakops, "Rencana Operasi 'Halo Kapaz,' tertanggal 31 August 1991, (rahasia), dikutip dalam Moore, hal. 21.
127. Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR hal. 30.
  128. 'Laporan Komando Komtarres 15.3 Timor-Leste Dalam Rangka Kunjungan Kapolri Beserta Rom an Ke Daerah Operasi Timor-Leste,' Lampiran 17; Kantor Statistik Provinsi Timor Timur, *Timor-Timur Dalam Angka* 1981, hal. 56.
  129. Lowry, hal. 112.
  130. Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004.
  131. Robinson, Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 85.
  132. "Gadapaksi Tegakkan Integrasi Timtim", *Suara Timor-Timur*, 12 Agustus 1996; Robinson, Submisi OHCHR kepada CAVR, "Chapter 6. Militias: History, Formation, and Legal Recognition," hal. 86.
  133. "Gada Paksi Kembangkan 17 Bidang Usaha di Timtim", *Suara Timor-Timur*, 14 Februari 1996; dan "HUT Kopassus Memiliki Makna Refleksi dan Introspeksi", *Suara Timor-Timur*, 17 April 1996.
  134. Komando Daerah Militer IX Udayana/Komando Resor Militer 164, Rekapitulasi Unsur Perlawanan Wilayah Provinsi Timor-Leste, Periode Tahun 1997/98, April 1998
  135. Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR hal. 98.
  136. Ibid, hal 87.
  137. Gugatan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, terhadap Wiranto, Zacky Anwar Makarim, Kiki Syahnakri, Adam Rachmat Damiri, Suhartono Suratman, Muhammad Noer Muis, Yayat Sudrajat, Abilio Jose Osorio Soares, Pengadilan Dili, Timor-Leste 22 Februari 2003.
  138. Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 98.
  139. Ibid, hal 87, 98.
  140. Ibid, hal. 102-103.
  141. Laporan KPP HAM Timor-Leste, 31/01/2000, alinea 51.
  142. Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 92-93, 104-105.
  143. Ibid, hal. 93
  144. Ibid, hal. 94
  145. Ibid, hal. 100.
  146. Ibid, hal. 100.
  147. Ibid, hal. 95.
  148. Ibid, hal. 101-103
  149. Ibid, hal. 106-113
  150. Ibid.
  151. Ibid.
  152. Ibid, hal. 107
  153. Ibid, hal. 103
  154. Ibid, hal. 104-105.
  155. Robinson hal. 129.
  156. Ibid, hal. 125, 129.
  157. Ibid, hal. 36.
  158. Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary-General, New York, 31 January 2000, A/54/726, S/2000/59, Alinea 136-140.
  159. Ian Martin, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-18 Maret 2003.
  160. Laporan KPP HAM Timor-Leste, , alinea 177, 180.
  161. Ibid, alinea 185, 191.
  162. Ibid, alinea 180.
  163. Ross Coulthart, "Timor on the brink", *Sunday Program*, Channel 9, Sydney, Australia. Ditayangkan Juni 1999.
  164. Laporan KPP HAM Timor-Leste, alinea 184, 185.
  165. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.

166. Ibid.
167. Arnaldo dos Reis Araújo, menjawab pertanyaan Saudara Yayat Handayana, Jakarta, 10 September 1980.
168. James Dunn, *East Timor: Rough Passage to Independence*, Longueville Books, NSW, 2003, hal. 71.
169. Dokumen rahasia Daerah Pertahanan Keamanan–Komando Antar Resort Kepolisian 15.3 Timor-Leste, Tinjauan Strategis Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Komando Antar-Resor Kepolisian 15.3 Timor Timur tahun 1978-1983
170. Roy Pakpahan, *Mengenal Timor Timur Dulu dan Sekarang*, Solidaritas Indonesia untuk Perdamaian Timor Timur (Solidamor), Jakarta, September 1998 hal. 16.
171. Wawancara CAVR dengan Armindo Soares Mariano, Kupang, 20 Juli 2004; Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
172. Roy Pakpahan, hal. 18.
173. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Perempuan dan Konflik, April 2003.
174. Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik. Politik internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003
175. Pakpahan, hal. 19
176. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
177. Jon Pedersen dan Marie Arnberg (ed.), *Social and Economic Conditions in East Timor*, International Conflict Resolution Program, Columbia University, New York, [tanpa tahun penerbitan], hal. 115.
178. Ibid, hal. 116.
179. Wawancara CAVR dengan Armindo Soares Mariano, mantan Bupati Viqueque, Kupang, 20 Juli 2004.
180. Kantor Statistik Provinsi Timor-Timur, *Timor-Timur Dalam Angka*, Dili, 1981.
181. Laporan DPRD Tingkat I Timor-Timur kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tentang Masalah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Timor-Timur, Dili, 3 Juni 1981; Dunn, *East Timor: A People Betrayed*, 240-241
182. 'DPRD complains', Report 102/DPRD/VII/1981, 3 Juni 1981, diterjemahkan dalam Timor Information Service No 32, Sept/Oct 1981, hal. 6.
183. Dunn, hal. 290.
184. 'Radiogram Menhankam/Pangab No. RDG/Siaga/240/B/VIII/1976,' tertanggal 14 Agustus 1976 [arsip CAVR].
185. Kementerian Pertahanan dan Keamanan 'Nomor: KEP/03/II/1977 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Daerah Pertahanan-Keamanan Timor Timur, Kodahankam Tim-Tim,' tertanggal 18 Februari 1977 [arsip CAVR].
186. Ulu Emanuel (ed), *20 Tahun Timor-Timur Membangun*, Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur, Dili, 1995, hal. 97.
187. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
188. Australian Parliamentary Delegation Report, 1983, hal. 66; wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
189. Ulu Emanuel, hal. 100.
190. Ibid, hal. 99
191. Jon Pedersen dan Marie Arneberg, *Social and Economic Conditions in East Timor*, International Conflict Resolution Program, Columbia University, New York, [tanpa tahun penerbitan], hal. 117.
192. Ibid, hal. 116.
193. TAPOL, Occasional Report No. 26 Oktober 1998; Taudevin, *East Timor: Too Little Too Late*, Duffy and Snellgrove, Sydney, 1999 hal. 77-78.
194. Pedersen dan Arnberg (ed.), hal. 116.
195. Ibid, hal. 118.
196. Ibid, hal. 117.
197. Wawancara CAVR dengan Claudio Vieira, Dili, 10 Juni 2004.
198. Wawancara CAVR dengan Armindo Soares Mariano, mantan Bupati Dili, Kupang, 20 Juli 2004; Wawancara CAVR dengan Claudio Vieira, mantan Bupati Lautém, Dili, 10 Juni 2004.

199. Wawancara dengan Armindo Soares Mariano, Kupang 20 Juli 2004
200. Pedersen dan Arneberg (ed.), hal. 116.
201. Mubyarto et al., *East Timor: The Impact of Integration*, Gadjah Mada University, Yogyakarta 1990, diterjemahkan oleh Indonesia Resources and Information Program, Australia, 1991, hal. 50.
202. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
203. Ulu Emanuel, hal. 163.
204. Mubyarto et al, hal. 61.
205. Kantor Statistik Timor-Timur, *Timor-Timur Dalam Angka 1983*, hal. 32; Kantor Statistik Timor-Timur *Timor-Timur Dalam Angka 1997*, hal. 57.
206. Mubyarto et al, hal. 60.